

Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si

POLITIK PENYIARAN LOKAL

Pengantar:
Ketua KPI Pusat



"REPOSISI KPI-KPID
KONSTELASI KONTEN-MUTASI ANALOG-DIGITAL"

Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si

POLITIK PENYIARAN LOKAL

Pengantar:
Ketua KPI Pusat



"REPOSISI KPI-KPID
KONSTELASI KONTEN-MUTASI ANALOG-DIGITAL"

JMPC

Politik Penyiaran Lokal

“Reposisi KPI-KPID - Konstelasi Konten - Mutasi Analog-Digital”

Edisi Pertama

Cetakan ke-1, Agustus 2020

Penulis

Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.

Editor

Yadi Mardiansyah, S.S.,M.Ag.

Desain Sampul dan Penata Letak
Sumarno Surahman

Copyright@ 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-50653-4-7

ISBN 978-602-50653-4-7



Penerbit



YAYASAN JARINGAN MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI
Kompleks Permai I No. 12 Cipadung, Bandung, Jawa Barat 40614

Kata Pengantar

Alhamdulillah Robbil 'Alamin.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: *Politik Penyiaran Lokal: Reposisi KPI-KPID; Konstelasi Konten; Mutasi Analog-Digital*. Buku ini berkisah hal yang sederhana, terkait dengan realitas dunia penyiaran, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebesaran Jawa Barat, tidak hanya karena wilayahnya yang seluas 3.710.061,32 hektar atau jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 49 juta orang atau sekitar sepertlima dari jumlah penduduk Indonesia, tetapi kesempatan berusaha dalam industri penyiaran pun sangat luas. Secara keseluruhan jumlah lembaga penyiaran sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah lembaga penyiaran di provinsi lain, baik jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang di daerah muncul LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, Jawa Barat merupakan wilayah sangat potensial dan strategis untuk tumbuh suburnya jasa penyiaran, baik lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi.

Kendati pengaturan tentang Rencana Induk (*master plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF) diubah lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (*master plan*) Frekuensi Radio

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF) perubahan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 memberikan jumlah kanal televisi di Jawa Barat sedikitnya terdapat 77 Saluran Frekuensi Radio UHF yang dibagi dalam 10 wilayah layanan dengan Frekuensi yang digunakan oleh televisi pada kisaran 478 s.d. 806 MHz UHF.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-15 Tahun 2003 & Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2009 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) memberikan jumlah kanal terbanyak di Jawa Barat se-Indonesia. Sedikitnya terdapat 311 Kanal Frekuensi Radio FM bagi wilayah layanan Jawa Barat dengan 83 wilayah layanan.

Hal tersebut ditambah lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/11/2011 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz. Band IV Ada 36 Kanal (22-37) Dan Band V Ada 11 Kanal (38-48). Di Jawa Barat : 11 Layanan Dengan 48 Chanal : (Majalengka-Kuningan SFM Cirebon-Indramayu)- (Kuningan SFM (Garut-Tasik).

Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2019, terdapat 79 televisi lokal yang sudah berijin di Jawa Barat, ditambah 1 Televisi Publik, 4 TV Komunitas, ditambah 15 TV berlangganan. Jumlah Radio Swasta FM ada 212, Radio Swasta AM 11, Radio Publik Lokal 8, plus Radio Komunitas yang berijin 29. Angka tersebut bertambah dengan munculnya TV Digital 48.

Kendati pada satu sisi fakta banyaknya lembaga penyiaran di wilayah layanan Jawa Barat menunjukkan potensi yang besar bagi perkembangan industri penyiaran, tetapi di sisi lain juga dapat memicu permasalahan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat. Berbagai tesis dari berbagai teori Komunikasi Massa mengajarkan masifnya pengaruh konten media massa, termasuk di antaranya konten siaran yang disajikan lembaga penyiaran, dapat membolak-balikkan perasaan, pemikiran, dan perilaku manusia.

Oleh karena itu, jika konten siaran tidak dikendalikan; diarahkan on the track menuju jalan yang benar, maka perasaan, pemikiran, dan perilaku masyarakat Jawa Barat dalam ancaman.

Anugerah sumber daya frekuensi yang banyak sebagaimana master plan yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bagi wilayah layanan Jawa Barat dapat juga memicu persaingan yang tidak sehat dan mendorong pengutamaan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan publik. Padahal, sumber daya alam Indonesia, termasuk frekuensi yang terbatas harus sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menegaskan hal itu melalui lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menggantikan Undang-Undang No. 24 Tahun 1997.

Kelahiran UU No. 32 Tahun 2002 memperbaiki banyak hal, termasuk di dalamnya “berbagi kewenangan” antara Pemerintah dengan lembaga independen yang merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berkedudukan di ibukota provinsi. Namun, realitas itu pun belum dapat memenuhi harapan masyarakat, tidak semua amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang berprinsip *diversity of contents* dan *diversity of ownership* dapat terpenuhi. Eksistensi KPI dan KPID pun acapkali menjadi persoalan di antara “ambisi” industriawan penyiaran dan kontroversi di antara peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong KPID harus reposisi dan kontradiksi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

Oleh karena itu, sejak lama banyak pihak, terutama *stakeholder* penyiaran berharap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pun segera direvisi. Sayangnya, revisi undang-undang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain perdebatan konsepsi yang panjang di antara stakeholder penyiaran, pasca lahirnya RUU pun masuk program legislasi nasional (Prolegnas), hingga lebih sepuluh tahun DPR RI tidak kunjung ketuk palu. Keberadaan RUU Penyiaran hingga tahun 2020 masih mengambang tidak menentu.

Padaahal tidak hanya aspek internal yang mendesak RUU itu segera disyahkan. Realitas eksternal dalam bentuk perkembangan teknologi

digital terus melesat memaksa industri penyiaran untuk beradaptasi, di antara regulasi yang masih abu-abu. Negara-negara Barat, bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah beranjak untuk digitalisasi, tetapi masyarakat penyiaran Indonesia masih bertempur dalam simpang siur pendapat. Digitalisasi pada 2020 hangat dalam berbagai perbincangan, tetapi sepi langkah realistis karena ada sebagian industri penyiaran yang menempatkan digitisasi sebagai peluang, tetapi tidak sedikit juga yang menganggapnya ancaman.

Apapun realitas yang menyergah dunia penyiaran Indonesia yang banyak akan, bahkan sudah menjadi korban adalah lembaga penyiaran lokal. Apalagi, persepsi UU No. 32 Tahun 2002 sudah “menghilangkan” lembaga penyiaran nasional. Yang ada Stasiun Siaran Jaringan (SSJ) dan Stasiun Penyiaran Lokal (SPL). Kini makin banyak SPL yang hidup segan mati pun tak mau; bahkan eksistensi SSJ pun mulai surut seiring makin melorotnya kepedulian terhadap konten lokal dan kearifan lokal. Konten makin mengglobal disertai dengan munculnya pesaing baru yang lebih handal karena menggunakan teknologi jaringan internet yang sangat digandrungi kalangan muda milenial seiring dengan surutnya generasi *baby boomers* dan bergesernya generasi Y dan generasi Z.

Realitas itu pun diimbangi dengan upaya “penyelamatan” dan obat yang mujarab adalah regulasi melek teknologi dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak, tidak hanya dari Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah bersama DPRD-nya memiliki peran penting dalam ikut menyelamatkan kondisi industri penyiaran lokal sekaligus menyelamatkan masyarakat daerah dari “membabibutanya” konten siaran yang masif mencari keuntungan semata dan persaingan yang makin terbuka.

Semua realitas tersebut dipotret oleh penulis dalam kacamata sederhana sebuah buku berjudul Politik Penyiaran Lokal dengan frame yang sederhana dalam perjalanan pengabdian penulis pada periode pertama menjadi Koordinator Pengawas Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Barat 2015-2020.

Dengan frame yang sederhana inilah yang penulis sangat sadari bahwa karya buku ini bukan sesuatu yang fenomenal, apalagi besar, tetapi mudah-mudahan menjadi warna tambahan bagi catatan sejarah penyiaran di Tanah Air, khususnya di Jawa Barat. Penulis pun sangat menyadari bahwa buku ini banyak sekali kekurangan, sehingga penulis

mohon maaf dan berharap atas inisiasi dan inspirasi pembaca dapat memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan dengan tinta ketulusan untuk membangun penyiaran nasional dan penyiaran lokal yang lebih baik dan memberikan manfaat besar pada publik. Hal itu bisa terjadi melalui karya lain yang disajikan pembaca atau melalui tangan penulis yang insya Allah tetap menjaga konsistensi untuk tetap berkarya dan berkarya demi bangsa.

Semoga Allah selalu meridloi dan memberikan kekuatan serta perlindungan terhadap kita semua. Jayalah penyiaran Indonesia dan peran aktif kontribusi penyiaran Jawa Barat menuju persatuan dan kesatuan Indonesia. ***

Terimakasih banyak untuk: Gubernur Jawa Barat (2013-2018) Bapak H. Ahmad Heryawan; Gubenur Jawa Barat (2018-2023) Bapak H. Muhammad Ridwan Kamil, Ketua DPRD Jawa Barat (2014-2019) Ibu Hj. Inne Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jawa Barat (2019-2024) Bapak H. Taufik Hidayat. Terimakasih untuk sahabat sejawat KPID Jawa Barat Periode 2015-2020: Dedeh Fardiah; Dadan Saputra. Neneng Athiatul Faiziyah, Aep Wahyudin, Irianto Edi Pramono, dan M. Saefurrohman. Ketua KPI Pusat (2016-2019): Yuliadre Darwis beserta komisioner lainnya dan Ketua KPI Pusat (2019-2023): Agung Suprio beserta komisioner lainnya. Terimakasih juga kepada seluruh guru/dosen, sahabat, kerabat, mitra kerja, dan mahasiswa yang tidak bisa saja sebutkan satu persatu bahwa kontribusinya sangat berarti. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan pada kita semua. Aamiin.

Bandung, Agustus 2020
Penulis,

Mahi M. Hikmat

Pengantar Ketua KPI Pusat

Potret Perkembangan Penyiaran

Salah satu produk reformasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU ini mempunyai semangat historis dan sosiologis dalam upaya demokratisasi penyiaran. Secara historis, UU ini mengakhiri sentralisasi informasi melalui Lembaga Penyiaran yang dikontrol oleh pemerintah, Orde Baru. Secara sosiologis UU ini menjadi jawaban atas perkembangan dinamika sosial dan teknologi, kendati dalam perjalanannya sampai saat ini, perlu dikaji ulang.



Agung Suprio, M.I.P

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi penyiaran inilah UU Nomor 32 Tahun 2002 mengamanahkan terbentuknya sebuah komisi penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa komisi penyiaran yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Di Pasal 8, KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa demokratisasi penyiaran merupakan tugas KPI dengan memperhatikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat tentang penyiaran. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah demokratisasi penyiaran sudah terwujud? Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi wajah penyiaran Indonesia?

Sejak diterbitkannya UU Penyiaran, lembaga penyiaran baik televisi atau radio bertumbuh pesat. Satu sisi, pertumbuhan ini membawa angin segar menyediakan ragam informasi. Masyarakat mempunyai banyak pilihan memilih dan memilah informasi. Tetapi tidak dapat dihindari, semakin banyak informasi dari lembaga penyiaran, maka pengaruhnya juga sangat berdampak bagi masyarakat.

Sebagaimana dicatat oleh KPI, tidak sedikit sanksi tertulis diberikan kepada lembaga penyiaran baik oleh KPI Pusat dan KPI Daerah. Diberikannya sanksi tertulis, ini akibat konten-konten program

siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan rambu-rambu penyiaran, atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).

Artinya bahwa, mewujudkan konten-konten berkualitas kepada masyarakat saat ini masih menjadi tugas bersama. Perlu ada kajian-kajian ilmiah maupun non-ilmiah dalam rangka mendorong konten-konten berkualitas hadir dari lembaga penyiaran. Di sisi yang lain, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, kita melihat bahwa informasi tidak hanya dari lembaga penyiaran, akan tetapi juga bisa didapatkan dari platform-platform digital atau lebih akrab dikenal sebagai media baru.

Ruang publik menjadi ruang bebas pertukaran informasi. Masyarakat sebagai penerima informasi menjadi rentan. Perlindungan publik menjadi isu krusial dalam konteks ini. Pasalanya, lembaga penyiaran yang selama ini diawasi dengan ketat oleh KPI, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran, sedangkan platform media baru sama sekali tidak ada yang mengawasi. Konten media baru lalu-lalang masuk ke benak publik tanpa rambu-rambu aturan dan pengawasan.

Saya menilai, pengawasan terhadap media baru dan platform digital ini bisa terus digaungkan agar menjadi diskursus publik, karena selain berkaitan dengan isu perlindungan publik, ia juga berkaitan dengan keadilan industri. Tentu saja, ini bukan berarti mengabaikan tugas utama KPI dalam pengawasan media baru, akan tetapi melebarkan sayap untuk mewujudkan konten-konten berkualitas bagi masyarakat.

Dan buku Politik Penyiaran Lokal “Reposisi KPI-KPID – Konstelasi Konten – Mutasi Analog-Digital” karya sahabat saya Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si. menjadi relevan untuk dibaca. Ia mencoba memotret perkembangan penyiaran dari sekup yang paling kecil, yakni Jawa Barat. Eksistensi KPI Daerah Jawa Barat dan pengawasannya terhadap konten lembaga penyiaran, sampai bagaimana proses *analog switch off* dalam dunia penyiaran Indonesia.

Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada Penulis atas terbitnya buku ini, semoga menjadi buku yang ikut serta membangun diskursus publik, lebih-lebih memberikan masukan dan saran serta kemanfaatan dalam upaya memabangun demokratisasi penyiaran di Indonesia.

Salam.

Kata Pengantar	v
Kata Pengantar KPI	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA	7
A. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia	7
B. Posisi Komisi Penyiaran Indonesia	12
C. KPI Tidak Akan Pernah Mati	17
D. Berharap pada Revisi Undang-Undang	24
BAB III EKSISTENSI KPID JAWA BARAT	33
BAB IV PROBLEMATIKA PENYIARAN	49
A. Tahun Kekerasan Penyiaran	49
B. Televisi dan Wabah Begal	54
C. Bercanda dengan Tidak Mencela	57
D. Kontroversi Dangdut	61
E. Melindungi Anak; Menghukum Terduga	66
F. Migrasi Film Bioskop ke Televisi	69
G. Melarang Tayangan Kartun	71
H. Mewaspada Konten Siaran Iklan	74
I. Tahun Mistik, Horor, dan Supranatural	78
J. Pembatasan Lagu Berbahasa Inggris	81
K. Mengawasi Media Sosial	84
BAB V PENGAWASAN SIARAN KEAGAMAAN	89
A. Siaran Keagamaan	91
B. Siaran Ramadhan di Televisi	95
C. Pengaruh Siaran Ramadhan	97

BAB VI PENGAWASAN SIARAN POLITIK	105
A. Tahun Politik	105
B. Konten Siaran Politik	109
C. Kampanye di Lembaga Penyiaran	114
D. Debat Publik	117
E. Ancaman Informasi Hoax	119
F. Keterbukaan Informasi Pemilu	122
BAB VII PENGAWASAN SIARAN KONTEN LOKAL	127
A. Dominasi Konten Siaran	127
B. Peran Lembaga Penyiaran Lokal	132
C. Wakil Rakyat dan Konten Lokal	134
D. Pengawasan Konten Lokal	140
BAB VIII APRESIASI PENYIARAN	153
A. KPID Jabar Award 2015	155
B. KPID Jabar Award 2016	159
C. KPID Jabar Award 2017	164
D. KPID Jabar Award 2018	169
E. KPID Jabar Award 2019	174
BAB IX POLITIK PENYIARAN DAERAH	181
A. Pemerintah Daerah dan KPI Daerah	181
B. DPRD dan KPI Daerah	185
BAB X PENUTUP	187
DAFTAR PUSTAKA	201

PENDAHULUAN

Kendati dalam lima tahun terakhir (2015-2020) jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat tidak bertambah secara signifikan, bahkan sebaliknya menurun, tetapi secara keseluruhan sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah lembaga penyiaran di provinsi lain. Baik jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang di daerah muncul LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) jumlahnya cukup pantastik. Secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, Jawa Barat merupakan wilayah sangat potensial dan strategis untuk tumbuh suburnya jasa penyiaran, baik lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi. Jawa Barat pun memiliki jumlah penduduk yang besar: lebih kurang 50 jutaan, dengan wilayah yang luas: lebih dari 35.000 km², serta memiliki banyak aset dan potensi lokal yang sangat kaya untuk tumbuh suburnya berbagai kegiatan, termasuk kegiatan jasa penyiaran.

Dulu, perihal penyiaran di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang memiliki “karateristik” Pemerintah Sentris, seperti tergambar dari Pasal 7 yang menyatakan bahwa Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian, Pemerintah didampingi oleh BP3N (Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional). BP3N adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah kerja sama sebagai wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, Pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional. Kemudian Pasal 17, bahwa Lembaga penyiaran swasta wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah.

Lima tahun kemudian, lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002

sebagai pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Undang-Undang tersebut mendorong tumbuh suburnya industri penyiaran nasional, baik penyiaran lokal maupun penyiaran “nasional”. Jawa Barat menggeliat menjadi wilayah layanan tempat bersaing berebut konsumen industri penyiaran; selain berdirinya sejumlah lembaga penyiaran lokal, nyaris semua lembaga penyiaran “nasional” yang pusat stasiun siarannya di Jakarta pun berjaringan dan mengudara di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) memberikan jumlah kanal terbanyak di Jawa Barat se-Indonesia. Sedikitnya terdapat 311 Kanal Frekuensi Radio FM bagi wilayah layanan Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk berkembangnya peluang usaha jasa penyiaran. Untuk televisi analog, baik untuk stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Frekuensi yang digunakan oleh televisi pada kisaran 478 s.d. 806 MHz UHF.

Jumlah kanal yang banyak tersebut, khusus kanal yang dialokasikan untuk kanal televisi, di dalamnya termasuk 17 TV berjaringan yang biasa disebut Televisi Nasional alih-alih Televisi Jakarta yaitu TVRI, RCTI, Indosiar, SCTV, ANTV, MNC, Trans TV, Trans 7, TV One, Metro, Global TV, NET TV, RTV, O’Channel, I-News, Garuda TV, dan Kompas TV.

Pada tahun 2009, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF).

Dalam Permenkominfo tersebut terdapat perubahan atas Kepmenhub yang di antaranya, penyelenggaraan televisi analog pada pita UHF dapat menggunakan kanal frekuensi radio apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut: Permohonan penggunaan kanal frekuensi radio telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebelum tanggal 22 Agustus 2008 dan Mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktur Jenderal.

ISR untuk penggunaan kanal frekuensi radio dapat diterbitkan setelah: a. Dilakukan analisa teknis yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal; b. Dipenuhi ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita UHF; c. Penggunaan kanal frekuensi radio tersebut dinyatakan tidak menimbulkan gangguan terhadap penggunaan kanal frekuensi lainnya yang sudah berizin dan/atau penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran analog pada pita UHF yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ISR untuk penggunaan frekuensi radio dicabut dalam hal: a. beroperasinya penyelenggaraan penyiaran televisi siaran analog pada pita UHF pada wilayah layanan. Tentang wilayah layanan masih diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 yang terinci dalam Lampiran IV; b. beroperasinya penyiaran televisi siaran digital pada pita UHF sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (1) Wilayah layanan yang dialokasikan sebanyak 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) kanal frekuensi, 2 (dua) kanal frekuensi di antaranya disediakan untuk kanal transisi televisi digital tercantum dalam Lampiran IV; dan (2) Wilayah layanan yang dialokasikan sebanyak kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) kanal frekuensi, 1 (satu) kanal frekuensi di antaranya disediakan untuk kanal transisi televisi digital tercantum dalam Lampiran IV.

Namun tahun 2014, pengaturan tentang Rencana Induk (*master plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF) diubah lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014. Namun, perubahan tersebut tidak mengubah jumlah kanal yang ada di wilayah layanan Jawa Barat; masih seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 yang memberikan jumlah kanal terbanyak di Jawa Barat se-Indonesia.

Wilayah layanan Jawa Barat pun dikenal sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 79 televisi lokal yang sudah berijin di Jawa Barat, ditambah 1 Televisi Publik,

4 TV Komunitas, ditambah 15 TV berlangganan. Jumlah Radio Swasta FM ada 212, Radio Swasta AM 11, Radio Publik Lokal 8, plus Radio Komunitas yang berijin 29. Angka tersebut bertambah dengan munculnya TV Digital 48. (Sumber: KPID Jabar 2019)

Kendati secara umum dalam konteks penyelenggaraan lembaga penyiaran terbagi dua, yakni lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran “nasional”. Lembaga penyiaran lokal adalah lembaga penyiaran yang didirikan atau berdomisili di wilayah lokal (Jawa Barat) dan daya jangkau siaran terbatas lokal, sedangkan lembaga penyiaran “nasional” adalah lembaga penyiaran yang berdomisili di Jakarta dengan daya jangkau sangat luas ke antar provinsi.

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang berangkat dari semangat mewujudkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang serta kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis, terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antar-wilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional. Hal itu telah melahirkan sistem penyiaran berjaringan, sehingga Undang-Undang Penyiaran memiliki perspektif bahwa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lokal (SPL) dan Stasiun Siaran Jaringan (SSJ) pengganti lembaga penyiaran “nasional”. Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan di lokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005.

Keberadaan Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) dalam sistem penyiaran Indonesia sebagaimana amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bukan hanya dimaksudkan pada tidak terjadinya monopoli penguasaan lembaga penyiaran, tetapi juga untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang bermuatan lokal. Hal itu sangat urgen ketika faktanya siaran nasional dikuasai oleh televisi Jakarta yang notabene mereka lebih didominasi oleh siaran bermuatan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Padahal, bicara Indonesia bukan hanya Jabodetabek, tetapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang menjangkau wilayah Jawa Barat

seharusnya menyiarkan isi siaran yang bermuatan lokal ke-Jawa-Baratan, artinya fakta-fakta yang ada di Jawa Barat, termasuk siaran yang bermuatan lokal Jawa Barat harus merupakan bagian yang dominan dalam program siaran SSJ. Jawa Barat bukan hanya Bogor, Depok, Bekasi, tetapi juga Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu.

Lembaga penyiaran manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyiarkan isi siaran yang bermuatan budaya lokal Jawa Barat. Yang dimaksud budaya lokal Jawa Barat tersebut, bukan hanya seni lokal Jawa Barat, tetapi aspek strategis lainnya yang berada di Jawa Barat, mulai dari fakta sosial yang ada di Jawa Barat sampai penggunaan karya kreatif, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang ada di Jawa Barat.

Siaran Lokal memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Merencanakan dan memproduksi program (mata acara); 2. Menyiapkan / mengadakan program; 3. Menyiapkan pola acara, baik harian (*rundown*), mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan seterusnya; 4. Menyelenggarakan siaran, baik artis maupun jurnalistik; 5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain; 6. Mengadakan kerjasama dengan *production house*; 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; 8. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Realitas tersebut di antaranya yang mendorong Pemerintah untuk memberikan aksesitas memadai terhadap masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam mengoreksi isi siaran menuju penyiaran yang sehat. Eksistensi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi KPI dan KPID dalam kehidupan kenegaraan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Penyiaran sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen.

KPI dan KPID memiliki kewenangan dan tugas sebagai regulator “teknis”, serta melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan penyiaran, menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya, memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang isi siarannya

bertentangan dan/atau melawan peraturan perundang-undangan, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. ***

BAB II

KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

A. Sejarah Penyiaran Indonesia

Pembangunan penyiaran di wilayah Indonesia bukan hanya terjadi pada masa Pemerintahan Indonesia setelah merdeka, tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka pun sudah dilakukan. Salah satu bukti otentik adalah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya tahun 1934 sudah dikeluarkan aturan tentang penyiaran Radiowet. Baik langsung maupun tidak langsung aturan tersebut dijadikan dasar untuk didirikannya NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij) yang memperoleh hak-hak istimewa dari Pemerintah Hindia Belanda.¹

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kehidupan penyiaran di Indonesia makin berkembang. Apalagi, jasa besar bagi Siaran Radio Republik Indonesia, yakni dengan menyiarkan langsung pembacaan teks Proklamasi ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke negara tetangga, sehingga peristiwa yang sangat bersejarah tersebut dengan serentak dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan tentang penyiaran pun makin berkembang seiring berkembangnya pembangunan Indonesia pasca Kemerdekaan, terutama berkembang pesat pada masa peralihan antara Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Pada masa itulah bermunculan radio-radio siaran dan radio komunikasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non-Pemerintah. Selain itu, lebih kurang selama hampir 27 tahun, radio siaran diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun pada awal tahun 1997, dengan proses yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang

1 "harian radio", <http://www.jakarta.go.id/>, diakses tanggal 16 Januari 2013

kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran pun tidak mulus. Pada masa berlakunya, UU Penyiaran banyak dihadapkan dengan pro dan kontra, terutama berkait dengan keberadaan lembaga pengawas yang diberinama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Apalagi pada masa yang sama, Orde Pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terjadi pembubaran Departemen Penerangan (Depen) yang semasa Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto menjadi “polisi media”.

Awalnya, pembubaran Departemen Penerangan disambut dengan gegap gempita, terutama oleh kalangan insan pers karena melahirkan pengharapan baru bagi kebebasan pers nasional. Rezim Orde Baru terlalu banyak intervensi dalam memformat kebebasan pers, bahkan sensor isi media juga merupakan bagian dari kewenangan mereka. Pers pada jaman itu harus mendukung program pembangunan dan harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Walaupun realitasnya kehidupan pers sangat bergantung pada kehendak pemerintahan. Jika terdapat pers yang melenceng dari kebijakan pemerintah, maka pemerintah mengambil tindakan yang sangat keras dengan melakukan pembredelan, seperti yang menimpa Harian Indonesia Raya (1974) dan majalah Tempo, DeTik dan Editor (1994). Pembredelan bagi pers adalah ditariknya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diberikan oleh Departemen Penerangan.

Selain metode yang represif, budaya telepon pun menjadi hambatan kebebasan pers. Jika terdapat berita “panas” yang menyangkut pemerintah, tidak jarang pemerintah, melalui Departemen Penerangan atau lembaga lainnya menelpon redaksi untuk menghentikan berita tersebut. Bahkan, kalau coba-coba redaksi atau wartawan memaksa untuk memberitakan, maka redaksi atau wartawan tersebut berada dalam ancaman.

Secara organisatoris para wartawan pun diatur secara ketat. Sejak tahun 1969 mereka diwajibkan untuk menjadi anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), yang pengurusnya diwakili hanya oleh para wartawan yang setia pada pemerintah dan para petinggi militer (Hill 1995: 67). Hanya PWI yang berhak mengeluarkan kartu pers. Pemecatan sebagai anggota PWI berarti juga secara *de facto* larangan untuk bekerja

sebagai wartawan. Kenyataan bahwa Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) didirikan dengan dukungan PWI dan bahwa sebagian besar orang-orang yang sama duduk dalam kepengurusannya, menunjukkan karakter elit PWI dan menjadikan penyatuan keduanya sebagai “kembar siam” (Hill 1995: 74).

Dewan Pers yang ada pada saat itu memiliki tugas resmi sebagai jembatan antara pemerintah dan kalangan media. Mereka harus memberi masukan politik dalam proses pemberian SIUPP. Dewan Pers didirikan tahun 1967 melalui peraturan presiden telah menunjukkan bahwa lembaga itu lebih ditujukan sebagai alat pemerintah dan bukanlah lembaga yang memungkinkan terjadinya *selfcontrol*. Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan, anggotanya pejabat dinas intelijen dan pejabat departemen (Hill 1995: 65).

Tahun 1980-an berdirilah sejumlah televisi swasta, seperti, RCTI (1987) SCTV (1989), TPI (1990), Anteve (1993), Indosiar, Lativi yang sekarang menjadi Trans-7, Trans TV, dan yang lainnya. Termasuk juga berkembangnya TV-TV lokal yang hadir di setiap provinsi, bahkan di kabupaten/kota.

Pada era Orde Baru, ketergantungan pers nasional terhadap sistem politik tercermin dari munculnya kewajiban pers nasional (Indonesia) yang berawal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Menurut ketentuan tersebut, pers nasional memiliki lima kewajiban, yakni, 1) mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 2) memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila. 3) memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers, 4) membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, komunisme, dan fasisme-diktatur, dan 5) menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Ketergantungan sistem pers Indonesia terhadap sistem politik tersebut terus berlanjut kendati undang-undang yang mengatur kehidupan pers berubah. Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, ketergantungan sistem pers terhadap sistem politik tetap tampak dari tugas dan kewajiban pers nasional dalam melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila,

disamping memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menggelorakan semangat pengabdian dan memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Kemudian, ketergantungan itu berimplikasi pada pembinaan pribadi wartawan. Pembinaan wartawan dipengaruhi oleh garis ideologi yang dianut sistem politik seperti tampak dalam Kepribadian Wartawan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, wartawan Indonesia harus memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersifat ksatria, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, dan berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan. Wartawan Indonesia pun dituntut untuk menampilkan kepribadian yang berjiwa Pancasila dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pembelengguan seperti itu menampakkan bahwa ketergantungan sistem pers pada sistem politik secara berlebihan dapat berakibat tidak baik terhadap pilihan jenis dan kandungan materi berita. Berita yang disajikan dapat dipastikan sulit keluar dari kerangka ideologis dan kebijakan yang digariskan pemegang kekuasaan. Jika menyimpang, berbagai kemungkinan kurang menguntungkan akan menimpa kehidupan pers tersebut, misalnya, mendapat teguran keras, gugatan melalui pengadilan atau kalau pada masa Orde Baru terjadi pembredelan, seperti yang menimpa *Majalah Sastra* tahun 1968, *Harian Sinar Indonesia Baru* 1976, *Majalah Monitor* 1991 dan yang terakhir menimpa *Majalah Tempo*.

Adanya BP3N dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipersepsi sebagai beban tambahan, baik bagi insan pers yang bergerak di bidang penyiaran maupun bagi para kreator penyiaran. Institusi itu dianggap sebagai sebuah badan otoriter yang mengatur mengenai penyiaran. Penghapusan Departemen Penerangan dianggap oleh Presiden Republik Indonesia ke-4 merupakan langkah awal bagi masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Gus Dur berpendapat bahwa adanya Departemen Penerangan merupakan departemen yang mengancam kebebasan berpendapat. Namun, realitasnya dengan dibubarkannya Departemen Penerangan menimbulkan masalah baru, yaitu tidak adanya kontrol dari Pemerintah terhadap media, sehingga media dengan bebas mengatur kontennya sendiri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran pun

dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia teknologi dan juga perkembangan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pun sempat menjadi perbincangan hangat karena tidak ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri yang diindikasikan karena adanya argumentasi dari Presiden bahwa masih banyaknya substansi yang belum disetujui Pemerintah, di antaranya terkait dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kewenangan Pemerintah dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Walaupun kenyataannya tidak ada penjelasan yang resmi dari Pemerintah atau Presiden mengenai tidak ditandatanganinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Namun, berdasarkan keterangan salah seorang Tim Asistensi yang mendampingi pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa yang menyebabkan tidak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena substansi pembentukan lembaga baru yaitu KPI yang dianggap akan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat.

Pemerintah pun berpendapat bahwa izin penyelenggaraan penyiaran seharusnya berada dalam wilayah Pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Argumentasi Pemerintah karena frekuensi merupakan kekayaan negara yang harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Doly (2015), selain itu juga banyak masyarakat menilai bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih belum mendukung reformasi dan mengekang kebebasan pers.

Namun, sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 bahwa dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sah diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002.

Sejak itulah dunia penyiaran di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui jalan yang cukup panjang, kehadiran undang-undang tersebut telah menampilkan paradigma baru tentang pengaturan dunia penyiaran di Indonesia. Paradigma baru tersebut adalah keterlibatan publik dalam setiap gerak langkah dunia penyiaran. Hal tersebut didasari bahwa aktivitas penyiaran merupakan aktivitas yang berada pada ranah publik, apalagi jika dipandang frekuensi merupakan milik publik dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan publik.

Perubahan mendasar bergantinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di antaranya, dibentuknya badan regulator penyiaran yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia); munculnya sistem siaran berjaringan, penjaminan bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan berbagai pembatasan bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Namun, perubahan-perubahan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai *judicial review* beberapa pasal melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, koreksi terhadap Undang-Undang Penyiaran pun dilakukan dengan berbagai tafsiran, sehingga substansinya seringkali menjadi bias.

B. Posisi Komisi Penyiaran Indonesia

Bidang penyiaran merupakan sektor publik yang perlu dilindungi dan diregulasi karena merupakan sebagian dari infrastruktur telekomunikasi. Menurut Wasko (1982), regulasi dibutuhkan karena terbatasnya jumlah frekuensi serta kuatnya efek media penyiaran dalam mempengaruhi khalayak. Untuk menghasilkan penyiaran yang berkualitas, merupakan suatu keharusan diberlakukannya suatu regulasi, sehingga dengan pengaturan yang tepat, akan didapatkan informasi yang objektif, serta memungkinkan terselesaikan beberapa problem kelangkaan medium yang dapat memberikan beragam informasi yang berorientasi pada kepentingan publik (Hoffman-Riem, 1999: 270).

Sebagaimana Pansus RUU Penyiaran DPR RI, Effendi Choiri (dalam Hidayat, 2018) sampaikan bahwa kehadiran KPI adalah untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik: frekuensi radio yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Kehadiran KPI

untuk mendistribusikan frekuensi radio secara adil kepada warga negara demi terciptanya demokratisasi penyiaran agar sumber daya alam yang bersifat terbatas tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Secara konstitusional, hal itu merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-4 tanggal 10 Agustus 2002.

Secara utuh ketiga ayat dalam Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendati menurut Denny Indrayana (dalam Hidayat, 2018), dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPI terbentuk untuk memenuhi kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak asasi warga negara sesuai isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2 tanggal 18 Agustus 2000. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Posisi KPI sebagai lembaga negara bersifat independen yang mengatur mengenai hal-hal tentang penyiaran. Dalam pandangan Riyanto (2013), KPI memiliki perbedaan dengan lembaga negara seperti yang terdapat dalam UUD 1945 karena hanya mengatur mengenai penyiaran. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga ekstra struktural (lembaga di luar kementerian), lembaga kuasi negara atau *state auxiliary agency*, tetapi tetap terbilang sebagai *executive branch*. Lembaga seperti KPI merupakan ciri yang berkembang pada negara-negara demokratis. Otoritasnya merupakan institusi yang terlepas dari Pemerintah. Dalam konsep demokrasi, peran Pemerintah semakin mengecil, sedangkan peran publik (masyarakat) semakin membesar, sehingga diperlukan lembaga khusus yang mewakili kepentingan publik.

Memang, ketika Indonesia berusaha konsisten menjalankan demokrasi, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan

perubahan terhadap UUD 1945, sehingga UUD 1945 yang setadinya “disakralkan”, pada masa reformasi dilakukan perubahan sebanyak empat kali perubahan.

Amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali selama 4 tahun berturut-turut, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14 - 21 Oktober 1999 terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Amademen kedua UUD 1945 sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan Kedua menyempurnakan dan menambahkan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Amandemen ke-3 UUD 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1-9 November 2001. Perubahan ketiga menyempurnakan dan menambahkan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C.

Amandemen ke-4 UUD 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2002. Pengubahan dan/atau penambahan keempat Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Salah satu perubahan yang merupakan “imbas” dari amandemen UUD 1945 dan merupakan perubahan pasca-reformasi adalah bermunculannya lembaga-lembaga negara bantu yang dibentuk oleh negara. Menurut Hidayat (2018), pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut unik karena pengaturannya tidak seragam: ada yang diatur

langsung dalam UUD 1945, melalui undang-undang, bahkan ada yang diatur cukup dengan Keputusan Presiden. Kendati status lembaga tersebut, dalam pandangan Sri Soemantri dan Jimly Asshiddiqie (dalam Hidayat, 2018) sama sebagai lembaga negara. Namun dalam pandangan Teori tentang Norma Sumber Legitimasi, derajat kedudukan lembaga negara tersebut berbeda: lembaga negara yang sumber kewenangannya dari UUD 1945 akan memiliki derajat lebih tinggi daripada lembaga negara yang sumber kewenangannya dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Nama lembaga-lembaga negaranya pun beragam: ada komisi, badan, dewan, dan lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Peyiaran Indonesia, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Penempatan TKI, Dewan Pers, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, dan lain-lainnya. Hidayat (2018) mencatat terdapat 52 lembaga-lembaga negara tersebut.

Miranda Risang Ayu (2009) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut merupakan jembatan penghubung antar kekuasaan Pemerintah dan masyarakat. Lembaga negara yang status hukumnya tidak independen dan menjadi bagian dari Pemerintah (*executive agency*) akan menjadi pendukung Pemerintah. Sementara itu, lembaga negara yang status hukumnya independen akan lebih berpihak dan condong pada kekuatan politik rakyat, posisinya berada di antara kekuatan rakyat dan kekuasaan negara. Salah satu lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kewenangannya diatur melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sesuai amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengawasan terhadap konten siaran pada lembaga penyiaran merupakan tugas dan wewenang KPI (Komisi Peyiaran Indonesia) untuk di tingkat pusat dan KPID (Komisi Peyiaran Indonesia Daerah) untuk di daerah atau di wilayah layanan se-provinsi.

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Dalam sistem penyiaran nasional tersebut, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional

terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk Stasiun Penyiaran Lokal (SPL) dan Stasiun Siaran Jaringan (SSJ). Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat 7 pasal yang khusus mengatur tentang kedudukan, pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang KPI, yakni Pasal 6 sampai Pasal 12.

Komisi penyiaran dalam undang-undang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi DPR RI, dan KPI Daerah diawasi DPRD Provinsi.

KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI/KPID mempunyai wewenang:² a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI/KPID mempunyai tugas dan kewajiban:³ a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah

2 Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002

3 Pasal 8 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002.

berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketua dan Wakil Ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya⁴.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi⁵.

C. KPI Takan Pernah Mati

Kendati paparan di atas mendeskripsikan bahwa kedudukan KPI (KPIP & KPID) secara yuridis cukup kuat karena dibentuk tidak hanya berdasarkan perintah Undang-Undang, yakni UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi juga merupakan amanah konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945. Secara tersurat langsung Pasal 28F dan Pasal 33 UUD 1945 dan yang tersirat tersebar dalam pasal-pasal lainnya mengamanahkan KPI untuk menjalankan fungsinya dalam berbagai aspek, terutama yang terkait dengan kehidupan penyiaran nasional agar dapat memberikan manfaat yang positif bagi bangsa dan negara.

Kenyataannya, nasib KPI di Republik Indonesia ini tidak seindah seharusnya. Kerikil tajam kadang menghadang perjuangan KPI, di antaranya tidak hanya terjadi pada awal-awal KPI dan KPID di provinsi-provinsi dibentuk, tetapi juga setelah lebih dari satu dasa warsa perjalanannya. Kerikil itu menajam dan mulai menghujam dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut “mencerabut” posisi KPID dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah. Hunjaman kerikil semakin dalam ketika Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga posisi KPID pada Pemerintah Daerah makin absurd.

Pakar Komunikasi Senior dari Universitas Padjadjaran, S. Sahala Tua Saragih menulis sebuah artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat, 29 Maret 2017 dengan judul Matinya KPID. Semua isi pemaparannya nyaris benar. Fakta di lapangan pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014

4 Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 32 Tahun 2002.

5 Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002.

tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah dan melahirkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kondisi kelembagaan dan keuangan sejumlah KPID di sejumlah provinsi di Indonesia menghadapi masa yang sulit.

Berikut tulisan lengkap S. Sahala Tua Saragih yang cukup mencengangkan:

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mati? Mengapa? Siapa yang mematikannya? Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) melanggar Undang-undang No.32/2002 tentang Penyiaran (UUP)?

Ini benar-benar berita buruk. Di sini tak berlaku ungkapan dalam dunia jurnalisme, berita buruk adalah berita baik. Gara-gara penghapusan anggaran kini lebih dari separuh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terancam lumpuh. Sebanyak 20 KPID di antara 34 KPID sedang bergejolak. Bahkan KPID Sumatera Barat (asal Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis) dan Gorontalo sejak Januari lalu sudah mati total karena tak punya anggaran sama sekali. Fakta lain, KPID Jambi dileburkan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi. Akibatnya jelas, semua (tujuh) anggota KPID Jambi tak bisa bergerak secara independen. Ini jelas bertentangan dengan amanat pasal 7 UUP.

Apakah mungkin pemerintah daerah yang juga membawahi KPID menjadi lembaga negara yang bersifat independen? Di negara mana ada pemerintah yang bersifat independen? Siapa pun tahu, KPI sebagai lembaga regulator dunia penyiaran yang benar-benar independen pastilah bukan perpanjangan tangan atau bawahan pemerintah pusat dan pemda provinsi.

Salah satu fungsi utama media massa elektronik (siaran) adalah mengontrol pemerintah. Apakah mungkin Pemda memberi kebebasan kepada KPID untuk mengontrol dirinya sebagai penguasa? KPI Pusat (KPIP) dan KPID justru sengaja dibentuk dalam rangka lebih memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional dan daerah. KPIP dan KPID bertugas untuk menampung aspirasi rakyat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran. Apakah mungkin KPID melaksanakan dengan konsekuen amanat UUP ketika anggarannya dihapuskan?

Sudah, sedang, dan akan matinya semua (34) KPID terjadi gara-gara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. PP kontroversial ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk tidak lagi

menganggarkan dana kepada KPID. Selama ini anggaran KPID diperoleh dari APBD Provinsi sesuai dengan amanat pasal 9 UUP.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif mengatakan, APBD hanya bisa diberikan secara langsung kepada unit kerja pemda seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Komunikasi dan Informatika. “KPID bukan perangkat Pemda,” katanya (Koran Tempo, 24-3-2017).

Alternatifnya, kata Arsan Latif, dana KPID bisa diambil dari APBD rekening hibah. Masalahnya, kalau hibah, artinya terserah pemdanya, apakah akan memberi atau tidak memberi. Kemdagri sudah berencana menyosialisasikan mekanisme penganggaran untuk KPID melalui mekanisme rekening hibah.

Kita tidak tahu mengapa pemerintah (Kemdagri) membuat PP yang jelas-jelas bertentangan dengan UUP. Pasal 9 ayat 6 UUP dengan tegas menyatakan, pendanaan KPI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sudah terwujud selama lebih dari sepuluh tahun. Pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan lain. Menteri Dalam Negeri tidak bisa membantah bahwa PP itu melanggar UUP yang pasti dibuat Presiden Megawati Soekarnoputri dan DPR pada akhir 2002.

Pengebirian

Keberadaan KPID tegas disebut dan diatur dalam UUP pasal-pasal 7, 9, 10, 11, dan 12. Pasal 7 ayat 3 berbunyi, “KPI terdiri dari KPI Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan di KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi.” Dalam pasal 7 ayat 4 UUP juga dinyatakan, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pun pasal 7 ayat 2 UU Penyiaran menegaskan, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Mustahil Mendagri tidak mengetahui hukum Penyiaran yang mengatur KPID ini.

Dengan dihapuskannya anggaran KPID dari APBD provinsi, dengan sadar penuh Pemerintah Pusat (Kemdagri) telah mengebiri KPI. Bagaimana mungkin KPI yang beranggotakan hanya sembilan orang mampu memantau dan mengawasi ribuan stasiun radio dan televisi lokal

yang tersebar di semua provinsi (Kota dan Kabupaten)? Percayalah, dengan diberlakukannya PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, yang mati bukan hanya semua KPID. KPIP pun akan memasuki masa MPP (mati pelan-pelan). Mustahil KPIP mampu melaksanakan seluruh amanat UUP bila tak dibantu KPID di semua Provinsi. Buktinya, selama ini meskipun sudah bekerjasama dengan semua KPID, ternyata KPIP dan KPID tak mampu mengatasi semua masalah penyiaran di Tanah Air.

Betapa banyak, luas, tinggi, dan beratnya beban kerja KPIP dan KPID dapat kita simak isi pasal 8 ayat 3 UUP. Menurut pasal ini, KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri kreatif; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan diberlakukannya PP No. 18/2016 tersebut, cepat atau lambat semua komisi negara lainnya yang ada di daerah-daerah juga akan bernasib sama buruk dengan KPID.

*Entah mengapa hingga kini DPR dan DPRD di semua provinsi masih membisu. Apakah mereka tak mengetahui masalah serius ini? Selama ini banyak juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menaruh perhatian besar terhadap dunia penyiaran nasional dan daerah. Akan tetapi hingga sekarang mereka tak mempersoalkan PP No. 18/2016 tersebut. Warga masyarakat, yang suka atau tidak suka, setiap hari menjadi khalayak media elektronik nasional dan daerah, sudah waktunya sekarang bersuara lantang, memperjuangkan eksistensi semua KPID. Seperti komisi-komisi negara lainnya, KPIP dan KPID juga diutus sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat republik ini, terutama di bidang informasi. **

Isi tulisan tersebut cukup menyedihkan pada posisi KPI, khususnya KPID-KPID yang ada di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, sehingga wajar S. Sahala Tua Saragih mempersepsi KPID akan mati. Namun,

pandangannya tersebut tidak sependapat seratus persen dengan penulis, sehingga penulis membalas tulisan tersebut yang dimuat di *Pikiran Rakyat* pada 13 April 2017. Secara utuh demikian tulisan balasan penulis tersebut.

Tulisan S. Sahala Tua Saragih yang berjudul Matinya KPID (PR, 29 Maret 2017) nyaris benar. Fakta di lapangan pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah dan melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kondisi kelembagaan dan keuangan sejumlah KPID di sejumlah provinsi di Indonesia menghadapi masa yang sulit.

Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang varian menanggapi peraturan perundangan tersebut. Sebagian Pemda komit untuk tetap mengakui eksistensi KPID dengan memfasilitasi sekretariat dan anggaran; sebagian menganggarkan, tetapi tidak “dicairkan”; sebagian mengubah dalam bentuk hibah, bahkan ada juga yang sama sekali tidak menganggarkan.

Kelembagaan KPID Jabar, terutama dalam fasilitasi tenaga sekretariat dan keuangan pun mengalami perubahan. Sekretariat KPID Jabar yang setadinya otonom sebagai OPD yang mandiri dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III “dibubarkan”. Fasilitasi sekretariat KPID Jabar dialihkan dalam Tupoksi Diskominfo Jabar, termasuk juga dalam fasilitasi anggaran.

Komitmen kuat dari Gubernur, DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Diskominfo, dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap konsisten menjalankan amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membuat KPID Jabar tetap kokoh berdiri menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya. Kendati secara teknis peralihan fasilitasi sekretariat KPID Jabar ke Diskominfo bukan tanpa masalah, baik berkurangnya tenaga sekretariat maupun menciutnya jumlah anggaran. Namun, hal itu bukan menjadi halangan besar bagi KPID Jabar untuk komit menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagaimana amanah UU Penyiaran dan P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran).

Memang, ketaatan terhadap amanah peraturan perundangan, terutama yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan sosial masyarakat perlu

pemahaman dan komitmen yang kuat. UU Penyiaran jangan dilihat hanya sebagai aturan, tetapi harus dipahami sebagai benteng bagi makin masifnya “budaya” negatif, terutama yang diimport melalui media massa, salah satunya media penyiaran.

Teori Kultivasi (Gerbner dan Gross, 1976) merupakan salah satu kajian Ilmu Komunikasi yang konsen pada pembuktian dasyatnya pengaruh media penyiaran, terutama televisi, telah mengajarkan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap dampak buruk dari siaran televisi. Kelahiran UU Penyiaran merupakan bukti kewaspadaan masyarakat Indonesia, sehingga KPI dan KPID pun dilahirkan sebagai garda terdepan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Jika UU Penyiaran dipahami hanya sebagai aturan dan KPI-KPID dipandang sebagai produk aturan, maka siapapun akan mudah untuk mengabaikannya. Apalagi Pemerintah yang notabene memiliki aksesibilitas luas dan pemegang otoritas tertinggi atas eksistensi peraturan, bukan persoalan yang sulit untuk mengubah, bahkan menghapuskan aturan. Padahal, tertulis dengan jelas bahwa kelahiran UU Penyiaran bertujuan agar penyiaran diselenggarakan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Tujuan strategis tersebut sejatinya menumbuhkan pemahaman dan komitmen yang tinggi dari semua warga negara untuk mengimplementasikannya sekaligus memberikan dorongan dan dukungan pada KPI-KPID agar lembaga penyiaran tetap on the tract. Penyiaran di Indonesia harus tetap diarahkan pada : a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas SDM; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat,

mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional.

Tujuan dan arah itulah yang harus menjadi komitmen bersama atas kehidupan penyiaran Teori Komitmen dari Porter, et al. (1982) mengajarkan, komitmen tidak hanya menerima bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi atau aturan organisasi itu benar, tetapi harus juga terdapat kesiapan dan kesediaan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan dan mempertahankannya. Dalam konteks ini pun sama, Pemerintah dan warga Negara Indonesia sudah sepakat bahwa nilai-nilai substansial yang terdapat dalam UU Penyiaran itu benar, sehingga sampai saat ini masih berlaku dan diakui. Namun, hal itu tidak cukup jika tidak menjalankannya dan mempertahankannya, bahkan sangat kontrak produktif jika justru melanggarnya.

Oleh karena itu, jika Pemerintah dan seluruh warga Negara Indonesia komit atas nilai-nilai substansial UU Penyiaran untuk menjadi filter pertahanan dari dampak buruk konten isi siaran dan menguatkan dampak baiknya, maka eksistensi fungsi, tugas, dan kewajiban KPI-KPID tidak akan pernah mati. Secara kelembagaan, KPI-KPID dapat dibubarkan, tetapi gelora semangat komitmen atas nilai-nilai UU Penyiaran tidak akan pernah surut.

Literasi media telah menumbuhkan aktivis-aktivis tangguh baik dari kalangan akademisi, LSM, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat strategis lainnya untuk komit membatasi, bahkan melarang konten siaran yang dapat merusak moral dan mental bangsa. Bahkan, sejumlah gerakan sudah didengungkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Semuanya berangkat dari kesadaran atas pemahaman nilai-nilai yang terkandung dari UU Penyiaran. Bahkan, kesadaran pun mulai tumbuh pada sebagian pengelola lembaga penyiaran, sehingga mereka konsisten hanya menyajikan konten siaran yang sehat dan mendidik.

Besok-lusa, mungkin saja UU Penyiaran, termasuk KPI-KPID tidak perlu ada ketika seluruh elemen masyarakat telah memiliki komitmen yang sama untuk hanya menyajikan dan menikmati konten siaran yang sehat dan mendidik. Itulah nilai-nilai yang saat ini tengah diperjuangkan KPI-KPID yang akan tetap hidup semanjang kesadaran akan kebenaran menjadi bagian dari kehidupan manusia. *

D. Berharap pada Revisi UU Penyiaran

Di antara hiruk pikuk “nasib” KPI dan KPID, di antara posisi yang menguatkan, tetapi beberapa realitas juga melemahkan, terdapat secercah harapan perbaikan. Angin surga revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pun menggelinding kendati kejelasan perbaikan “nasib” KPI-KPID pun belum tentu. Memang, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masih ditemukan permasalahan. Penerapan sebagian substansi UU Penyiaran belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Wacana revisi Undang-Undang Penyiaran sebenarnya sudah mencuat sejak 2007. Wacana tersebut dilanjutkan dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan dimasukkan dalam Prolegnas masa kerja DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, hingga selesainya DPR RI masa bhakti 2014-2019 belum juga berhasil direalisasikan.

Secara historis, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang menggantikan UU No. 24 Tahun 1997 dibuat dengan latar belakang kemunculan televisi-televisi lokal dan radio-radio komunitas di Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut bermisi perubahan penyelenggaraan industri penyiaran dari sentralisasi ke desentralisasi. Kelemahan yang paling kentara dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 adalah kewenangan KPI yang kurang “bergigi”, sehingga relasi KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat merenggang. Apalagi ketika lahir Peraturan Pemerintah No. 49-52 Tahun 2009, kelemahan KPI makin kentara.

Revisi Undang-Undang Penyiaran merupakan peluang strategis untuk mereposisi kedudukan KPI sebagai lembaga representasi publik yang sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran bahwa “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewakili aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”.

Kelemahan substansial Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menurut Doly (2015), terdapat dalam beberapa hal. *Pertama* substansi KPI. Pengaturan KPI ada pada BAB III bagian Kedua Pasal 7 sampai 12 menunjukkan, penyiaran tidak diatur oleh pemerintah lagi, tetapi oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU

Penyiaran yaitu KPI. Oleh karena itu, segala sesuatu berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran tidak hanya melibatkan unsur Pemerintah, tetapi juga KPI. Permasalahan yang muncul ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan keberadaan KPI. Hal itu dapat dilihat dengan adanya upaya-upaya melemahkan kewenangan KPI dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan MK nomor 005/PUU-/2003 yang menyebutkan, KPI tidak lagi berhak untuk ikut serta dengan Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah terkait kegiatan penyiaran. KPI pun melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ke Mahkamah Agung (MA)⁶.

Argumentasi KPI melakukan *judicial review* ini dikarenakan ada perbedaan penafsiran substansi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perijinan dalam ketiga peraturan pemerintah tersebut. KPI berargumentasi bahwa ketiga peraturan pemerintah tersebut dinilai melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI menilai bahwa kewenangan yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut seharusnya dimiliki oleh KPI. KPI berpendapat bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan perijinan terhadap penggunaan frekuensi. Akan tetapi untuk kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran berada di tangan KPI.

Permasalahan KPI lainnya, masih adanya perbedaan pendapat mengenai kewenangan KPI. Beberapa pendapat mengatakan, KPI merupakan lembaga negara yang bertugas dalam pengawasan isi siaran saja. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang seharusnya menjadi badan regulator dalam bidang penyiaran. Berbagai pendapat ini kemudian berkembang di masyarakat, dan menyebabkan tidak jelasnya kewenangan KPI. Permasalahan lain yang ada di KPI yaitu terkait dengan hubungan kelembagaan antara KPI Pusat (KPIP) dengan KPI Daerah (KPID).

6 KPI Ajukan Judicial Review 3 PP Penyiaran ke MA, <http://news.detik.com/read/2005/06/20/184946/385220/10/>, diakses 16 Januari 2013

Kedua, permasalahan sistim jaringan tidak berjalan dengan semestinya. Sistem penyiaran yang diatur Undang-Undang Penyiaran yaitu sistem siaran jaringan, LPS Pusat dan LPP Pusat wajib melakukan siaran jaringan dengan lembaga penyiaran yang berada di daerah. Sampai saat ini ketentuan mengenai sistem siaran jaringan belum dilaksanakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya LPS yang melakukan siaran secara nasional.

Ketiga, terkait dengan LPK yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Penyiaran. Selain itu, LPK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Pengaturan LPK belum dapat memberikan jaminan kepada LPK dalam membentuk lembaga penyiaran yang bertujuan memberikan informasi dan pendidikan kepada komunitasnya⁷.

Keempat, dalam Undang-Undang Penyiaran belum jelasnya keberadaan LPP yang saat ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). TVRI dan RRI saat ini mengalami kemunduran baik dari segi jumlah pemirsanya maupun dalam hal isi siarannya. Banyak masyarakat tidak lagi melihat keberadaan TVRI dan RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran di Indonesia. Masyarakat saat ini lebih banyak mendengar atau menonton tayangan yang disiarkan oleh LPS.

Kelima, keberadaan LPS yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 16 – 20 berkaitan dengan status badan hukum yang harus dimiliki LPS, kepemilikan, sumber pembiayaan dan cakupan wilayah siaran. LPS hanya dimiliki beberapa orang yang jelas tidak sesuai dengan pembatasan yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran yaitu keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman konten (*diversity of content*). Akibatnya, konglomerasi media dimungkinkan terjadi karena Undang-Undang tentang Penyiaran tidak mengatur kepemilikan oleh *holding company*.⁸

Sebenarnya, beberapa bulan setelah dilantik, DPR RI periode 2009-2014 langsung menyusun rencana program legislasi lima tahunan. Rencana itu, lazim disebut program legislasi nasional (prolegnas), berisi

7 KPI Usul JRKI untuk Komisi 1 DPR RI mengenai Revisi UU No. 32 Tahun 2002, <http://jrkbanken.blogspot.com/>, diakses 16 Januari 2013

8 Teguh Santosa dkk, Komisi I, Senjata-Satelit-Diplomasi, Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2009, hal. 237

daftar RUU yang diprioritaskan akan dibahas, salah satunya RUU revisi atas Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU itu bahkan menjadi satu dari sekitar enam puluhan RUU yang diprioritaskan tahun 2010. Namun, hingga akhir masa jabatan DPR RI Periode 2009-2014 tidak juga dibahas. Pada masa DPR RI Periode 2014 - 2019 pun, revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masuk prolegnas, tetapi lagi-lagi sampai akhir jabatannya, RUU Penyiaran tidak tersentuh.

KPI (Pusat) pun melalui Siaran Pers Nomor 04/KPI/SP/07/10, menyikapi rencana revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2010 membentuk tim khusus untuk mengawal Revisi Undang-Undang Penyiaran yang anggotanya merepresentasikan bidang kelembagaan, isi siaran, dan perizinan yang berasal dari perwakilan masing-masing KPI Daerah.

Sejumlah kelompok masyarakat pun sempat memberikan catatan terkait dengan revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, untuk menjadi bahan pertimbangan, di antaranya: Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 mengoreksi Undang-Undang No. 24 tahun 1997 yang dianggap otoriter karena antara lain pada Pasal 7 mengatur, “Penyiaran dikuasai oleh negara, yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”. Oleh karena itu, desain Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tidak meletakkan lagi dominasi pemerintah dalam pengelolaan penyiaran, tetapi membentuk lembaga baru yang disebut KPI, sehingga pengaturan dan pengelolaan penyiaran dilakukan bersama antara KPI dengan pemerintah. Yang ideal DPR mengembalikan lagi gagasan memberi kewenangan kepada KPI dalam membuat aturan pelaksana undang-undang.

Institusi penyiaran publik dan komunitas harus terus diperkuat eksistensinya. Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI yang sampai saat ini hanya mengandalkan APBN, harus difasilitasi agar bisa menghimpun dana masyarakat dan suatu saat lepas dari ketergantungan pada pemerintah. Penyiaran publik harus mandiri dalam melayani masyarakat, tanpa intervensi terselubung maupun terang-terangan dari pemerintah melalui instrumen anggaran. Sementara penyiaran komunitas harus dijamin penyediaan frekuensi yang memadai dengan prosedur

aplikasi yang lebih sederhana.

Pengaturan wilayah jangkauan siaran harus lebih dipertegas agar masyarakat di masing-masing wilayah mempunyai keleluasaan untuk mengelola penyiaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, terutama dikaitkan dengan pembangunan karakter dan jati diri masing-masing lingkungan wilayah. Jangan sampai komunitas masyarakat di suatu wilayah kesulitan mendapatkan alokasi frekuensi karena telah dikuasai pemodal lintas wilayah yang lebih besar kemampuannya.

Masalah kepemilikan lembaga penyiaran harus lebih didetailkan batas-batasnya. Praktik konglomerasi lembaga penyiaran, khususnya televisi harus ril dibatasi. Ketika para pengelola lembaga penyiaran gagal memenuhi amanah publik mengelola frekuensi yang sangat terbatas, tidak pernah ada proses transparan untuk menyerahkan pada pihak lain yang lebih kapabel.

Memasuki DPR RI Periode 2019-2024, Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama Pemerintah menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan sebanyak 248 RUU masuk Prolegnas 2020-2024 yang terdiri dari usulan DPR, Pemerintah, dan DPD RI.

Kelima puluh RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020 yaitu: 1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber **2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran** 3. RUU tentang Pertanahan 4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 5. RUU tentang RKHUP 6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan 7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan 10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 16. RUU tentang Perlindungan dan

Bantuan Sosial 17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata 21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 23. RUU tentang Penyadapan 24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila 26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional 29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law) 30. RUU tentang Kefarmasian 31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua 33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional 36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 38. RUU tentang Ketahanan Keluarga 39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 40. RUU tentang Profesi Psikologi 41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) 43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian 44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi 45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law) 49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 50. RUU tentang Daerah Kepulauan Baca juga artikel terkait PROLEGNAS 2020 atau tulisan menarik lainnya

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid (2020) mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas Prolegnas 2020. Menurutnya, sejak periode sebelumnya, DPR memang

menginginkan adanya perbaikan dalam hal penyiaran, di antaranya terkait dengan digitalisasi penyiaran. DPR pun menyadari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginginkan agar RUU ini segera diselesaikan.

Kementerian Kominfo mempunyai sejumlah usulan untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR dalam RUU Penyiaran. Drafnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak DPR RI periode 2019-2024. Berikut 10 poin usulan dimaksud:

1. Digitalisasi penyiaran televisi terestrial dan penetapan batas akhir penggunaan teknologi analog (*Analog Switched off*);
2. Penguatan LPP TVRI dan LPP RRI dengan pembentukan Radio Televisi Republik Indonesia;
3. Kewenangan atributif antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia;
4. Penguatan Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia;
5. PNBP Penyelenggaraan Penyiaran dan Kewajiban Pelayanan Universal dalam bentuk % pendapatan kotor (*gross revenue*);
6. Simplifikasi klasifikasi perizinan jasa penyiaran berdasarkan referensi internasional;
7. Penyebarluasan informasi penting dari sumber resmi pemerintah;
8. Pemanfaatan kemajuan teknologi bidang penyiaran;
9. Penyediaan akses penyiaran untuk keperluan khalayak difabel; dan
10. Penyelenggaraan penyiaran dalam keadaan *force majeure*.

Yang sempat menghangat dan menjadi viral di media sosial adalah KPI mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran agar dapat mengawasi konten pada platform streaming seperti Youtube dan Netflix. KPI selama ini memang hanya berwenang mengawasi sekaligus mengatur konten media konvensional seperti TV dan radio. Pengawasan pada platform streaming seperti *Youtube* dan *Netflix* dinilai perlu, sebab banyak di antara milenial dan Gen Z yang telah beralih dari menonton acara TV.

Selain, pengawasan *platform streaming*, KPI juga mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi evaluasi sistem rating acara TV. Jika selama ini rating acara TV hanya ditentukan oleh jumlah penonton, KPI ingin agar ada penilaian konten sebagai komponen *rating*. Jika suatu acara digemari penonton namun isinya oleh KPI dinilai tidak

ramah anak, maka *rating*-nya dapat diturunkan, kuota iklannya pun ikut terpengkas. Aturan ini diharapkan dapat mendorong rumah-rumah produksi dan stasiun TV untuk membuat acara yang lebih berkualitas.

Kendati hal tersebut sempat mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Agustus 2019, lebih dari 114 ribu orang menandatangani petisi online untuk menolak Pengawasan KPI pada platform streaming video. Setidaknya, ada empat alasan gagasan petisi tersebut. *Pertama*, wewenang KPI hanya sebatas aturan penyiaran televisi dan radio dalam jangkauan frekuensi, sehingga tak masuk konten media digital. *Kedua*, KPI tidak memiliki kewenangan sensor, bahkan sampai pelarangan. *Ketiga*, *Netflix* dan *YouTube* adalah alternatif tontonan masyarakat karena kinerja buruk KPI dalam pengawasan tayangan televisi dan radio. *Terakhir*, *Netflix* adalah layanan berbayar, berbeda dengan TV swasta yang menggunakan frekuensi publik.

Apapun hirup pikuk yang terjadi dalam perjalanan yang sangat panjang, tentu semua masyarakat Indonesia sangat berharap lahirnya undang-undang baru yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat lebih baik dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kelompok tertentu.^{***}

BAB III

EKSISTENSI KPID JAWA BARAT

Amanat dari Undang-Undang Penyiaran salah satunya adalah dibentuknya lembaga independent yang menjadi representasi publik serta mempunyai tugas dan kewenangan yang komprehensif menangani masalah penyiaran di Indonesia. Dalam konteks mengemban amanah publik melalui undang-undang dan untuk menangani masalah penyiaran di Jawa Barat, maka lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dua tahun setelah lahirnya Undang-Undang Penyiaran atau tepatnya tahun 2004.

Sejak tahun 2004, KPID Jawa Barat mengalami pengembaraan yang panjang. Tercatat tiga masa kepemimpinan KPID Jawa Barat sejak tahun 2004 sampai tahun 2015, yakni, kepemimpinan Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si., Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiaty, M.S., dan Hj. Neneng Athiatul Faiziyah, M.Ikom.

Sebelum ditetapkan keanggotaan KPID Jawa Barat, ada beberapa kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengawalinya, yakni: Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487.05/Kep.75-Um/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Tim Pelaksana Persiapan Pembentukan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat; Surat DPRD Provinsi Jawa Barat No. 487/296.set DPRD tanggal 7 Juli 2004 tentang Penetapan Administratif Calon Terpilih Anggota KPID Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 22 September 2004 secara administratif berhasil ditetapkan 7 (tujuh) anggota KPID Jawa Barat yang pertama kali dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.979-Um/2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2004-2007. Periode ke-1 Tahun 2004-2007, dengan Anggota Komisioner: Dr. Atie Rachmatie, M.Si., Dadang Rahmat Hidayat, S.H, S.Sos, M.Si., Maman Wijaya, S.Pd., M.Pd., Drs. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Drs. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si., Muhammad Zen Al-Faqih, S. S., M.Si., dan Drs. Suhardi, M.Si. Kemudian

keluar Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.497-Um/2007 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.487/Kep.979-Um/2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2004-2007, sehingga masa bhakti periode pertama ini diperpanjang sampai tahun 2008.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.356-HumasProtum/2009 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat masa Jabatan tahun 2009-2012 dilantiklah nama-nama berikut sebagai komisioner KPID Jabar Periode 2009-2012 sebagai berikut: Dr. Atie Rachmatie, M.Si., Dadang Rahmat Hidayat, S.H, S.Sos, M.Si., Drs. A. S. Haris Sumadiria, M.Si., Drs. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Drs. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si., Muhammad Zen Al-Faqih, S. S., M.Si., Nursyawal, S.Sos.

Di tengah perjalanan masa bhakti Dadang Rahmat Hidayat, SH, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua KPID Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi Anggota KPI Pusat sehingga masuk PAW (Pengganti Antar Waktu) masuklah Drs. Suhardi, M.Si. Adapun Ketua KPID Provinsi Jawa Barat mulai bulan Juli 2010 dijabat oleh Dr. Atie Rachmatie, M.Si, dengan anggota Dr. Atie Rachmatie, M.Si. Drs. Suhardi, M.Si., Drs. A. S. Haris Sumadiria, M.Si., Drs. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., Drs. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si., Muhammad Zen Al-Faqih, S. S., M.Si., dan Nursyawal, S.Sos.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 487/Kep.298-KPID/2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2012-2015 terjadi pergantian Komisioner KPID Jawa Barat untuk periode ke-3 tahun 2012-2015, yakni: Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag, M.Ikom., Nursyawal, S.Sos., Abdul Kholik, S.Th. I, MA., Ir. Irianto Edi Pramono, Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., Drs. A. S. Haris Sumadiria, M.Si., dan Fitriadi.

Jabatan mereka berakhir dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.250-KPID/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2015-2018. KPID Jawa Barat periode 2015-2018 terbentuk melalui proses seleksi yang panjang setelah melalui Tim Seleksi sampai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari 178 calon, terpilih 7 anggota KPID dengan nama-nama: Dr. Aep Wahyudin, M.Si., Dr. Dedeh Fardiah, M.Si., Dr. Mahi M. Hikmat,

M.Si., Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag., M.Ikom., Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., Irianto Edi Pramono, Ir., dan M. Saefurrohman, S.S.

Visi KPID Provinsi Jawa Barat 2015-2018 adalah terciptanya sistem penyiaran di Jawa Barat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat serta mendorong majunya lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk mendukung terciptanya sistem penyiaran nasional yang sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002.

Sementara itu, Misi KPID Provinsi Jawa Barat 2015-2018 sebagai berikut:

- a. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Jawa Barat yang adil, merata, seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antar wilayah di daerah Jawa Barat, juga antara daerah Jawa Barat dengan daerah lainnya di Indonesia.
- b. Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi, khasanah lokalitas, serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Jawa Barat.
- c. Mendorong lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk menjadi lembaga-lembaga yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi pada skala nasional maupun global.
- d. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
- e. Menjadikan KPID Jawa Barat sebagai perwujudan peran serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis dengan masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan penyiaran di Jawa Barat yang demokratis dan bertanggung jawab.

KPID Provinsi Jawa Barat memiliki landasan filosofis dan etika yang diemban yang terdiri atas:

- a. Amanah : berupaya menjalankan tugas yang sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan serta akuntabel
- b. Sinergis : menerima dan menghargai keberadaan institusi lain serta siap bekerjasama
- c. Akseptabel : mengakui dan menerima adanya perbedaan dengan

upaya tetap eksis di dalam keberagaman

- d. Etis : menegakkan sikap dan moral professional memiliki integritas dan kebebasan bersikap
- e. Progresif: menaruh perhatian serta mau terlibat dalam perubahan-perubahan yang sedang terjadi dengan didasari oleh pemikiran dan sikap tindak yang terbuka dan fleksibel
- f. Demokratis : menumbuhkan semangat silih asah, asih, asuh dengan orientasi untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan

Untuk mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, serta wewenangnya, KPID Jawa Barat 2015-2018 membagi struktur pelaksana tupoksi dalam tiga bidang, yakni: Bidang Kelembagaan yang konsen pada pembinaan Sumber Daya Internal dan literasi media untuk masyarakat eksternal, Bidang Infrastruktur yang konsen pada pelayanan perijinan lembaga penyiaran, dan Bidang Pengawasan Isi Siaran yang konsen pada pemantauan, penerimaan pengaduan dari masyarakat, pemberian sanksi dan apresiasi terhadap konten siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran.

Hasil Rapat Pleno Pertama KPID Jawa Barat, tanggal 19 Februari 2015 terpilih sebagai Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018: Dr. Dedeh Fardiah, M.Si., Wakil Ketua: Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran: Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si., didampingi Komisioner Dr. Aep Wahyudin, M.Si., Koordinator Kelembagaan: Neneng Athiatul Faiziyah, M.Ikom., didampingi Komisioner Irianto Edi Pramono, Ir., dan Dr. Dedeh Fardiah, M.Si. (merangkap Ketua), Koordinator Bidang Infrastruktur: M. Saefurrohman, S.S., didampingi Komisioner Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., merangkap wakil ketua.

Menurut Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018, Dedeh Fardiah, pembagian struktur juga merupakan salah satu strategi KPID Jawa Barat dalam optimalisasi tugas, pokok, fungsi, dan wewenang. Dengan konsennya bidang Kelembagaan pada Sumber Daya Internal diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik pada masyarakat maupun pada lembaga penyiaran. Termasuk ketika Bidang Kelembagaan pun memberikan literasi media kepada masyarakat diharapkan terjadi proses pencerdasan pada pemikiran masyarakat, sehingga mereka selektif memilih tayangan televisi atau siaran radio,

termasuk mereka pun memiliki keberanian untuk mengadakan indikasi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran ke KPID Jawa Barat.

Keberadaan Bidang Insfrastruktur pun diharapkan memberikan penguatan pada eksistensi lembaga penyiaran, sehingga posisi mereka legal, baik di mata pemerintah maupun publik. Lembaga penyiaran dimotivasi untuk bersaing secara sehat dan seimbang, sehingga keberadaan mereka diposisikan secara proporsional. Dengan seperti itu, diharapkan cita-cita dan tujuan Undang-Undang Penyiaran yang ingin menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran betul-betul akan terwujud.

Sementara itu, keberadaan Bidang Pengawasan Isi Siaran diharapkan terwujudnya cita-cita dan tujuan Undang-Undang Penyiaran, yakni, memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu diwujudkan program pengawasan terhadap konten siaran, memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada publik untuk mengadakan konten siaran yang tidak sesuai dengan etika dan norma, serta memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang betul-betul memiliki komitmen dalam bentuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

Yang menjadi prioritas mendapat perhatian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang juga merupakan konten utama yang harus diawasi oleh KPI/KPID adalah tentang Pelaksanaan Siaran pada Bab IV Pasal 36:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan mamfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kuranya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan

kepentingan golongan tertentu.

5. Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang atau; c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar-golongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Walaupun tidak menjelaskan secara rinci, Undang-Undang Penyiaran pun memberikan petunjuk kepada KPI/KPID untuk membentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagaimana isi Pasal 48. Dalam ayat (4)-nya dipaparkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran sekurang-kurangnya harus berkaitan dengan: a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b. Rasa hormat terhadap hal pribadi; c. Kesopanan dan kesusilaan; d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. Penyiaran program dalam bahasa asing; h. Ketepatan dan kenetralan program berita; i. Siaran langsung; serta j. Siaran iklan.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia pun membuat Standar Program Siaran (SPS) yakni ketentuan yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sesuai dengan amanah Pasal 4 Ayat (2) pada huruf c-nya bahwa KPI/KPID pun memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.

Untuk menjalankan amanah itu, Bidang Pengawasan Isi Siaran

KPID Jawa Barat memiliki Program Kerja Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam menjalankan tugasnya menggunakan empat metode.

Pertama, melakukan perekaman realtime radio dan televisi SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) dan Sistem Penyiaran Lokal di Kota Bandung Raya dan sekitarnya selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kegiatan ini disebut, “pemantauan”. Namun, sejak tahun 2015 kegiatan pemantauan terhadap siaran radio tidak optimal karena peralatan yang ada tidak dapat digunakan (rusak). Pemantauan yang dilakukan hanya terhadap televisi, baik televisi lokal maupun televisi berjaringan yang tertangkap di wilayah Bandung dengan tenaga pemantau tiga orang (merangkap tenaga asisten komisioner) dan dibantu oleh satu tenaga administrasi.

Kedua, melakukan perekaman realtime radio dan televisi di beberapa kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat secara acak menggunakan alat rekam sederhana atau meminta hasil rekaman dalam jangka waktu tertentu (tiga hari dalam sebulan) kepada penyelenggara penyiaran di daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan ini disebut dengan “penertiban”. Kegiatan penertiban juga merupakan sarana diskusi di antara KPID Jawa Barat, khususnya Bidang Pengawasan Isi Siaran dengan lembaga penyiaran yang berada di kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Ketiga, KPID Jawa Barat menerima pengaduan dari masyarakat terkait program acara yang ditayangkan dan/atau disiarkan radio, baik televisi dan radio lokal yang ada di Bandung dan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat maupun televisi dan radio yang berjaringan (SSJ). Pengaduan dapat diterima KPID Jawa Barat melalui sms, telepon, datang langsung, email, surat tertulis langsung, kotak saran, melalui kegiatan pameran, dan kegiatan lainnya melalui nomor pengaduan 081573107000.

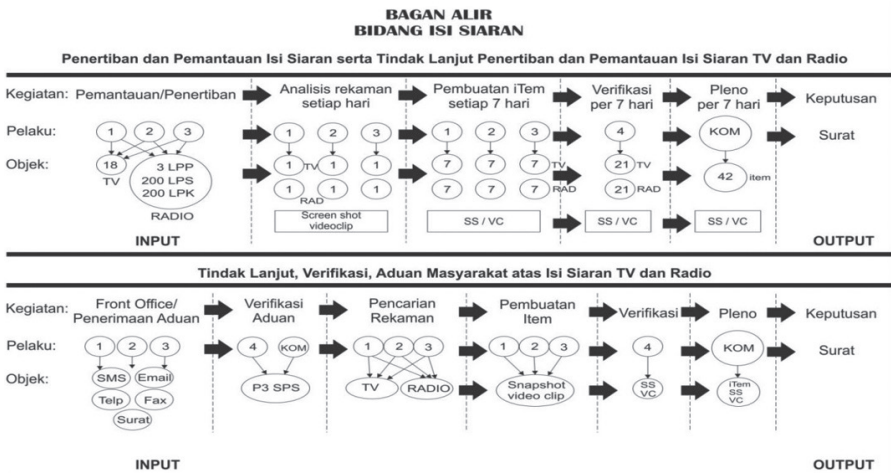
Keempat, KPID Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap prestasi lembaga penyiaran yang menjalankan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran–Standar Program Siaran dengan baik dan benar, dalam bentuk kegiatan Penganugerahan KPID Award.

Hasil pemantauan, penertiban, dan pengaduan masyarakat tersebut dianalisis oleh tiga orang tenaga pemantau untuk dipilah dalam kategori materi yang diindikasikan melakukan pelanggaran dan dituangkan dalam dokumen Item (Indikasi Temuan). Selanjutnya, Item tersebut diverifikasi oleh komisioner bidang isi siaran sebelum dibawa ke Rapat Pleno Komisioner KPID Jawa Barat.

Sidang Pleno pertama akan memutuskan, hasil analisis yang tertuang dalam surat indikasi temuan telah memenuhi unsur-unsur materiil pelanggaran aturan tentang isi siaran yang terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran dan P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI dan memiliki bukti-bukti yang cukup. Jika dianggap kurang, maka KPID Jabar akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat ahli (RDPA) untuk memperoleh pandangan terhadap kasus yang ditemukan, atau rapat klarifikasi dengan pihak yang diadukan yaitu lembaga penyiaran bersangkutan untuk memperoleh bukti-bukti tambahan.

Selanjutnya, KPID Jabar akan menggelar sidang Rapat Pleno kedua untuk membahas hasil RDPA dan Klarifikasi dan menghasilkan keputusan apakah temuan tersebut terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah KPID Jabar akan memberikan sanksi atau tidak atas pelanggaran tersebut.

Keputusan Pleno dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno, sedangkan keputusan sanksi, baik dalam bentuk “himbauan”, Teguran 1, Teguran 2, atau penghentian sementara program acara dibuat dalam bentuk Surat Sanksi yang ditandatangani Ketua KPID Jawa Barat untuk disampaikan ke lembaga penyiaran yang melanggar serta ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jawa Barat.



Gambar 2.1
Tahapan Penanganan Hasil Pengawasan Isi Siaran (Sumber: KPID Jabar 2015)

Namun, sesuai kesepakatan Rakornas KPI dan KPID seluruh Indonesia pada Bulan April 2015, penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang stasiun siarannya berada di Jakarta atau yang selama ini dikenal sebagai lembaga penyiaran nasional, menjadi kewenangan KPI Pusat. KPID dapat menjatuhkan sanksi dalam bentuk rekomendasi sanksi ke KPID Pusat, KPI Pusatlah yang mengeksekusi sanksinya.

Untuk menjalankan tugas pemantauan, penertiban dan penerimaan aduan dari masyarakat, KPID Jawa Barat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari SOP pemantauan isi siaran, SOP penertiban isi siaran, dan SOP penerimaan pengaduan isi siaran. Indeks kinerja dengan menggunakan metode pemantauan dan penertiban isi siaran dilakukan terhadap lembaga penyiaran dengan sebaran dalam tiga tahun (2015-2016-2017) sebagai berikut.

Tabel 2.1
Indeks Kinerja Pemantauan & Penertiban
Bidang Isi Siaran (2015-2016-2017)

Jumlah Lembaga Penyiaran Objek Pemantauan			Hasil Pemantauan						Kecenderungan Indeks Kinerja
2015	2016	2017	2015		2016		2017		Meningkat
			Item	Sanksi	Item	Sanksi	Item	Sanksi	
293	525	531	1.361	171	958	347	1.849	594	

Sumber : Laporan KPID Jawa Barat 2017

Tabel di atas, dalam hal jumlah objek pemantauan Bidang Isi Siaran, yakni lembaga penyiaran mengalami pelonjakan yang luar biasa dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan juga bertambah pada tahun 2016. Hal itu mengisyaratkan bahwa beban kerja bidang isi siaran bertambah berat; makin banyak jumlah lembaga penyiaran yang harus diawasi. Hal itu berdampak pada meningkatnya jumlah temuan hasil pemantauan yang berupa item (indikasi temuan) sampai ke produk putusan berupa sanksi. Tahun 2015 item berjumlah 1.361 dengan sanksi 171 dan tahun 2016 menjadi 1.849 dengan jumlah sanksi 594.

Dari aspek kinerja jumlah item meningkat dalam dua tahun dengan indeks keberhasilan meningkat 35%. Sanksi yang dihasilkan pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga mencapai hampir 250%. Dalam hal ini dapat dianggap keberhasilan karena dari beberapa indikator yang dapat mendorong kenaikan indeks, tahun 2016

jika dibandingkan dengan tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang besar, baik sumber daya manusia / tenaga pemantau maupun teknologi pemantauan. Bahkan, beberapa metode yang digunakan pada tahun 2015, seperti program penertiban, tetapi diadopsi di tahun 2015 dan 2016 dengan beberapa perbaikan, misalnya, dengan dibuatkan Standar Layanan Operasional (SOP).

Karena berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan dana perjalanan dinas, sehingga metode penertiban pada tahun 2015 belum dapat dilakukan pada semua lembaga penyiaran yang ada di semua kabupaten/kota atau baru 23 kabupaten/kota dengan jumlah kegiatan penertiban 1 kali per kabupaten/kota per tahun. Namun tahun 2016, seluruh kabupaten/kota dilakukan penertiban lembaga penyiaran dengan jumlah kegiatan 2 kali pe kabupaten/kota per tahun. Data kegiatan penertiban.

Tabel 2.2
Indeks Kegiatan Penertiban
Bidang Isi Siaran (2015-2016-2017)

2015		2016		2017	
Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Kegiatan Per Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Kegiatan Per Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Kegiatan Per Kab/Kota
23	1	23	1	27	2

Sumber : Laporan KPID Jawa Barat 2017

Tabel di atas pun menggambarkan terjadi peningkatan pembinaan dan penguatan lembaga penyiaran yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat, terutama jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan tahun 2016, baik dari jumlah kunjungan ke kabupaten/kota maupun dari intensitas pertemuan dengan lembaga penyiaran, bahkan terjadi lebih dari dua kali lipat. Hal itu tentu diiringi dengan pengayaan konten materi isi siaran yang disampaikan kepada lembaga penyiaran.

Hasil metode pengaduan masyarakat terhadap KPID Jawa Barat belum signifikan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Hal itu bisa saja terjadi karena masyarakat Jawa Barat sudah melek media atau sebaliknya mereka belum memiliki literasi media penyiaran yang memadai. Oleh karena itu, pelayanan terhadap pengaduan ke KPID Jawa Barat dapat tertangani dengan optimal atau kecenderungan indeks

pelayanan pengaduan terus membaik.

Tabel 2.3
Indeks Layanan Pengaduan Masyarakat
Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat (2015-2016-2017)

2015		2016		2017	
Jumlah Aduan	Sanksi	Jumlah Aduan	Sanksi	Jumlah Aduan	Sanksi
136	96	317	313	391	384

Sumber : Laporan KPID Jawa Barat 2017

Mencermati data pengaduan masyarakat terhadap konten isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend naik dari 139 menjadi 317 dan tahun 2016 pengaduan 391. Hal itu dapat diasumsikan bahwa upaya KPID Jawa Barat dapat menyosialisasikan tugas pokok dan fungsinya mengalami keberhasilan, dengan indeks keberhasilannya yang signifikan rata-rata di atas 70%. Bahkan, dari tahun 2014 masa KPID Jawa Barat Periode 2011-2014 ke Periode 2015-2018 melonjak mencapai 132% kenaikannya.

Begitu pun dalam penyelesaian menjadi keputusan sanksi, tahun 2015 penyelesaian sanksi 98% dan tahun 2016 pun pengaduan dapat diselesaikan 98%. Indeks keberhasilan dalam menyelesaikan pengaduan yang tinggi karena kebijakan yang dilakukan bidang isi siaran adalah menggunakan metode jemput bola. Pengaduan masyarakat banyak yang mentah, tetapi dimatangkan oleh bidang isi siaran dengan mencari bukti-bukti yang konkret yang memungkinkan setiap laporan dapat dibawa ke meja pleno dan mendapatkan putusan yang proporsional.

Tahun 2018, KPID Jawa Barat mendapatkan suport Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pemantau murni yang berjumlah empat orang. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 Bidang Pengawasan Isi Siaran selain dihuni oleh dua komisioner, juga didukung oleh SDM dua orang asisten komisioner dan empat orang tenaga pemantau. Bahkan, pada tahun itu pula lahir dua strategi baru dalam pengawasan konten isi siaran, yakni:

1. Memberdayakan mahasiswa yang magang yang ditempatkan sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemantauan konten siaran yang ada di Jawa Barat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya animo mahasiswa untuk magang di KPID Jawa Barat dalam koordinasi

Bidang Kelembagaan. Dalam setiap bulan minimal 20 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi magang di KPID Jawa Barat dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Keberadaan mahasiswa magang dijadikan peluang untuk memperkuat pengawasan konten siaran, terutama pengawasan konten siaran radio yang ada di Bandung Raya dan sekitarnya.

2. Melahirkan program baru, yakni: Program Fasilitasi Masyarakat Peduli Penyiaran yang melahirkan tenaga pemantau sukarela dari kalangan generasi muda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Mereka direkrut secara sukarela dan dididik sehingga memiliki kompetensi dalam memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Merekalah yang sehari-hari menjadi kepanjangan tangan KPID Jawa Barat dalam melakukan pengawasan isi siaran pada lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten/Kota. Selama ini, karena wilayah yang luas dan lembaga penyiaran yang terbanyak, sedangkan jumlah SDM dan teknologi pemantauan sangat terbatas, KPID Jawa Barat baru dapat melakukan pemantauan setiap hari (24 jam) pada lembaga penyiaran SSJ dan Stasiun Siaran Lokal yang berada di Bandung Raya dan sekitarnya. Dengan adanya tenaga pemantau sukarelawan, maka lembaga penyiaran di luar Bandung Raya terpantau. Walaupun belum seluruhnya karena tenaga pemantau sukarelawannya pun sampai tahun 2019 baru terbentuk 150 orang.

Dampak dari bantuan mahasiswa yang magang di KPID Jawa Barat dan lahirnya para pemantau sukarelawan yang terlatih di daerah-daerah adalah meningkatnya produktivitas hasil pengawasan KPID Jawa Barat terhadap konten siaran pada lembaga penyiaran SSJ dan lembaga penyiaran lokal yang ada di Jawa Barat.

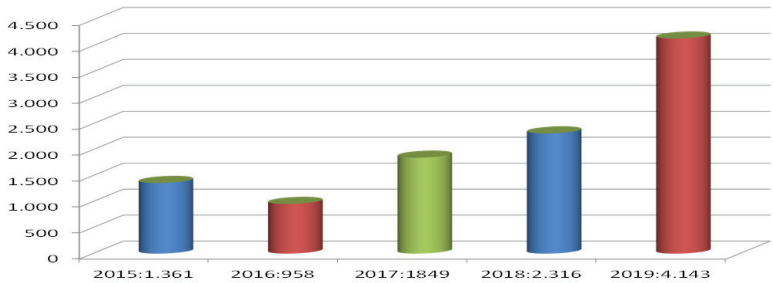
Tabel 2.4
Indeks Kinerja Pemantauan & Penertiban
Bidang Isi Siaran (2015-2019)

Jumlah Lembaga Penyiaran Objek Pemantauan					Hasil Pemantauan										Kecenderungan Indeks Kinerja
2015	2016	2017	2018	2019	2015		2016		2017		2018		2019		Meningkat Tajam
					Item	Sanksi	Item	Sanksi	Item	Sanksi	Item	Sanksi	Item	Sanksi	
293	525	531	517	523	1.361	171	958	347	1.849	594	2.316	1.899	4.143	2.968	

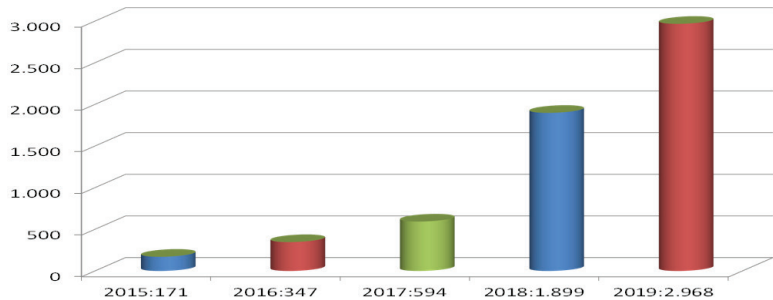
Sumber : KPID Jawa Barat 2019

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut tergambar bahwa produktivitas Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat dalam lima tahun terus meningkat, bahkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami pelonjakan. Misalnya, dalam hal produktivitas indikasi temuan terjadi penurunan dari 2015-2016 sebesar 29%, tetapi dari tahun 2016-2017 meningkat 93%. Tahun 2017-2018 naik sebesar 25% dan dari tahun 2018-2019 melonjak naik 78%. Namun, sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran konstan naik dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 hingga 2019 dengan angka kenaikan sebagai berikut: tahun 2015-2016 naik 10%, tahun 2016-2017 naik 71%, tahun 2017-2018 melonjak naik 2019%, dan tahun 2018-2019 melonjak naik 56%.

Gambar 2.1
Perkembangan Indikasi Temuan Pelanggaran Isi Siaran
KPID Jawa Barat 2015-2019



Gambar 2.2
Perkembangan Putusan Sanksi Pelanggaran Isi Siaran
KPID Jawa Barat 2015-2019



Pada tahun 2018 juga, KPID Jawa Barat sempat mendunia. Salah satu produk kebijakannya dalam bentuk surat edaran yang viral sampai ke manca negara, bahkan mendapat twit langsung dari penyanyi dunia

Bruno Mars, penyanyi-penulis lagu, multi-instrumentalis, produser rekaman, dan penari berkebangsaan Amerika Serikat karena salah satu lagunya dibatasi disiarkan di radio dan ditayangkan di televisi Jawa Barat.

Surat Edaran Nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 tentang Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris. Terdapat 17 lagu berbahasa Inggris tersebut diperbolehkan disiarkan dan/atau ditayangkan di lembaga penyiaran pada pukul 22.00 – 03.00 Wib. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu berbahasa Inggris yang berjudul sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayang pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat dalam klasifikasi waktu Dewasa (D): mulai pukul 22.00 Wib sampai pukul 03.00 WIB.

Tabel 2.5

Daftar Judul Lagu Berbahasa Inggris yang Dibatasi
Disiarkan dan/atau Ditayangkan di Radio dan/atau Televisi di Wilayah Layanan Jawa Barat

No	Judul Lagu	Dipopulerkan	Klasifikasi
1	Dusk Till Dawn	Zayn Malik	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
2	Sangria Wine	Camila Cabello ft Pharrell W	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
3	Mr. Brightside	The Killers	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
4	Let Me	Zayn Malik	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
5	Love Me Harder	Ariana Grande	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
6	Plot Twist	Marc E.assy	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
7	Shape of You	Ed Sheeran	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
8	Overdose	Chris Brown ft Agnez Mo	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
9	Makes Me Wonder	Maroon 5	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
10	That's What I Like	Bruno Mars	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
11	Fuck it I Don't Want You Back	Eamon	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
12	Bad Things	Camila Cabello ft Machine	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
13	Versace On The Floor	Bruno Mars	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
14	Midsummer Madness	88rising	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)

15	Wild Thoughts	DJ Khaled ft Rihanna	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
16	Till it Hurts	Yellow Claw	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)
17	Your Song	Rita Ora	Dewasa (Pkl 22.00-03.00 Wib)

Sumber : SE KPID Jabar 2018

Kegiatan lainnya dari Bidang Pengawasan Isi Siaran, juga melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas pembinaan lembaga penyiaran yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada Lembaga Penyiaran tentang Ketentuan Isi Siaran Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS Tahun 2012;
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Teknik Menyusun dan Membuat Program Siaran sesuai Prinsip-Prinsip Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS Tahun 2012;
3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Teknik Menyusun dan Membuat Program Siaran Berita sesuai Prinsip-Prinsip Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS Tahun 2012.

Tabel 2.6
Program Kegiatan Bidang Isi Siaran
Pembinaan dan Penguatan Lembaga Penyiaran

2015			2016			2017			2018			2019		
WS	FGD	RDPA	WS	FGD	RDPA	WS	FGD	RDPA	WS	FGD	RDPA	WS	FGD	RDPA
2	2	3	4	5	2	3	5	1	4	2	1	2	2	0

Sumber : KPID Jawa Barat 2017

Ket : WS : Workshop, FGD : Focus Group Discussion, RDPA: Rapat Dengar Pendapat Ahli

BAB IV

PROBLEMATIKA PENYIARAN

Tak surut dirundung masalah, begitu nampaknya peribaratannya yang cocok untuk lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Namun dalam konteks ini, bukan hanya lembaga penyiaran yang dirundung masalah, tetapi juga yang lebih urgen adalah lembaga penyiaran yang menyebabkan masalah; sejumlah konten yang disiarkan lembaga penyiaran bernuansa tidak mendidik pada khalayak, terutama khalayak anak-anak dan remaja.

Realitas itu memang sudah diprediksi dan diwaspadai oleh semua pihak, termasuk Pemerintah. Dalam banyak teori tentang media massa, sebagian besar menggambarkan pengaruh luar biasa dari konten media massa terhadap khalayak, termasuk konten siaran yang disajikan lembaga penyiaran, dengan audio visualnya mampu menyirap khalayak, sehingga dapat mengubah pikiran, sikap, dan perilaku khalayak.

Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan di daerah provinsi membentuk KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). Lembaga yang mandiri dan independen ini memiliki tugas utama mengawasi konten siaran, menerima aduan masyarakat atas konten siaran yang tidak etis, memberikan sanksi pada lembaga penyiaran pelanggar, dan memberikan apresiasi pada lembaga penyiaran yang berprestasi.

Selama penulis di KPID Jawa Barat (2015-2020), mencatat banyak hal terkait dengan tugas tersebut. Beberapa catatan penting terkait dengan masalah konten siaran yang disiarkan di lembaga penyiaran dipublikasikan lewat media massa, terutama surat kabar. Berikut beberapa tulisan yang dimaksud.

A. Tahun Kekerasan Penyiaran

Kendati tidak ada angka yang menunjukkan secara pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa kasus tindak kekerasan di Indonesia selama

tahun 2015 sangat banyak. Tindak kekerasan menyebar pada berbagai lini kehidupan: keluarga, sekolah-kampus, tempat bekerja, tempat wisata, sampai ke kamar tidur; serta memakan korban dari berbagai kelompok usia: anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia.

Setidaknya, masyarakat dapat mencermati fakta tindak kekerasan sebagaimana tergambar dalam media massa, baik di media cetak maupun di media elektronik, bahkan di media sosial. Media massa merupakan cerminan faktual dari panggung kehidupan. Ketika media massa banyak menyajikan berita tentang tindak kekerasan, itulah fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kendati media massa dapat meng-konstruksi, men-setting, dan mem-framing isi berita, tetapi tidak bisa dan tidak boleh memanipulasi fakta karena media massa tidak sekedar berfungsi informatif, tetapi juga historis. Bahkan Charles Wright menyebutnya sebagai fungsi *surveillance*: pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan.

Pada sisi lain pula, media massa memiliki fungsi mempengaruhi. Segala hal yang merupakan isi media, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pikiran, sikap, dan tindakan khalayak: pembaca bagi media cetak, pendengar bagi radio, dan penonton bagi televisi. Bahkan, Harold D. Laswell dan Wilbur Scram menyebutnya media massa sebagai *the teacher* meneruskan kebiasaan dari generasi ke generasi.

Fungsi itulah yang melahirkan perspektif bahwa media massa pun ikut memberikan andil pada terjadinya tindak kekerasan. Media massa tidak sekedar berkontribusi menyajikan fakta kekerasan, tetapi dapat juga menjadi inspirator bagi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu, boleh jadi satu tindak kekerasan dapat memicu terulangnya tindak kekerasan yang sama dengan kuantitas lebih tinggi jika disajikan oleh media massa.

Laporan Akhir Tahun 2015 KPID Jawa Barat mencatat, salah satu sanksi terbanyak yang dijatuhkan ke televisi adalah karena menayangkan siaran kekerasan, yakni 49 keputusan sanksi yang bersumber dari tayangan berita dan film/sinetron. Keputusan sanksi KPID Jawa Barat itu pun tidak sekedar hasil temuan dengan rujukan dari Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS, tetapi juga dari pengaduan masyarakat. KPID Jawa Barat menerima 372 pengaduan yang 127 pengaduan atau sekitar 35% di antaranya pengaduan terhadap tindak kekerasan yang ditayangkan di

televisi.

Dalam konteks ini, masyarakat pun memiliki pemahaman yang sama akan “bahaya” tayangan tindak kekerasan yang tidak hanya memberikan informasi faktual, tetapi dapat menjadi inspirasi untuk terjadinya tindak kekerasan yang sama. Pengaduan masyarakat pun dapat dipersepsi sebagai bukti penolakan publik terhadap tayangan kekerasan di televisi.

Namun sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dan Undang-Undang HAM, publik pun punya hak untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya informasi tentang peristiwa kekerasan karena hal itu pun dapat memberikan edukasi kewaspadaan bagi khalayak. Dalam konteks inilah pengelola program acara televisi dituntut untuk bersikap dan bertindak arif ketika menyiarkan informasi kekerasan.

Pun tayangan kekerasan yang disajikan melalui program acara non-faktual seperti film dan sinetron yang juga selain tidak kalah besar pengaruhnya terhadap perilaku kekerasan masyarakat juga memberikan kontribusi pada pemenuhan hak hiburan. Oleh karena itu, wajar ketika adegan kekerasan (pemukulan, perkelahian, peperangan dsb.) pada tayangan sejumlah film, bahkan pada film kartun menuai protes. Pecinta film pun harus mendapat perlindungan atas hak hiburannya. Oleh karena itu, hal itu pun perlu sikap arif selain dari pengelola program acara televisi juga dari masyarakat pecinta film. Mereka harus tahu dan paham tayangan kekerasan seperti apa yang layak dan sehat ditonton.

Kearifan dalam pemenuhan hak informasi dan hak hiburan bagi warga negara dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap warga negara dari pengaruh buruk tayangan televisi harus menjadi visi bersama. Pemerintah, pengelola lembaga penyiaran, KPI-KPID, dan masyarakat harus memiliki komitmen ke arah itu dan tidak ada upaya yang hanya mempertimbangkan keuntungan sepihak. Undang-undang mengamankan, spektrum frekuensi radio merupakan ranah publik yang harus dipergunakan untuk kepentingan publik, tidak hanya untuk keuntungan kelompok manapun.

Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran–Standar Program Siaran) merupakan kesepakatan yuridis formal yang harus dipahami dan ditaati bersama. Undang-Undang

Penyiaran dan P3 SPS merupakan kearifan bersama yang tidak hanya bervisi “melarang” sebuah program acara ditayangkan, tetapi juga menghidupkan dan memberikan spirit bagi lahirnya program acara yang lebih kontributif pada keuntungan semua pihak.

Oleh karena itu, KPI-KPID pun tidak hanya diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi yang kemudian memberikan sanksi, tetapi juga memberikan reward terhadap lembaga penyiaran yang memiliki program acara yang berprestasi. Undang-Undang mengamankan, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Dalam konteks inilah, banyaknya tindak kekerasan di masyarakat pada tahun 2015 menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya pada tahun 2016, termasuk tanggung jawab lembaga penyiaran untuk lebih bijak bahwa ada dua sisi yang harus menjadi visi, yakni pemenuhan hak publik dan melindungi keselamatan publik. Semoga tahun 2016 dunia penyiaran menjadi lebih baik. (*Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 4 Januari 2016*)***

Artikel tersebut merupakan catatan penulis atas fakta dan pengamatan terhadap konten siaran yang mengandung unsur kekerasan¹ sepanjang tahun 2015. Secara lengkap, kinerja Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat sepanjang tahun 2015 mencatat bahwa pelanggaran lembaga penyiaran karena menayangkan kekerasan terdapat 69 kasus dari 288 kasus pelanggaran atau sekitar 24%, yang lainnya siaran/tayangan bernuansa seks 19 kasus, pelanggaran etika dan kesopanan 62 kasus, siaran/tayangan mistik atau horor 11 kasus, pelanggaran pada klasifikasi tayangan berdasarkan usia 44 kasus, dan lain-lain 84 kasus.

Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, pada tahun 2015 KPID Jawa Barat mengeluarkan sanksi surat himbauan 74 dan sanksi surat teguran 196. Sementara itu, program acara yang banyak melanggar secara rinci sebagai berikut: Program siaran berita (*news*) dengan jumlah pelanggaran 85, variety show 65, siaran iklan 64, tayangan film 28, imfotainment 17, penayangan lagu 16, sinetron 12, dan tidak menyiarkan/menayangkan

1 Laporan Kinerja KPID Jawa Barat

lagu Indonesia Raya & lagu wajib pada opening dan closing 11 kasus.

Pada tahun 2016, KPID Provinsi Jawa Barat mengeluarkan 1.849 surat sanksi yang ditujukan kepada lembaga penyiaran yang nyata-nyata berdasarkan kajian dan pleno KPID Jawa Barat melanggar Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS. Jumlah tersebut terbagi dalam 328 surat sanksi berupa himbauan, 250 surat sanksi berupa teguran satu, 28 teguran dua, 2 teguran tiga, 10 penghentian program siaran, dan 4 kali melakukan klarifikasi.

Berdasarkan program acara, siaran iklan menempati nomor pertama dengan jumlah pelanggaran 116, disusul imfotainment 103, variety show 101, news 99, sinetron 40, tayangan film 27, tidak menyiarkan/ menayangkan lagu Indonesia Raya & lagu wajib pada *opening* dan *closing* 21, dan 13 lagi pelanggaran penayangan lagu, seperti lirik lagu dangdut atau video clip-nya. Dari jumlah tersebut, 391 kasus merupakan aduan dari masyarakat, baik melalui sms, surat tertulis, datang langsung, telepon, on line, dan kotak pengaduan. Dari 391 pengaduan dari masyarakat 76 di antaranya atau sekitar 20 persen merupakan tayangan kekerasan yang tersebar, terutama dalam program acara film, sinetron, dan siaran berita.

Semenntara itu, pada tahun 2017, KPID Provinsi Jawa Barat memproses 1.103 temuan indikasi pelanggaran dan 102 aduan masyarakat. Dari angka tersebut menghasilkan surat sanksi yang ditujukan kepada lembaga penyiaran yang nyata-nyata berdasarkan kajian dan pleno KPID Jawa Barat melanggar Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS. Jumlah tersebut terbagi dalam 322 surat sanksi berupa teguran, 82 surat sanksi berupa himbauan, 2 penghentian program siaran, 2 kali melakukan klarifikasi, dan sisanya tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan program acara, siaran/tayangan kekerasan menempati nomor kedua dengan jumlah pelanggaran 17,7%. Tempat pertama diduduki siaran klasifikasi dewasa yang ditayangkan pada jam tayang anak 48,5%, disusul siaran bermuatan mistik atau horor 8,3%, siaran klasifikasi dewasa yang ditayangkan pada jam tayang remaja 6,4%, dan lain-lain 28,9%. Berdasarkan jenis program siaran, impotainment berada pada urutan pertama, yakni 23,8%, selanjutnya film 18,9%, (FTV) plus fil layar lebar 15,1%, iklan 16,7%, variety show 11,9%, dan lain-lain 44,9%. Dari jumlah tersebut, 102 kasus merupakan aduan dari masyarakat, baik melalui sms, surat tertulis, datang langsung, telepon, *on line*, dan kotak pengaduan.

B. Televisi dan Wabah Begal

Pengaruh besar televisi terhadap pikiran, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok orang bukan hanya wacana. Ratusan, bahkan ribuan hasil penelitian dan puluhan teori telah membuktikan, pengaruh televisi sangat luar biasa dalam membolak-balikkan warna dunia. Oleh karena itu, wajar jika pergeseran perilaku manusia selalu saja disambung-sambungkan dengan keberadaan televisi.

Pun mewabahnya aksi pembegalan yang masif akhir-akhir ini. Sejumlah peserta dalam Workshop Isi Siaran KPID Jawa Barat belum lama ini mengindikasikan bahwa televisi berkontribusi besar pada makin masifnya aksi pembegalan. Kendati hal itu perlu dibuktikan melalui kajian yang cermat, tetapi secara faktual ketika satu peristiwa pembegalan diberitakan di suatu tempat, esok lusa terjadi pula di tempat lain dan terus menebar ke tempat-tempat lainnya. Seolah berita televisi menjadi inspirasi bagi para pembegal lainnya untuk melakukan aksi yang sama.

Jika televisi dituding menjadi salah satu sumber inspirasi, memang tidak dapat disangkal. Namun, jika inspirasi tersebut terkait dengan aksi pembegalan, tentu perlu bukti yang memadai. Akan tetapi, pengakuan sejumlah pelaku kriminal bahwa mereka kerap kali memiliki modus untuk melakukan tindak kejahatan karena terinspirasi tayangan-tayangan berita kriminal di televisi, seperti kasus pembobolan ATM, pencurian kendaraan, bahkan sampai cara menaklukkan kunci. Dalam konteks ini, televisi sudah berhasil menjalankan fungsi *educated*-nya, kendati berekses negatif; mencerdaskan penjahat dan memberikan inspirasi pada berulangnya tindak kejahatan.

Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui aturan P3 SPS-nya (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) memberikan sejumlah pelarangan dan pembatasan pada lembaga penyiaran dalam menayangkan siaran jurnalistik. Misalnya, pada Pasal 41 huruf d SPS disebutkan, program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

Begitu juga dalam Pasal 43-nya huruf a, c, dan e, program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik

wajib mengikuti ketentuan, tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak; tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian; tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan; tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

Bahkan, dalam Rakornas KPI & KPID se-Indonesia yang digelar di Makasar, 30 Maret sampai 2 April 2015, terkait dengan siaran jurnalistik yang menyajikan berita kejahatan, cara penyajian angel tindak kejahatan juga akan dijadikan salah satu poin penting dalam perubahan P3 SPS. Televisi dalam menayangkan siaran jurnalistik harus pandai-pandai memilah mana tindak kejahatan yang harus disajikan *close up* dan mana yang harus *long shot* dengan berpijak pada dampak negatif yang akan dialami publik.

Adanya pelarangan siaran jurnalistik tersebut, di antaranya dimaksudkan agar tidak ada upaya untuk meniru modus-modus kejahatan, sehingga satu modus tindak kejahatan akan menjadi trend bagi pejabat lainnya. Hal itu pulalah yang melahirkan asumsi bahwa siaran jurnalistik di televisi tentang aksi pembegalan menjadi inspirasi bagi para penjahat lainnya, sehingga pembegalan terjadi cukup masif.

Kendati secara teoretis, Jean Budrillard berpandangan bahwa publik pun acapkali mengalami distorsi pemaknaan terhadap isi media, sehingga mengakibatkan munculnya gejala hiperrealitas. Salah satu di antaranya adalah skizoprenia yang secara sederhana menunjuk kepada apa yang disebut kesimpangsiuran bahasa. Trend-nya istilah pembegalan pada suatu peristiwa kejahatan yang diperkenalkan media, akan memungkinkan mendorong media lainya untuk memberikan label sama pada tindak kejahatan yang berbeda.

Oleh karena itu, sangat memungkinkan tindak kejahatan yang dulunya diberikan label perampokan, penjambretan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, perampasan, dan tindak kejahatan yang hampir serupa lainnya, kini diberikan label yang sama oleh media, yakni pembegalan. Oleh karena itu, publik diberikan pemaknaan pesan media bahwa tindak kejahatan pembegalan sangat masif karena kuantifikasi kemunculan istilah pembegalan berfrekuensi tinggi.

Namun, fakta apapun yang terjadi, sebagaimana amanah P3 SPS, media penyiaran, khususnya televisi harus ekstra hati-hati dalam menyajikan siaran jurnalistik tentang kejahatan karena dapat membawa dampak negatif bagi publik. Siaran jurnalistik yang mengajikan berita tindak kejahatan dapat menjadi inspirasi bagi penjahat lain untuk melakukan modus yang sama. Bahkan, lebih luas lagi, masifnya pengistilahan tindak kejahatan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan luas bagi publik.

Dengan tetap kukuh pada pemenuhan hak konstitusional warga atas informasi, menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang ideal, siaran jurnalistik pun harus memberikan perlindungan terhadap kemunduran karakter bangsa dan ikut serta memperkokoh nilai-nilai positif yang sudah lama tertanam pada jatidiri Bangsa Indonesia. Karena hal itulah di antaranya yang akan dapat tetap menempatkan para jurnalis Indonesia sebagai panutan dan pahlawan. (*Dipublikasi Harian Pikiran Rakyat, 31 Maret 2015*)***

Namun, pelanggaran terhadap P3-SPS yang terkait hal tersebut, terutama pelanggaran terhadap Pasal 43-nya huruf a, c, dan e yang menunjukkan adanya program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan, *tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak; tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian; tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan; tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual*, berdasarkan hasil pleno KPID Jawa Barat belum ada yang terbukti atau nihil, baik pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, maupun tahun 2019.

Walaupun sejumlah item (indikasi temuan) hasil Tim Pemantau KPID Jawa Barat sempat muncul, tetapi dipatahkan dalam Rapat Pleno KPID Jawa Barat karena beberapa aspek dari pasal tersebut tidak terbukti. Aspek yang dimaksud adalah **terperinci** cara mengaktifkan dan membuat bahan peledak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) During, kata terperinci asal dari kata dasar **perinci**/pe•rin•ci/ v, **memerinci**/me•me•rin•ci/ v menyebutkan (menguraikan) sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya; **terperinci**/ter•pe•rin•ci/ v sudah diperinci;

perincian/pe•rin•ci•an/ n 1 uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; 2 hasil memerinci; 3 cara, perbuatan, proses memerinci; **pemerincian**/pe•me•rin•ci•an/ n proses, cara, perbuatan memerinci. Untuk membuktikan sampai menguraikan ke hal-hal yang sekecil-kecilnya dalam mengaktifkan dan membuat bahan peledak, belum ada tayangan seperti itu. Visual yang disajikan televisi seringkali hanya bagian “besarannya” saja.

Begitu pun kata **terperinci** dalam klausul *tidak memberitakan secara **terperinci** reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan*, belum ada yang terbukti. Kalau siaran jurnalistik yang didukung dengan tayangan visual reka ulang yang dilaksanakan pihak kepolisian sering kali muncul di televisi, tetapi tayangan mereka tidak menunjukkan **terperinci**. Yang ditayangkan televisi lebih pada visual “besarannya” saja yang mereka anggap mewakili cerita tentang rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian. Selain itu, kalau pun mereka harus menayangkan reka ulang yang dilakukan pihak kepolisian memerlukan durasi yang panjang, padahal siaran *news* atau yang bernuansa *news* rata-rata berdurasi satu jam. Oleh karena itu, tayangan reka ulang yang dilakukan pihak kepolisian hampir tidak mungkin terperinci.

Apalagi untuk **merinci** dalam bentuk tayangan *reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual*, lebih tidak mungkin lagi. Karena tayangan **terperinci** terkait dengan *reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual merupakan pelanggaran besar dan akan mencederai nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan budaya Indonesia yang religious dan beradab*. Hal itu pun bukan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia; andaipun ada, lembaga penyiaran tersebut tidak layak hidup di bumi Indonesia.*

C. Bercanda Tidak dengan Mencela

Akhir-akhir ini, “visi politik” sejumlah pimpinan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota mengalami pergeseran dari mewujudkan kesejahteraan rakyat ke peningkatan indeks kebahagiaan warga. Kendati untuk menakar tingkat kebahagiaan warga, indikatornya masih debatable, tidak seperti tingkat kesejahteraan yang diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui peningkatan pendidikan, daya beli, dan taraf kesehatan.

Muncul juga persepsi, tingkat kebahagiaan merupakan indikator tambahan selain ketiga indikator untuk mengukur IPM. Seperti dulu sempat mencuat, selain pendidikan, daya beli, dan kesehatan, sejumlah cendekiawan menggagas memasukan indikator keempat: kesalehan sosial. Namun, ide itu rontok karena kesulitan untuk mengkuantifikasi bentuk kesalehan sosial dalam angka-angka.

Untuk menakar tingkat kebahagiaan pun tampaknya mengalami kesulitan yang sama karena kebahagiaan adalah kata abstrak yang sulit diukur dengan berlimpahnya kekayaan atau tingginya pendidikan. Orang kaya belum tentu lebih bahagia dari orang miskin dan orang berpendidikan tinggi belum tentu lebih bahagia dari yang tingkat pendidikannya rendah. Bahagia adalah rahasia hati.

Kendati begitu, dalam kajian komunikasi non-verbal dari Morris (1977), kebahagiaan dapat dibaca dari tampilan mimik muka; mimik muka orang bahagia dapat dibedakan dari mimik muka orang menderita karena muka adalah cerminan hati. Dalam kondisi apapun hati dapat tergambarkan melalui raut muka.

Salah satu cermin bahagia yang tergambarkan melalui mimik muka adalah tertawa atau tersenyum. Tertawa dan tersenyum adalah bahasa tubuh yang secara umum memiliki makna penggambaran kondisi hati yang bahagia. Kendati ada juga tertawa mengejek, senyum sinis atau tertawa dalam duka dan senyum dalam tangis. Namun, hal itu degradasi dari makna yang sebenarnya yang lahir karena kecerdasan manusia memanipulasi kondisi.

Akhir-akhir ini banyak orang menyimpulkan bahwa stimuli tertawa adalah hiburan, sehingga untuk meningkatkan indeks kebahagiaan dilakukan dengan upaya memperbanyak tempat dan acara hiburan. Sejumlah hasil penelitian di beberapa kota besar menyimpulkan, kepenatan kota, tekanan kesibukan bekerja, kemacetan yang menyergah di mana-mana, telah mendorong warga untuk menyisihkan waktunya melakukan rileksasi dengan hiburan, sehingga hiburan sudah menjadi kebutuhan primer.

Salah satu media yang memberikan kontribusi besar terhadap hiburan rakyat yang murah adalah televisi. Di antara cercaan dengan tuduhan menjadi salah satu penyebab degradasi moral, kenakalan anak & remaja, serta menginspirasi tindak kriminal, televisi pun berjasa besar dalam memenuhi kebutuhan hiburan. Memang, Undang-Undang No. 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran pun mengamanahkan, fungsi penyiaran, selain sebagai media informasi, pendidikan, serta kontrol dan perekat sosial juga menyajikan hiburan yang sehat.

Salah satu konten hiburan yang nyaris mendominasi setiap program acara di televisi adalah melawak, ngabogor, atau bercanda. Programnya boleh talk show, sajian lagu dan musik, lomba dan adu prestasi, tetapi canda selalu menjadi bumbu dominan. Bahkan, banyak juga televisi yang menyajikan program acara khusus dengan label komedi yang jelas mengumbar canda.

Pada satu sisi, program acara tersebut memberikan kontribusi positif pada pemenuhan kewajiban sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran bahwa isi siaran wajib mengandung hiburan. Bahkan dalam konteks lebih luas, program acara itu pun dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan indeks kebahagiaan. Dengan menonton acara yang penuh canda, warga dapat tersenyum, tertawa terbahak, dan sejenak melupakan beratnya tekanan dan beban hidup.

Namun, para pelawak, presenter, host, dan talens kadang khilaf, candaan mereka seringkali kebablasan. Kelemahan, kekurangan, dan kondisi tubuh tertentu acapkali menjadi bahan olok-olokan. Padahal Undang-Undang Penyiaran pun dengan tegas melarang isi siaran memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan ... martabat manusia.

Dengan lebih mendetail, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) pun memberikan larangan agar program siaran tidak menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi tidak terbatas: a. Pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam; b. Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu; c. Lanjut usia, janda, duda; d. Orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki hidung tongos, mata juling; e. Tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autis; f. penyidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; dan/atau g. Orang dengan masalah kejiwaan.

Selain itu, dalam Pasal 24 SPS pun dengan tegas melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar atau makian, baik secara verbal

maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan atau menghina, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing.

Pasal-pasal tersebut memberikan rujukan dan panduan yang jelas bagi program acara komedi atau non-komedi penuh canda untuk lebih berhati-hati dalam memilih kontens. Lembaga penyiaran harus pandai memilih pelawak, talens, presenter, host yang cerdas memilih kata-kata canda, tetapi tidak mencela; tindakan lucu, tetapi tidak menghina. Mereka memang berkontribusi besar pada upaya meningkatkan indeks kebahagiaan warga dengan alternatif hiburan murah melalui layar kaca. Namun, sejatinya hiburan yang sehatlah yang harus mereka sajikan; bukan memberikan kebahagiaan semu di atas penderitaan orang yang terhinakan. (*Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 10 Februari 2016*)***

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas cukup banyak. Banyak, para pelawak atau pemain komedi yang terpaksa harus berurusan dengan polisi karena dilaporkan, baik oleh pribadi atau kelompok masyarakat tertentu. Mereka salah berucap, keterlanjuran berkata-kata, atau nyata-nyata sengaja menghina, kendati sekedar ingin mendapatkan tepuk tangan dan ketawa pemirsa. Yang jelas, mereka berncanda dengan mencela dan itu tidak menunjukkan kecerdasan sebagai seorang pelawak profesional.

Berikut beberapa contoh komedian atau pelawak yang sempat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena konten lawakannya. Komedian Andre Taulany sempat dilaporkan seorang advokat ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Dua komika yang tergabung dalam Majelis Lucu Indonesia (MLI), Coki Pardede dan Tretan Muslim pernah tersandung dugaan penistaan agama. Joshua Suherman, stand up comedian yang tergabung dalam MLI dan mantan penyanyi cilik tersandung masalah karena materi yang ia bawaan, sehingga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dengan dugaan penistaan agama. Komedian Uus tersandung karena dinilai menyinggung sebagian kalangan umat Islam karena cuitannya di akun Twitter. Komedian Ernest Prakasa pernah dikecam lantaran kicauannya tentang kedatangan ulama asal India, Zakir Naik, ke Indonesia yang akhirnya bertemu dengan wakil Presiden Jusuf Kalla. Komika asal Bandung Ge Pamungkas pernah bermasalah akibat salah satu materi yang ia bawaan membahas tentang

banjir yang terjadi di Jakarta yang dianggap sebagai cobaan dari Allah SWT.

D. Kontroversi Dangdut

Sebenarnya, kewaspadaan Pemerintah terhadap kemungkinan maraknya perilaku buruk warganya, terutama anak dan remaja sudah jauh-jauh hari dilakukan. Ditabuhnya genderang perang terhadap berbagai hal yang dapat mempengaruhi, memicu, mendorong, dan memberikan kesempatan terjadinya perilaku buruk anak-anak dan remaja sudah ditabuh sejak dari hulu. Kendati harus mengorbankan kesempatan meraup materi dan berlimpahnya karya kreatif, Pemerintah memiliki komitmen tinggi dengan mengeluarkan sejumlah aturan pelarangan dan/atau pembatasan, misalnya, penyebaran Narkoba, minuman keras, rokok, bahkan karya seni.

Salah satu yang sudah lama diwaspadai Pemerintah akan menjadi salah satu sumber “penyakit” bagi perkembangan perilaku anak dan remaja adalah lembaga penyiaran. Program acara di lembaga penyiaran memang ibarat pisau bermata dua, satu sisi akan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan, kecerdasan, dan kesejahteraan publik, tetapi pada sisi lain dapat berdampak pada memburuknya perilaku publik. Oleh karena itu, wajar jika sejak keberadaannya, apalagi ketika makin menjamur, lembaga penyiaran diwaspadai, dicurigai, bahkan tak jarang dituduh menjadi biang keladi memburuknya perilaku anak dan remaja.

Konten siaran yang diwaspadai dan dicurigai tersebut di antaranya penggunaan kata-kata, baik bentuk ucapan biasa, iklan atau lirik lagu dan puisi yang bernilai cabul. Bahkan pada Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran dengan tegas menyebutkan, isi siaran dilarang menonjolkan unsur cabul. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) pun melarang menampilkan kata-kata cabul.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang bisa dilihat secara online di internet, istilah cabul diartikan sama dengan kata porno. Bahkan, secara terminologis dan semantik, kata cabul dan porno memiliki kesamaan juga dengan seks. Kata cabul memang banyak memiliki arti, tetapi secara garis besar berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Oleh karena itu, kata-kata cabul dalam P3 SPS masuk pada Bab Adegan Seksual dan nyata-nyata

dilarang dan/atau dibatasi.

Salah satu konten siaran yang acapkali disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran dan terkait penggunaan kata cabul adalah lirik lagu dangdut. Hasil penertiban KPID Jawa Barat pada lembaga penyiaran di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat pada awal 2016, masih banyak ditemukan lagu dangdut berlirik cabul disiarkan, sehingga dangdut dalam pencermatan khusus KPID Jawa Barat.

Padahal dalam Pasal 20 SPS dengan jelas ditegaskan, program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks. Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks. Berangkat dari sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS, KPID Jawa Barat mengidentifikasi dan menganalisis lebih 40 judul lagu dangdut yang diindikasikan berkonten kata-kata cabul.

Kendati, pakar kesenian rakyat, Jaeni B. Wastap (2015) pernah mengatakan, dangdut merupakan musik yang lahir dan dibesarkan oleh masyarakat “ibu pertiwi”. Ia sanggup menceritakan keadaan lingkungan sosial budayanya. Dangdut melalui liriknya menjadi ekspresi jujur tentang lingkungannya. Kejujuran ekspresi itu, dapat membanggakan dan dapat pula membuat malu. Fenomena dangdut berlirik cabul bagian dari masyarakat pendukungnya. Jika lirik-lirik dangdut menjadi seronok dan vulgar, itu artinya ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang asyik dengan ke-seronok-an dan ke-vulgar-an.

Padahal, pesan-pesan seronok dan vulgar dapat menyesatkan dan menjerumuskan pendengar atau pemirsa (penonton) ke dalam jurang syahwat dan nafsu semata. Dangdut merupakan karya seni bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga semestinya mengacu pada konsep-konsep seni budaya Indonesia yang memuat etika (kaidah, benar), estetika (keindahan), dan hikmah (manfaat), bukan menyesatkan dan menjerumuskan.

Oleh karena itu, bukan kebijakan berlebihan jika KPID Jawa Barat tegas melarang dan membatasi sejumlah lagu dangdut yang berlirik cabul untuk disiarkan, baik di radio apalagi di televisi yang kerap kali dibumbui dengan goyang erotis penyanyi. Kebijakan KPID bukan upaya pembekapan terhadap karya seni yang seharusnya layak hidup dan berkembang di negeri ini. Namun, KPID Jabar memiliki kewajiban untuk

mewujudkan tujuan penyiaran sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran, yakni terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa.

Apalagi, siaran lagu dangdut berkonten kata cabul seringkali ditayangkan pada klasifikasi jam tayang anak dan remaja. Padahal Pemerintah melalui Undang-Undang Penyiaran sudah tegas berkomitmen bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Hal itu ditegaskan kembali dalam beberapa pasal P3-SPS, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan. Kata-kata kasar dan makian mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Namun, setegas apapun pasal-pasal dalam aturan penyiaran dan kebijakan KPID Jabar, hanya ikhtiar kecil sumbahsih kepedulian pada perkembangan karakteristik anak dan remaja ke depan. Ikhtiar besar sejatinya dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa untuk tetap komit memerangi segala bentuk kegiatan yang dapat menyesatkan dan menjerumuskan moral bangsa karena hal itulah sebenarnya musuh terbesar kita pada era ini. (Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 15 Maret 2016) ***

Terkait dengan hal itu, Keputusan Pleno KPID Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang intinya memberikan rujukan kepada lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran radio maupun televisi untuk tidak menyiarkan dan/atau menayangkan lagu dangdut yang masuk kategori dilarang dan membatasi menyiarkan dan/atau menayangkan lagu dangdut judul tertentu hanya pada klasifikasi jam dewasa, yakni pukul 22.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib.

Berikut isi Surat Edaran KPID Jawa Barat nomor 001/KPID JBR/04/2016 tentang Pelarangan dan Pembatasan Siaran Lagu-Lagu

Dangdut. Berdasarkan 1) Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia; 2) Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Penyiaran diarahkan untuk : b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; 3) Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a & e Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa (2) Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat; bahwa (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia....e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; 4) Pasal 9 Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran bahwa Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat; 5) Pasal 14 Ayat (1) & (2) Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran bahwa (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran dan (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran; 6) Pasal 16 Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran bahwa Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual; 7) Pasal 9 Ayat (1) & (2) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku,

budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat; 8) Pasal 20 Ayat (1) & (2) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks. (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks; 10) Hasil Rapat Dengar Pendapat Ahli (RDPA) Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2015 dan 26 Agustus 2015; 11) Hasil Rapat Pleno Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat pada tanggal 5 April 2016; Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menetapkan pelarangan dan pembatasan terhadap lagu-lagu dangdut sebagaimana judulnya tercantum dalam lampiran ini untuk disiarkan dan/atau ditayangkan baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah Jawa Barat. Demikianlah edaran ketetapan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat untuk diperhatikan dan ditaati oleh seluruh lembaga penyiaran yang wilayah layanannya ada di wilayah Jawa Barat ditandatangani langsung Ketua KPID Jawa Barat Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.

Berikut daftar lagu dangdut yang dilarang dan dibatasi untuk disiarkan di lembaga penyiaran wilayah layanan Jawa Barat.

Daftar Judul Lagu Dangdut

DILARANG	DIBATASI
1. Julia Perez - Paling Suka 69	1. Julia Perez - Belah Duren
2. Mirnawati - Wanita Lubang Buaya	2. Melinda - Cinta Satu Malam
3. Zilvana - Simpanan	3. Melinda - AW AW
4. Ade Farlan - Hamil Sama Setan	4. Linda Moy Moy - Gadis Bukan Perawan
5. Asep Rumpi feat Lia MJ - Mobil Bergoyang	5. Siti Badriah - Berondong Tua
6. Della Puspita - Apa Aja Boleh	6. Varra Selvarra - Janda Rasa Perawan
7. Tuty Wibowo - Hamil Duluan	7. Ayu Tin Ting - Geboy Mujair
8. Rimba Mustika - Mucikari Cinta	8. Cita Citata - Perawan atau Janda

9. Zaskia Gothic - Satu Jam Saja	9. Desy Ning Nong - Merem Melek
10. Mozza Kirana - Melanggar Hukum	10. Diora Ariendita - Aku Pingin Dipacarin
11. Geby Ge - Cowok Oplosan	11. Titi Kamal - Jablay
12. Ellicya - Merem-Merem Melek	
13. Lolita - Ga Jaman Punya Pacar Satu	

Sumber: Lampiran Surat Edaran KPID Jabar Nomor : 001.KPID JBR/04/2016

E. Melindungi Anak; Menghukum Terduga

Kendati masyarakat sepakat, hukuman berat harus dijatuhkan pada pelaku kekerasan dan kejahatan seks terhadap anak-anak, bahkan hukuman penjara puluhan tahun, seumur hidup, hukuman mati sampai dikebiri pun belum cukup jika dibandingkan dengan dampak berat yang dirasakan korban. Oleh karena itu, hukuman sosial pun menjadi “kado” tambahan, sehingga gambar dan identitas pelaku acap kali dipampang, diumumkan, bahkan di beberapa daerah tertentu diarak ramai-ramai keliling kampung. Hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus memberikan pelajaran pada siapapun agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Media massa, khususnya media penyiaran televisi memberikan kontribusi besar terhadap hukuman tambahan tersebut karena keistimewaan audiovisual yang dapat menyajikan gambar hidup pelaku bersama segala identitasnya. Kendati faktanya, debat “kusir” antara lembaga penyiaran dengan KPI/KPID masih terjadi dalam penegakan Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Sebagai contoh, ketika kasus tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak mencuat ke permukaan, KPID Jawa Barat mencatat terjadi peningkatan pelanggaran siaran jurnalistik yang dilakukan lembaga penyiaran. Pelanggaran tersebut terutama merujuk pada Pasal 43 huruf f dan g SPS. Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: f. menyamakan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya; g. menyamakan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang

pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur.

Pasal tersebut sangat jelas menyuratkan bahwa siaran jurnalistik tidak boleh atau dilarang atau harus menyamakan korban dan keluarganya serta terduga pelaku, dan pelaku beserta keluarganya yang pelaku maupun korban kejahatannya anak di bawah umur. Kendati persepsi batasan anak di bawah umur dalam banyak peraturan berbeda-beda, tetapi dalam ketentuan umum Pedoman Perilaku Penyiaran ditegaskan di bawah usia 18 tahun.

Namun atas pelanggaran tersebut, hampir semua lembaga penyiaran “merasa tidak bersalah”. Mereka memiliki persepsi sebagaimana persepsi publik bahwa penghukuman tambahan bagi terduga pelaku dan pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah dipermalukan dengan dibuka gambar dan identitasnya terhadap publik. Sekaligus diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi siapapun agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dalam kegiatan jurnalistik, termasuk siaran jurnalistik televisi, sudah lama dikenal asas praduga tak bersalah. Dalam implementasi asas tersebut, menurut Loebby Loqman (2010) masih terjadi perbedaan pendapat. Kendati sudah lama dicantumkan dalam Kode Etik Jurnalistik, masih terdapat beberapa penafsiran, sehingga menyebabkan beberapa variasi dalam pemberitaan, khususnya yang berkenaan dengan perkara pidana.

Bahkan R.H Siregar pada Diskusi Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press di Jakarta 1989 lalu pernah memaparkan terkait dengan perbedaan persepsi di antara berbagai pihak tentang asas praduga tak bersalah. Pertama terdapat kelompok yang menaati asas tersebut, khusus terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap, cukup hanya inisialnya, tetapi terhadap kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar tersangka dimuatnya secara lengkap.

Kedua, kelompok yang memutuskan identitas serta gambar seorang tersangka/terdakwa secara lengkap terdapat kriteria tertentu, misalnya, karena perbuatan yang dilakukan kejam dan tercela melebihi batas-batas kemanusiaan. Ketiga, kelompok yang menyebutkan secara lengkap identitas tersangka/terdakwa tanpa melihat kasusnya, tetapi melihat pelakunya. Apabila pelakunya seorang ‘public figur’ dianggap tidak perlu lagi menyebutkan identitas dengan inisial, tetapi ditulisnya secara

lengkap, dengan argumentasi, ‘public figur’ tersebut sudah menjadi milik masyarakat, sehingga menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh sikap tindaknya, termasuk apabila disangka melakukan tindak pidana.

Keempat, kelompok yang memuat gambar tersangka/terdakwa dengan menutup matanya meskipun identitasnya dimuat secara lengkap atau sebaliknya. Kelima, kelompok yang menafsirkan asas tersebut hanya berlaku apabila perkara tersebut sudah masuk dalam sidang pengadilan, sehingga tidak perlu dilaksanakan apabila masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Terkait dengan terduga pelaku atau pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, salah satu konsen Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS adalah menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, sejumlah pasal banyak dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak dan remaja. Termasuk dalam Pasal 43 tentang penyamaran terduga pelaku dan pelaku tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

Wajib disamarkannya terduga pelaku dan pelaku tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, semata-mata untuk melindungi anak, baik sebagai pelaku, apalagi jika menjadi korban. Kalau identitas dan gambar terduga pelaku atau pelaku dan keluarganya disiarkan dengan jelas, terdapat kemungkinan menuntun terungkapnya identitas anak. Terlebih, fakta membuktikan banyak pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang yang dekat dengan korban. Jika identitas pelaku dibuka, otomatis identitas anak terbuka, artinya mereka tidak terlindungi. Padahal masa depan mereka masa panjang.

Namun, hal itu bukan berarti tidak setuju terhadap penghukuman tambahan yang dapat menyebabkan efek jera sekaligus memberikan pelajaran pada siapapun agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Dalam konteks inilah, lembaga penyiaran harus pandai memilih dan memilah terduga pelaku atau pelaku yang layak dipublikasikan dan yang wajib disamarkan dalam bingkai bersama-sama memberikan perlindungan terhadap kehidupan anak-anak.

Setidaknya, dalam beberapa diskusi rencana revisi P3-SPS, hal itu sempat terungkap, tetapi belum terealisasi. Semoga, sejalan dengan dilantikannya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019, revisi P3-SPS untuk memberikan penajaman sejumlah pasal

menjadi agenda terdepan. (*Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 8 Agustus 2016*)***

F. Migrasi Film Bioskop ke Televisi

Salah satu konten yang acapkali muncul menjadi acara unggulan dalam program siaran televisi, terutama televisi SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) adalah film, baik film nasional maupun film impor. Film-film tersebut tentu sudah ditayangkan di layar lebar atau di bioskop-bioskop, sehingga sebagaimana amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dipastikan film-film tersebut sudah lulus sensor dari LSF (Lembaga Sensor Film). Bahkan, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) pun tegas memerintahkan bahwa program siaran dalam bentuk film dan iklan wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

Namun, sudah lulus sensor dari lembaga yang berwenang bukan berarti aman untuk ditayangkan di layar kaca atau televisi karena selain terdapat perbedaan karakteristik antara bioskop dengan televisi juga *frame of reference* yang dimiliki Komisioner LSF dengan KPI/KPID berbeda karena peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan pun berbeda. Oleh karena itu, SPS pun menegaskan tanda lulus sensor tidak serta merta membuktikan kesesuaian dengan aturan penyiaran.

Kendati keduanya menyajikan tayangan audio visual, tetapi karakteristik bioskop dan televisi sangat berbeda. Televisi ditonton oleh khalayak massa yang sulit teridentifikasi secara langsung, sedangkan bioskop memiliki khalayak penonton yang nyata, dapat dengan mudah teridentifikasi langsung. Oleh karena itu, penonton televisi hampir tidak mungkin dikendalikan dan dibatasi, sedangkan penonton bioskop mudah dikendalikan dan dibatasi.

Film yang sudah lulus sensor memiliki label penggolongan usia penonton film, misalnya, untuk semua umur, 13 tahun atau lebih atau film dewasa dengan kategori 17 tahun atau lebih, bahkan ada juga film 21 tahun atau lebih. Oleh karena itu, bioskop-bioskop dapat membuat filter bagi siapa saja yang akan menonton. Para pengelola bioskop dapat menyisir penonton, misalnya, dengan seleksi KTP, sehingga penonton dapat menonton film sesuai dengan penggolongan usianya. Namun, hal itu hampir tidak mungkin diterapkan pada penonton televisi, walaupun P3-SPS pun mengatur penggolongan program siaran berdasarkan usia.

Penggolongan film bioskop berdasarkan usia hasil sensor LSF sebenarnya dapat juga menjadi rujukan bagi penyelenggara program siaran televisi ketika akan memindahkan film layar lebar ke layar kaca. Undang-Undang Perfilman pun mengamanahkan pertunjukan film untuk golongan penonton usia 21 tahun atau lebih yang melalui penyiaran televisi hanya dapat dilakukan dari pukul 22.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

Akan tetapi, perintah Undang-Undang Perfilman itu pun tidak cukup karena terdapat kecenderungan film yang banyak mengumbar adegan “dewasa” sering digolongkan pada penonton film usia 17 tahun atau lebih atau sering disebut film 17 tahun ke atas. Bahkan, film yang penggolongan penontonnya 21 tahun atau lebih teramat jarang. Oleh karena itu, selayaknya film bioskop, baik film impor maupun film nasional yang digolongkan bagi penonton 17 tahun atau lebih, ketika ditayangkan di televisi harus disesuaikan dengan kategori dewasa pada televisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS.

Dalam Bab XVII tentang Penggolongan Program Siaran pada SPS dijelaskan dalam Pasal 33 sampai Pasal 39 bahwa terdapat klasifikasi program siaran mulai dari klasifikasi P untuk anak-anak Pra-Sekolah, A untuk anak-anak, R untuk remaja, D untuk Dewasa, dan SU untuk semua umur lengkap dengan pembagian jam siarannya. Pengaturan tersebut dapat diselaraskan dengan kategori usia juga yang sudah dikeluarkan LSF terhadap film-film yang beredar di bioskop.

Namun faktanya, berdasarkan kajian terhadap hasil pemantauan Bidang Pengawasan Isi Siaran (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) KPID Jawa Barat terdapat kecenderungan hal itu tidak dilakukan. Banyak film yang jelas-jelas menurut hasil sensor LSF termasuk kategori 17 tahun ke atas, tetapi di televisi ditayangkan pada jam anak, remaja, bahkan ada pada jam anak pra-sekolah. Oleh karena itu, banyak sekali adegan yang melanggar P3 SPS, sehingga KPID Jawa Barat pun seringkali memberikan sanksi dari mulai himbauan sampai teguran atau rekomendasi teguran terhadap lembaga penyiaran.

P3 SPS menegaskan terdapat sejumlah konten yang sama sekali dilarang atau tidak boleh ditayangkan pada klasifikasi siaran anak pra-sekolah (p) dan anak-anak (A), yakni antara pukul 05.00-18.00. Hal-hal yang dilarang ditayangkan tersebut adalah adegan kekerasan dan atau

berbahaya; adegan seksual; adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor dan atau mistik; muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

P3 SPS pun melarang menyiarkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak, seperti kisah perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan atau penggunaan Nafza (narkotika, psikotropika, zat aditif); Dilarang juga disiarkan iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Muatan tersebut seringkali muncul pada film-film migrasi dari bioskop ke televisi, baik film nasional maupun film impor, terutama film-film yang nyata-nyata sudah mencantumkan pembatasan usia 17 tahun ke atas. Oleh karena itu, pengaruh buruk yang dikhawatirkan terjadi pada anak pra-sekolah dan anak-anak sangat memungkinkan terjadi.

Dalam konteks inilah, seharusnya para pengelola lembaga penyiaran, terutama televisi memahami dan menyadari akan hal itu. Pemahaman dan kesadaran yang sama pun harus dimiliki para orang tua, sehingga mereka selalu berupaya mendampingi anak ketika menonton televisi sekaligus menjadi pengendali remote control televisi agar channel yang dipilih tetap dengan program acara sesuai batasan usia. Pemahaman dan kesadaran mereka teramat penting karena akan menjadi point entry besar bagi kontribusi perbaikan moral, mental, dan nasib anak bangsa ke depan. (Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 10 November 2016)***

G. Melarang Tayangan Kartun

Lucu memang ketika film-film kartun yang ditayangkan di layar kaca mulai ditertibkan. Beberapa penonton pecinta film kartun protes karena cerita kartun kecintaan mereka tidak utuh lagi; beberapa adegan diedit, di-bluring, bahkan di-cutting.

Namun lebih lucu lagi ketika anak-anak mulai membisu karena menonton kartun Larva yang selalu tampil tanpa kata-kata; mulai berani melawan dan mengkritik orang tua ketika menonton Sin Chan; merindukan makan krabby patty karena terinspirasi Spongebob; memimpikan jadi jagoan karena mengidolai Naruto. Bahkan, mereka tak lagi mau mengaji atau mengerjakan PR karena beberapa televisi menayangkan kartun kecintaannya pada prime time.

Andi Yuda Asfandiyar, alumni ITB yang konsen sebagai pengamat film kartun pada Rapat Dengar Pendapat Ahli (RDPA) KPID Jawa Barat minggu lalu, dengan tegas menyebutkan, film animasi kartun dengan olahan visual yang semakin ‘dalam’, memberikan impresi kuat pada penonton anak-anak dan cenderung menjadi ‘guru’ cara berpikir dan bertindak (character building) anak-anak. Teknik warna, bentuk, gerak, alur cerita, dan suara film kartun telah menyihir dan mendorong alam bawah sadar anak-anak, sehingga anak Indonesia dapat menjadi “anak” kartun.

Kendati film kartun identik dengan anak-anak, tetapi tidak semua tayangan film kartun ramah anak. Tidak semua film kartun dapat menjadi gizi bagi anak-anak, justru sebagian dapat menjadi racun bagi perkembangan anak. Anak yang dimaksud adalah manusia dari usia enam hingga dua belas tahun atau menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, manusia berusia 18 bulan sampai 13 tahun atau kalau pendekatan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 tahun.

Memang tidak dapat ditampik juga, tontotan film kartun pun dapat memberikan manfaat positif pada perkembangan anak: mengajak anak berimajinasi dan memenuhi curiosity-nya; mendidik dengan gambar menarik mampu memperjelas materi yang susah diverbalkan; merangsang minat baca anak akibat tafsir pada gambar-gambar yang bermakna luas; memperlancar kemampuan bercerita; merangsang emosi anak; memberikan impresi/kesan yang mendalam; melatih berfikir urut (akibat sekuens gambar); dan menyalurkan ekspresi diri anak, bahkan mampu membantu anak mengidentifikasi dirinya (Yuda,2015).

Namun sayang, tidak semua kartun memberikan manfaat positif seperti itu, bahkan kebanyakan justru sebaliknya. Oleh karena itu, beberapa pasal dalam P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan

Standard Program Siaran) secara berlapis-lapis memberikan rujukan untuk melindungi anak-anak dari serbuan program siaran. Hal itu sebagai perwujudan tugas dan kewajiban KPI-KPID sebagaimana diamahkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang di antaranya : menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Lapis pertama, P3 SPS memberikan aturan tentang penggolongan program siaran, yakni klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran yang cocok. Oleh karena itu, muncullah program siaran klasifikasi P (usia pra-sekolah: 2-6 tahun) yang disiarkan antara pukul 07.00-09.00. dan antara pukul 15.00-18.00.; klasifikasi A (anak 7-12 tahun) yang disiarkan antara pukul 05-18.00; klasifikasi R (remaja 13-17 tahun) yang disiarkan pukul 04.00-21.00; dan klasifikas D (Dewasa 18+ tahun) yang disiarkan antara pukul 22.00-03.00 Wib. Selain dimungkinkan ada isi siaran yang dapat ditayangkan pada klasifikas SU (semua usia). Bahkan, pada klasifikasi Pra-Sekolah, Anak, dan Remaja ditambah dengan harus adanya imbauan bimbingan dari orang tua (BO).

Dalam konteks inilah, untuk menayangkan film kartun tidak mudah mengidentikkan pasti layak dikonsumsi anak, tetapi bergantung dari isi ceritanya. Oleh karena itu, peran importir film kartun, LSF (Lembaga Sensor Film), dan stasiun televisi harus sama-sama memfilter isi cerita kartun, sehingga tidak mengkategorikan film kartun masuk pada semua usia atau masuk klasifikasi anak. Namun, harus diklasifikasi yang layak ditonton anak, remaja, bahkan kartun untuk dewasa berdasarkan kajian pada isi ceritanya.

Lapis kedua, pasal 15 SPS dengan tegas menyebutkan: (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja; (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja; (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya; dan (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat. Pasal ini memberikan perlindungan khusus kepada anak, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif tayangan televisi terhadap karakteristik anak.

Lapis ketiga, P3 SPS pun dengan tegas memilah isi siaran dengan aturan pelarangan dan pembatasan. P3 SPS melarang lembaga penyiaran untuk penayangan siaran yang mengandung kekerasan “yang sangat”, adegan seks yang “sangat vulgar”, dan tayangan pemakaian Napza, rokok, dan minuman keras. Jika hal itu dilanggar, maka lembaga penyiaran tidak bisa ampun akan mendapatkan sanksi tegas dari KPI-KPID.

P3 SPS pun membatasi beberapa adegan kekerasan yang “wajar”, adegan yang “nyerempet-nyerempet” seks, dan horor serta mistik, sehingga wajib ditayangkan pada klasifikasi dewasa (pukul 22.00-03.00) atau tidak boleh ditayangkan pada klasifikasi pra sekolah, anak, dan remaja.

Larangan dan pembatasan yang diatur dalam P3 SPS tersebut, tidak hanya berlaku bagi siaran faktual, tetapi non-faktual seperti film, sinetron, termasuk di dalamnya film kartun. Jika film kartun mengandung kekerasan “yang sangat” adegan seks yang “sangat vulgar”, dan tayangan pemakaian Napza, rokok, dan minuman keras, maka dilarang ditayangkan. Jika film kartun mengandung kekerasan yang “wajar”, adegan yang “nyerempet-nyerempet” seks, dan horor serta mistik, maka dibatasi pada klasifikasi jam tayang dewasa atau dilakukan edit internal baik di-bluring atau di-cutting. Film kartun yang layak ditonton anak adalah kartun yang cocok dengan usia anak dan dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan karakter anak.

Bicara masa depan anak, termasuk akibat siaran televisi, tidak hanya kewajiban KPI-KPID atau juga lembaga penyiaran, tetapi kewajiban bersama: para orang tua dan masyarakat. Kita semua harus lebih waspada karena juga tidak hanya gempuran televisi, anak-anak kekinian pun berada pada ancaman teknologi informasi tinggi, seperti gadget, buku/majalah/komik, games dll. Apalagi anak-anak pangsa pasar sangat besar yang menjanjikan keuntungan bisnis luar biasa, sehingga menjadi incaran para kapitalis yang haus market share dan kadang lupa heart share. (Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 1 September 2015)***

H. Mewaspadai Konten Siaran Iklan

Selain program siaran jurnalistik dan non-jurnalistik, yang juga perlu diwaspadai khalayak pecinta televisi dan radio adalah konten siaran iklan. Banyak sekali hasil penelitian yang sudah membuktikan bahwa siaran iklan berpengaruh besar terhadap perubahan sikap dan perilaku

khalayak, terutama anak-anak dan remaja.

Iklan merupakan salah satu alat promosi yang paling populer dan paling banyak digunakan produsen untuk mengkomunikasikan barang dan jasa kepada konsumen. Informasi mengenai produk sangat dibutuhkan konsumen, dan iklan di media penyiaran merupakan salah satu sumber informasi yang dijadikan rujukan bagi konsumen.

Pada dasarnya, siaran iklan berusaha menarik perhatian khalayak, sehingga kata-kata yang digunakan indah dan mudah diingat, termasuk juga menggunakan endorser (artis pendukung) yang populer. Namun, yang ditawarkan iklan kadangkala kelebihan-kelebihan produk atau jasanya saja, sedangkan kekurangan dilesapkan, disembunyikan atau bahkan dihilangkan. Secara teoretis hal itu sah-sah saja karena merupakan salah satu strategi persuasi.

Model strategi persuasi iklan seringkali menggunakan Model Hugh Rank's (1976) yang pada intinya melibatkan dua komponen pokok: mengekspos secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) dan memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (downplay) aspek-aspek sisi negatif. Ekspos nilai positif dibumbui aspek-aspek hummant interest. Ide, peristiwa, kegiatan, dan bahan informasi lainnya yang menarik menjadi rujukan, seperti, hal konkret, suspense, konflik, popularitas, baru dan eksotik, sensasional logik, aktual, kata beraroma, kalimat beragam, anekdot, fakta mengejutkan, ramalan, humor, serta yang berhubungan dekat dengan orang, tempat, atau peristiwa lokal.

Namun, realitas di media penyiaran, kadangkala iklan yang disajikan tidak sekedar menggunakan strategi persuasi, tetapi seringkali meng-hiperbola-kan situasi, baik keadaan produk/jasa maupun efeknya. Banyak iklan yang tidak sekedar menyajikan kelebihan, tetapi melebih-lebihkan kelebihan, sehingga kadangkala tidak rasional dan terindikasi bohong dan menipu. Penyajian iklan seperti itu menjadi lebih berbahaya ketika dibumbui high art technology, baik dalam bentuk pewarnaan, desain gambar, maupun menyisipkan adegan-adegan dramatis bernuasa kekerasan dan eksotisme seks.

Oleh karena itu, wajar jika pada Oktober 2017 lalu, KPID Jawa Barat meluncurkan surat imbauan nomor 482/2047/KPID/Diskominfo perihal siaran iklan di lembaga penyiaran. Imbauan itu berdasarkan pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan

Standar Program Siaran (SPS) yang mengatur siaran iklan melalui pasal-pasal khusus. Pengaturan siaran iklan sangat urgen terkait informasi yang diiklankan, terutama siaran iklan niaga yang notabene targetnya anak-anak dan remaja. Padahal kelompok usia tersebut menjadi fokus perlindungan dari eksekusi negatif program siaran. Undang-Undang Penyiaran menegaskan, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja.

Secara umum, Undang-Undang Penyiaran menyiratkan pengaturan siaran iklan sebagaimana pengaturan konten siaran jurnalistik dan non-jurnalistik. Undang-Undang Penyiaran mengatur, materi siaran iklan harus menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia; dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul (adegan seksual), perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dilarang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar-golongan.

Pada bagian khusus, baik pada Undang-Undang Penyiaran maupun P3-SPS dengan tegas siaran iklan dilarang: promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman beralkohol atau sejenisnya; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; adegan seksual; adegan kekerasan; upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan; eksploitasi anak di bawah umur 12 tahun; dan/atau hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Lebih lanjut dijelaskan mendetail yang dimaksud adegan seksual berupa menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin; menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan; menayangkan kekerasan seksual; menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan; menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan; menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara

vulgar; menampilkan adegan ciuman bibir; mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot; menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis; mengesankan ketelanjangan; mengesankan ciuman bibir; dan/atau menampilkan kata-kata cabul.

Sementara itu, yang dimaksud adegan kekerasan dijelaskan pula lebih lanjut berupa menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengerooyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri; menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan; menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia; menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

Selain itu, untuk menangkal pengaruh negatif siaran iklan di televisi dalam bentuk film, sejak dari hulu sudah dilakukan penyensoran melalui LSF (Lembaga Sensor Film). Bahkan, Dewan Periklanan Indonesia pun sudah mengeluarkan sejumlah aturan terkait dengan konten iklan berupa tata krama dan tatacara periklanan Indonesia yang diberinama Etika Pariwara Indonesia (EPI). Kedua aturan itu pun secara tersurat dalam Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS diamanahkan harus menjadi pedoman bagi media penyiaran dalam menayangkan siaran iklan.

Namun, lengkapnya pengaturan siaran iklan belum dapat menjadi tembok yang tangguh untuk tidak terjadinya pelanggaran; masih saja ada masyarakat yang mengadu karena kecewa terhadap siaran iklan yang tidak mendidik, mengada-ada, terindikasi bohong yang berdampak negatif pada sikap dan perilaku khalayak. Data Bidang Pengawas Isi Siaran KPID Jabar pada semester pertama 2017, dari 696 pelanggaran, siaran iklan berada urutan pertama (21,5%) yang diikuti oleh infotainment (20,7%), film/sinetron (14,4%), berita (11,4%), variety show (8,8%), dan 33% program siaran lainnya.

Tahun 2018, Data Bidang Pengawas Isi Siaran KPID Jabar menggambarkan, dari 4.210 pelanggaran, siaran iklan berada urutan keempat: 237 pelanggaran atau 5,6% yang lainnya pelanggaran perlindungan anak 784 pelanggaran atau 19%, diikuti oleh pelanggaran

perlindungan hak privasi 212 pelanggaran atau 5%, mistik, horor, dan supranatural 246 pelanggaran atau 5,8%, kekerasan 337 pelanggaran atau 8%, dan 57,2% program siaran lainnya.

Sepanjang tahun 2019 Data Bidang Pengawas Isi Siaran KPID Jabar menggambarkan, dari 4.143 pelanggaran, siaran iklan berada urutan kelima: 310 pelanggaran atau 7,5% yang lainnya pelanggaran perlindungan anak 2.151 pelanggaran atau 51,9%, diikuti oleh pelanggaran perlindungan hak privasi 477 pelanggaran atau 10,8%, mistik, horor, dan supranatural 391 pelanggaran atau 9,4%, kekerasan 335 pelanggaran atau 8%, dan 12,2% program siaran lainnya.

Padahal, menurut hasil penelitian Shimp (2003) & Lukitaningsih (2013), iklan akan efektif dan memuaskan khalayak, di antaranya, jika tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan; menerangkan dengan apa adanya, mencegah ide kreatif strategi berlebihan. Tujuan iklan mempersuasi dan mempengaruhi, bukan membuat bagus-bagus yang bagus dan lucu-lucuan yang lucu. Penggunaan humor yang tidak efektif mengakibatkan orang-orang hanya akan ingat pada humornya, tetapi melupakan pesannya. Iklannya populer, produk/jasanya terpuruk. Iklan seperti itulah yang akan menuai rugi berlipat; Iklan seperti itulah yang harus diwaspadai bersama dalam rangka menyelamatkan anak bangsa. (Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 29 November 2017) ***

I. Tahun Mistik, Horor, dan Supranatural

Kendati media sosial tampak mendominasi, tetapi media mainstream masih tetap memiliki peranan besar pada aksesitas kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber informasi, sarana hiburan, pendidikan, maupun sebagai perekat dan kontrol sosial. Apalagi televisi yang sudah terlebih dahulu merebut hati khalayak dengan siaran audio visualnya, murah, banyak pilihan, serta dekat dan intim dengan khalayak, tidak dapat diremeh-temehkan. Berbagai penelitian dan teori pun sudah membuktikan, televisi adalah magic box, kotak yang dapat berpengaruh besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku khalayak; televisi adalah sarana mimesis khalayak yang paling efektif.

Oleh karena itu, di antara “kepanikan” menghadapi dasyatnya pengaruh media sosial, semua pihak juga tetap harus waspada terhadap konten-konten siaran yang disajikan lembaga penyiaran, terutama televisi. Di wilayah perkotaan, boleh jadi peminat televisi sudah mulai berkurang

karena trends lifestyle generasi milenial yang media sosial sentris, tetapi siaran televisi pun ikut mewarnai, baik melalui tv streaming-nya maupun YouTube-nya. Namun, di wilayah pedesaan, siaran televisi masih tetap menjadi idola.

Apalagi hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat (KPID Jabar) dan laporan masyarakat Jawa Barat selama tahun 2018 dari 1.926 pelanggaran isi siaran terhadap Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), 93,8% atau 1.808 pelanggaran dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi. Dari 4.210 kali pasal yang dilanggar lembaga penyiaran tersebut, di antaranya 1.394 kali pelanggaran terhadap aturan yang terkait dengan larangan penayangan konten siaran pada waktu tayang klasifikasi anak dan 784 kali terkait pasal perlindungan terhadap anak dan/atau remaja.

Sementara itu, pasal yang terkait dengan konten siaran yang paling sering muncul di televisi dan melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2018 adalah konten siaran mistik, horror, dan supranatural (mhs). Konten mistik, horor, dan supranatural pada tahun 2018 disajikan sangat masif di layar televisi dan hampir merasuki setiap bentuk program siaran, mulai dari film, sinetron, infotainment, bahkan reality show. Eksploitasi muatan tersebut yang berlebihan berpotensi menimbulkan efek negatif pada kehidupan masyarakat, seperti munculnya rasa takut yang berlebihan atau mendorong masyarakat untuk percaya atas kesaktian benda atau orang tertentu yang berindikasi melanggar Pasal 36 Ayat (5) UU Penyiaran bahwa isi siaran dilarang bersifat ...menyesatkan....

Siaran mistik, horor, dan supranatural pun berbahaya bagi kerusakan kognisi, sikap, dan perilaku; dapat mendorong pada pembenaran terhadap kondisi hidup yang irrasional, toleransi terhadap keburukan, dengki, iri hati, curiga, dan penyakit hati lainnya; dapat memicu perilaku tidak produktif dan permisif terhadap sikap mental menerabas; dapat menciptakan ketakutan, kecemasan, stress dan emosi negatif lainnya (Rachmiate : 2018).

Oleh karena itu, Standar Program Siaran mengatur lebih rinci tentang Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural dalam satu bab dan tiga pasal. Dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan, Program Siaran yang mengandung muatan Mistik, Horor, dan/atau Supranatural dilarang menampilkan : a. mayat bangkit dari kubur; b. mayat dikerubungi hewan;

c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah; d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindra yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan; e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti, benda tajam, binatang, batu dan/atau tanah; f. memotong anggota tubuh, seperti, lidah, tangan, kepala, dll.; g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti, senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) mempertegas pengaturan Pogram Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural di layar televisi melalui surat edaran. Surat Edaran yang dikeluarkan akhir 2018 menguatkan, mempertegas, dan menambahkan bahwa lembaga penyiaran harus super taat pada peraturan dalam menyajikan Pogram Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural. Khalayak harus ekstra hati-hati dalam menikmatinya. Regulasi penyiaran di Indonesia secara umum memang memberikan peluang bagi lembaga penyiaran untuk menayangkannya; sebagian budaya masyarakat Indonesia pun menerimanya, sehingga rating program tersebut cukup menjanjikan. Namun tampilan program harus tetap dikemas dengan baik dan berlandaskan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Namun, sesuai dengan karakteristik budaya sebagian masyarakat Indonesia yang juga percaya pada hal-hal gaib, baik dari perwujudan benda-benda keramat maupun tokoh/sosok tertentu, Standar Program Siaran pun “beradaftasi”. Oleh karena itu, dalam Pasal 30 ayat (2) ditegaskan, Pogram Siaran yang bermuatan Mistik, Horor, dan/atau Supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dalam adegan: orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim; memotong anggota tubuh,; menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh,. Namun, dalam kerangka perlindungan terhadap anak & remaja, adegan tersebut hanya dapat disiarkan pada (jam) klasifikasi dewasa (DW), mulai pukul 22.00 sampai dengan 03.00 waktu setempat.

Kemudian pada Pasal 31 dan 32-nya ditegaskan pula, Pogram Siaran yang menampilkan muatan Mistik, Horor, dan/atau Supranatural dilarang: melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan dengan tegas sebagai reka adegan atau fiksi; adegan yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak harus ditayangkan pada (jam) kategori dewasa (DW) pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Setegas apapun aturan dan seberat apapun sanksi yang diancamkan, tidak akan menjadi solusi terbaik bagi makin sehatnya program siaran. Terlebih Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural yang akhir-akhir ini sangat masif pada program siaran televisi Indonesia memiliki rating di atas rata-rata. Dalam frame bisnis, program siaran tersebut cukup menggiurkan di antara mulai lesunya minat khalayak terhadap siaran televisi. Dalam pendekatan layanan, rating tinggi menunjukkan peminatan yang besar, yang berindikasi pada meningkatnya kepuasan publik. Bahkan bagi sebagian masyarakat, siaran tersebut sinergi dengan upaya peningkatan kepedulian dan pelestarian budaya lokal.

Namun, setara-kah pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan dampak buruk yang akan ditimbulkan, khususnya pada generasi muda ke depan. Karena kita sangat berharap, Indonesia masa depan lebih baik daripada hari ini dan hal itu sangat bergantung dari generasi muda sekarang. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus bijak dalam menyajikan; KPI/KPID harus ketat mengawasi dan tegas memberi sanksi, kelompok masyarakat strategis pun harus tetap peduli, serta para pemirsa pun harus lebih hati-hati: menontonlah hanya pada program siaran sehat, mendidik, dan sesuai dengan klasifikasi usia. (Dipublikasikan *Harian Pikiran Rakyat*, 7 Januari 2019)***

J. Pembatasan Lagu Berbahasa Inggris

Menanggapi tulisan Saudara MZ Al-Faqih yang berjudul *Larangan Pemutaran Lagu di Radio dan TV* (*Pikiran Rakyat*, Sabtu 2 Maret 2019), terdapat hal-hal yang perlu diluruskan. Tulisan MZ Al-Faqih sangat dihormati dan dihargai karena ikut serta menyosialisasikan kebijakan Surat Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat dengan lengkap, tetapi persepsinya seperti kebanyakan pihak yang kontra yang mungkin tidak membaca secara utuh isi Surat Edaran tersebut.

Surat Edaran Nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 tentang *Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris* bukan *Pelarangan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris*. Istilah itu digunakan dalam pendekatan *Pedoman Perilaku Penyiaran- Standar Program Siaran (P3-SPS)* untuk membedakan jika dinyatakan *pelarangan*, maka 17 lagu berbahasa Inggris tersebut sama sekali tidak boleh disiarkan dan/atau ditayangkan di lembaga penyiaran, sedangkan jika dinyatakan *pembatasan*, maka 17 lagu berbahasa Inggris tersebut boleh disiarkan dan/atau ditayangkan

pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, jika menggunakan perspektif positif, seharusnya istilah yang digunakan adalah bahwa 17 lagu berbahasa Inggris tersebut diperbolehkan disiarkan dan/atau ditayangkan di lembaga penyiaran pada pukul 22.00 – 03.00 Wib.

Saudara MZ Al-Faqih pun dalam tulisannya tersebut tidak berimbang karena hanya menyampaikan fakta terdapat kritikan dari berbagai pihak atas Surat Edaran tersebut. Padahal faktanya, selain kritikan banyak juga dukungan yang menyatakan kesetujuan, seperti, KPI Pusat dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa kebijakan KPID Jawa Barat dalam bentuk Surat Edaran pembatasan siaran dan/atau tayangan 17 lagu berbahasa Inggris sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Gubernur Jawa Barat pun dalam IG-nya secara tersirat menyatakan kesetujuan karena sesuai dengan visinya untuk membangun moral bangsa; dan banyak lagi, mungkin sama banyak dengan yang mengkritik, bahkan sangat mungkin lebih banyak daripada yang mengkritik.

Terakhir, terimakasih Saudara MZ Al-Faqih sudah memberikan wacana perspektif hukum, tetapi menurut Hutchinson (dalam Titik Triwulan Tutik :2016) hukum pun dapat dibedah dalam perspektif sosial, bahkan dalam perspektif Ilmu Komunikasi, sehingga saya menyebutnya hukum komunikasi. Untuk mengembangkan aspek empirikal dari Ilmu Hukum dilakukanlah kajian-kajian yang bersifat empirikal dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum selain tetap mempergunakan kajian normatif.

Dalam perspektif komunikasi, hukum, bahkan ilmu eksak sekalipun tidak dapat bebas nilai sebagaimana Merrill (1999) mengajarkan bahwa media yang dihidup tidak dapat melepaskan diri sistem politik yang berkembang di tempat media itu hidup. Ketika suatu disiplin ilmu diterapkan dalam kehidupan manusia, maka ia harus beradaptasi dengan karakteristik lingkungan manusia tersebut. Apalagi ilmu yang bersifat terapan dan tergolong humanistik yang lebih bergantung dari perubahan karakteristik manusia. Apalagi produk hukum yang nyata-nyata bersifat implementatif, seperti halnya KUHPidana yang berasal dari produk Belanja dan sudah banyak diubah disesuaikan dengan karakteristik lingkungan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, boleh jadi benar perspektif MZ Al-Faqih terkait eksistensi Surat Edaran KPID Jawa Barat jika menggunakan pendekatan normatif. Kendati hal itu pun masih dapat diperdebatkan di antara para

ahli hukum. Namun, dalam sebuah lembaga independen yang merupakan lembaga kuasi negara (state auxiliary body) karena para anggotanya dianggap kompeten dan direkrut dengan sangat selektif; Apalagi, undang-undang pun dengan tegas memberikan tugas dan kewenangan untuk membuat dan mengawasi regulasi, bahkan mengeksekusi pelanggaran dalam bentuk sanksi; maka ia punya berhak untuk menafsirkan sejauh tidak bertentangan dan melawan aturan yang lebih atasnya.

Surat Edaran adalah tafsir yang dapat dikatakan nyaris menjadi “yurisprudensi” karena tidak hanya KPID Jawa Barat yang mengeluarkan itu, tetapi banyak lembaga negara, termasuk KPI Pusat pun sudah berkali-kali mengeluarkan surat edaran, di antara kewenangan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran yang selayaknya cukup mengeluarkan peraturan dan keputusan. Tafsir ini menjadi memiliki kekuatan hukum karena produk pleno dari lembaga negara independen; Pleno adalah keputusan tertinggi dalam lembaga negara independen yang menghasilkan apapun serta di KPID Jawa Barat salah satunya menghasilkan Surat Edaran Nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 tentang Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris.

Kendati secara substansial urgensi dari Surat Edaran itu, bukan pada kekuatan hukumnya karena setinggi apapun kedudukan hukum dan seberat apapun sanksi yang dapat dijatuhkan tidak pernah luput dari “pembangkangan”. Fakta histori acapkali membuktikan hukum/aturan selain untuk ditaati juga untuk dilanggar; setiap aturan lahir selalu saja ada yang taat dan selalu saja ada yang melanggar.

Yang terpenting substansi dari Surat Edaran ini adalah memberikan inspirasi untuk menumbuhkan kesadaran pada semua pihak, baik KPI/KPID, lembaga penyiaran, bahkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa konten siaran yang disiarkan dan/atau ditayangkan di lembaga penyiaran Indonesia harus memberikan nilai maslahat yang besar bagi kehidupan masyarakat, baik lahir maupun bathin. Apalagi lembaga penyiaran masih menggunakan frekuensi milik publik, sehingga seluruh programnya harus lebih berpihak pada nilai manfaat positif untuk publik.

Oleh karena itu, KPID Jawa Barat pun selain membuat surat edaran, masih banyak program yang bertujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,

adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Hal itu direalisasikan untuk mendorong tersedianya konten siaran yang menyajikan informasi yang benar, pendidikan yang tepat, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial.

Kebijakan mengeluarkan surat edaran kebijakan kecil dengan harapan besar, karena lahir di antara hirup-pikuknya media, baik media cetak, media elektronik, terutama media sosial. Masih banyak konten media yang dapat mendorong makin terdegrasinya moral anak dan remaja Indonesia. Namun, rumus 3M dari MQ Aagym semoga menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa untuk memerangi konten buruk pada media, mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan harus mulai saat ini. Wallahu A'lam Bishawab. (Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 4 Maret 2019)***

J. Mengawasi Media Sosial

Penggunaan teknologi informasi melalui internet di Indonesia berkembang pesat nyaris tak terkendali. Sebagian ilmuwan mengkategorikan media tersebut adalah media sosial dan merupakan bagian dari media massa walaupun karakteristiknya banyak berbeda dengan surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Para pengguna media sosial dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.

Media sosial memiliki ciri-ciri khusus, pesan yang disampaikan dapat ke berbagai kelompok orang, bebas tanpa harus melalui suatu “Gatekeeper”, cenderung lebih cepat dibanding media lainnya, dan penerima pesan dapat menentukan waktu interaksi. Khalayak tidak hanya bertindak sebagai objek layaknya pada media mainstream, tetapi dapat menjadi subjek langsung baik berkelompok maupun personal. Pengguna media sosial dapat menunjukkan eksistensi, ekspresi, kreasi diri, tanpa harus memiliki kemampuan khusus dan filter “desk editor”.

Makin Melejit

Oleh karena itu, angka pengguna media sosial terus melesat meninggalkan jumlah pengguna media massa lainnya. Bahkan, media sosial dapat menyedot sebagian besar pengguna media mainstream. Euforia pengguna dunia maya ini dalam berbagai bentuk menembus sekat dan jarak: yang jauh dapat menjadi dekat yang dekat dapat menjadi jauh. Teknologi internet mewarisi daya imajinasi manusia yang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Melejitnya media sosial sangat membanggakan sekaligus mengkhawatirkan. Media sosial banyak memberi manfaat sekaligus menyodorkan mudharat, sehingga gerakan ber-internet sehat dan cerdas pun terus didengungkan. Ancaman dari makin merebaknya teknologi internet pun makin rentan, seperti makin bertebarannya informasi berkonten prasangka, dusta, rekayasa yang memperdaya yang trend disebut hoax. Konten-konten yang tidak sehat dan mendidik pun cukup masif dalam berbagai bentuk sajian pornografi atau porno aksi, baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Realitas itu didorong dengan makin membudayanya hobi men-twit, meng-share, mem-broadcast, meng-up-load, mem-posting pada masyarakat, sehingga informasi sekecil apapun dapat membesar menjadi heboh, gaduh, dan riuh. Ketika informasi itu bernilai positif akan dapat memberikan manfaat besar, tetapi sebaliknya, ketika prasangka, dusta, rekayasa, dan konten-konten tidak sehat dan mendidik yang masif, korban pun sudah berjatuhan, baik perilaku dan moral bangsa yang makin memburuk maupun pengguna yang harus berurusan dengan hukum.

Realitas itulah di antaranya yang mendorong Pemerintah dan masyarakat reaktif, bahkan yang terakhir KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Pusat. Pemerintah sudah lama mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE), sejumlah kelompok masyarakat membentuk berbagai komunitas literasi media sosial, dan KPI Pusat pun berencana “mengembangkan kewenangan” pengawasan pada media sosial, selain lembaga penyiaran (radio dan televisi).

Pengawasan Media Sosial

Secara ideologis, Indonesia bukan negara liberal, sehingga dalam kehidupan pers saja tidak dikenal kebebasan pers. UU Pers No. 40 Tahun

1999 menyebutnya kemerdekaan pers yang memiliki makna bahwa media massa diperbolehkan untuk mengekspresikan apapun, tetapi tidak boleh melanggar dan merugikan hak-hak warga negara. Secara personal, kebebasan warga negara pun dijamin melalui konstitusi UUD 1945, tetapi UUD 1945 pun memberikan perlindungan terhadap warga negara dari kewenang-wenangan warga negara lain.

Oleh karena itu, peraturan yang dibuat Pemerintah, baik langsung maupun melalui lembaga lainnya yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti KPI, tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan pers atau kebebasan personal untuk berekspresi dengan cara apapun termasuk di media sosial, tetapi dalam kerangka melindungi warna negara dari kesewenang-wenangan pers dan/atau warga negara lainnya.

Dalam konteks rencana KPI Pusat untuk “melebarkan kewenangan” pengawasan hingga ke media sosial, misalnya youtube dan netflix serta sejenisnya, secara tersurat belum tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002. Namun, ada celah hukum yang dapat ditafsirkan, misalnya, pada Pasal 1 angka 2 bahwa Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kata media lain-nya, memiliki makna luas dan dapat saja ditafsirkan salah satunya media sosial. Apalagi secara teoretis, sejumlah ilmuwan sudah mengkategorikan, media sosial bagian dari media massa. Penafsiran itu pun sudah dilakukan Dewan Pers, sehingga Dewan Pers pun memiliki kewenangan untuk menerima aduan terkait konten jurnalistik di media online. Oleh karena itu, jika KPI pun akan menafsirkan hal yang sama, sehingga menjadikan media sosial sebagai objek pengawasan, tidak melampaui kewenangan.

Sejatinya rencana KPI Pusat tersebut mendapat dukungan besar semua elemen masyarakat karena selain KPI Pusat “iklas” menambah pekerjaan juga membantu Pemerintah yang selama ini dinilai belum optimal mengawasi media sosial dalam menegakkan UU ITE. Harapan besar jika pengawasan Pemerintah dibantu KPI Pusat dapat lebih efektif menekan dampak negatif penggunaan media sosial. Namun untuk menguatkan niat tersebut, selayaknya KPI Pusat melalui kewenangan

menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3-SPS), menyuratkan secara eksplisit kewenangan pengawasan media sosial tersebut.

Apalagi, faktanya P3-SPS ditetapkan 17 tahun silam; yang pasti dalam konteks lembaga penyiaran televisi dan radio saja, banyak hal yang sudah berubah yang harus diadaptasi dan di-update. Oleh karena itu, revisi P3-SPS “pekerjaan rumah” yang harus menjadi program prioritas KPI dari setumpuk pekerjaan rumah dalam optimalisasi penegakan UU Penyiaran. KPI masih harus menguatkan eksistensi KPID; menyusun hukum acara penegakan UU Penyiaran & P3-SPS, membersihkan konten-konten televisi yang masih menayangkan mistis, horror, dan supranatural; sinetron-sinetron yang mengandung unsur kekerasan, porno aksi, perselingkuhan, dan cerita serta adegan yang tidak mendidik.

Kendati setegas apapun KPI bersama Pemerintah, pengawasan yang paling efektif terhadap konten media massa adalah pengawasan partisipatif seluruh masyarakat. Warganet dan seluruh warga negara harus ikut serta mengawasi agar konten-konten yang muncul di media massa adalah konten siaran yang mengandung informasi yang benar, hiburan yang sehat, pendidikan yang tepat, kontrol sosial yang konstruktif, serta perekat sosial bagi makin kokohnya NKRI. (*Dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, 14 Agustus 2019*)***

BAB V

PENGAWASAN SIARAN KEAGAMAAN

Penyiaran memang bukan dunia hampa; tetapi hirup pikuk dengan cerita¹. Amanah Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bahwa lembaga penyiaran memiliki empat fungsi: informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, telah mendorong lembaga penyiaran selayaknya media massa lainnya; Memiliki aksesitas yang luas dan resiprokal. Satu sisi lembaga penyiaran dapat memilih konten siaran, menyebarkannya, bahkan mempengaruhi khalayak, sehingga kognitif, afektif, bahkan konatif khalayak terpola pada framing. Namun pada sisi lain, khalayak pun dapat memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung terhadap konten siaran, sehingga mempola konten siaran di lembaga penyiaran mengikuti arus pasar.

Fakta itulah yang memberikan gambaran bahwa konten siaran pada lembaga penyiaran sangat kaya; tidak hanya menyangkut konsep-konsep idealis lembaga penyiaran, tetapi hirup pikuk dan centang perenangannya fakta sosial yang inspiratif. Realitas itu pula yang membuktikan tesis Ilmu Komunikasi yang multidisipliner; yang selalu berhubungan intim; berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain, sehingga beranak-pinak dalam beragam bentuk kajian.

Sebagai bagian dari disiplin terapan komunikasi massa, konten siaran pun tidak dapat hanya berdiri di wilayahnya sendiri, tetapi juga mengembara sejalan imajinasi yang tidak bertepi. Setiap fakta sosial selalu menjadi inspirasi untuk lahirnya karya-karya besar insan penyiaran. Apalagi jika fakta sosial tersebut kolosal menyangkut hayat hidup banyak orang; umat Islam yang mayoritas akan menjadi inspirasi besar untuk lahirnya konten siaran yang variatif.

Seperti halnya program siaran televisi yang tidak selamanya buruk.

1 Mahi M. Hikmat. 2018. *Pengawasan Siaran Tahun Politik: Antara Idealisme dan Ideologisme*. KPID Jawa Barat: Bandung

Televisi banyak juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan publik. Banyak ilmuwan komunikasi bersepakat bahwa media massa, seperti televisi, tidak ubahnya bagi pedang bermata dua. Televisi dengan kekuatannya bisa menyatukan peradaban dunia dan juga bisa menjadi penghancur peradaban.

Karakteristik yang paling menonjol dari eksistensi media massa, seperti televisi adalah efek pesan yang disampaikan kepada komunikan (massa). Karena berbagai kelebihan karakternya, televisi dianggap paling besar memberikan pengaruh terhadap audiens jika dibandingkan dengan media massa lainnya. Dari beragam media massa (surat kabar, majalah, radio, televisi), tidak dapat disangkal, televisilah yang memiliki keunggulan lebih, dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Televisi dalam menyampaikan pesannya bersifat audio visual dapat dilihat dan didengar dan juga “datang langsung” ke rumah-rumah. Dengan segala kemudahan, masyarakat dengan tidak harus meninggalkan rumah dan sambil santai bersama keluarga dapat menikmati hiburan beraneka ragam, informasi yang serba cepat dan memuaskan (dapat didengar, dipandang, dan dibaca).

Siaran televisi tidak mengenal pembatas daratan dan lautan, gunung-gunung, dan lembah-lembah. Bahkan, batasan negara pun bukan merupakan penghalang bagi masuknya siaran televisi. Masyarakat Indonesia di beberapa wilayah yang terjangkau, dapat menonton siaran-siaran televisi dari negara lain. Apalagi jika dilengkapi dengan teknologi yang lebih muktahir, semua siaran televisi dunia dapat disaksikan di rumah warga Indonesia (Hikmat, 2011).

Karena kemampuan daya sebar dan daya pikat itulah, khalayak (masyarakat) lebih besar perhatiannya terhadap televisi, ketimbang media massa lainnya. Bahkan dari sisi usia khalayak, televisi dapat menyerap perhatian semua segmen pasar. Mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada orang tua. Mereka dapat menyaksikan semua acara televisi dengan tidak perlu memiliki kemampuan khusus, seperti halnya kehadiran media cetak yang memerlukan kemampuan membaca.

Oleh karena itu, di antara media massa mainstream lainnya pada masa ini, televisi lebih dapat memberikan efek besar terhadap khalayak. Efek media massa terhadap komunikan/audien terdiri dari efek kognitif, efek afektif/emosional, dan efek konatif/behavioral. Ketiga komponen inilah yang nantinya membentuk suatu sistem yang disebut sikap komunikan

(*mass behavior*).

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk muslim. Bagi umat Islam, Ramadhan merupakan bulan segala kebaikan dan keberkahan, segala amal ibadah dilipatgandakan. Ramadhan adalah tamu agung, sehingga segala persiapan pun dilakukan untuk menyambut kedatangannya. Bulan ini istimewa dan hadir hanya setahun sekali.

Keistimewaan Ramadhan diperspektif positif oleh lembaga penyiaran. Banyak televisi memformat program siaran dalam bingkai semangat Ramadhan. Semua hal yang dapat menguatkan ibadah Shaum menjadi program siaran unggulan dan semua hal yang dapat menjadi “penggoda” berkurangnya nilai Shaum dihindarkan. Oleh karena itu, baik KPI maupun KPID pun selain membuat imbauan untuk melindungi publik dari siaran “penggoda” Puasa, juga memberikan apresiasi pada televisi yang menyajikan program acara ramah Ramadhan².

A. Siaran Keagamaan

Terkait dengan dunia penyiaran, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang kini masih berlaku dan menjadi payung hukum bagi eksistensi dunia Penyiaran adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Visi Undang-Undang Penyiaran memberikan tugas dan kewenangan berimbang pada Komisi Penyiaran Indonesia. Selain memiliki tugas dan kewajiban menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik ditambah dengan kewenangan mengawasi dan memberikan sanksi, Komisi Penyiaran pun harus memberikan apresiasi terhadap penyelenggara penyiaran.

Selain itu, paradigma pengawasan terhadap isi siaran yang disajikan lembaga penyiaran harus berangkat setidaknya dari pemahaman tiga hal³. *Pertama*, Komisi Penyiaran Indonesia harus melindungi khalayak dari dampak buruk isi siaran yang disajikan lembaga penyiaran. Hal itu dipandu dengan parameter ketentuan pembatasan dan larangan yang tersurat pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Keluaran dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana tugas dan kewajiban pertama Komisi Penyiaran Indonesia, yakni menjamin masyarakat untuk

2 Mahi M. Hikmat. Aturan Siaran Adan Magrib. 6 Mei 2019. Pikiran Rakyat: Bandung

3 Mahi M. Hikmat. Acara TV pada Bulan Suci. 2 Juli 2015. Pikiran Rakyat: Bandung

memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Kata *hak asasi manusia* melahirkan pemahaman *kedua* bahwa Komisi Penyiaran pun harus menjadikan hak informasi yang dimiliki masyarakat tidak terlanggar. Bahkan, selain tersurat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas informasi juga merupakan hak konstitusional warga Negara karena tersurat langsung dalam Pasal 28 F UUD 1945. Hal itu ditegaskan pula dalam Undang-Undang Penyiaran bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Ketiga, dibentuknya KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) juga menyuratkan amanah besar bagi perlindungan terhadap entitas lokal. Oleh karena itu, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Selain itu, P3 SPS pun mengamanahkan, lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan (SSJ) wajib menyiarkan program lokal paling sedikit 10%. Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

Ketiga pemahaman kebijakan penyiaran itu, diimplementasikan dalam konteks program siaran Ramadhan yang juga harus menjadi pemahaman bagi lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran. Bagi umat Islam di Indonesia yang notabene mayoritas, Ramadhan merupakan bulan segala kebaikan dan keberkahan, segala amal ibadah dilipatgandakan, sehingga segala persiapan pun dilakukan untuk menyambut kedatangannya. Bulan ini istimewa karena hanya hadir setahun sekali.

Oleh karena itu, lembaga harus berhindar dari program siaran yang masih menayangkan goyangan erotis, eksploitasi tubuh wanita, pria berperilaku dan berpakaian seperti wanita, kekerasan dan candaan kasar, mengungkapkan aib seseorang, konflik, mistik, horror, supranatural, mengarah keintiman pria dan wanita, serta program siaran sejenisnya. Program siaran tersebut harus diganti dengan program siaran yang memberikan spirit kekhusuan ibadah Puasa dapat berupa talk show,

feature, ceramah, dan acara lainnya yang bernuansa Islami. Penggantian program acara tersebut menunjukkan penghormatan juga terhadap hak atas informasi yang merupakan hak konstitusional bagi warga negara yang beragama Islam.

Pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan/atau aturan konten siaran pada Bulan Ramadhan sangat diperlukan bagi televisi karena berdasarkan beberapa fakta Ramadhan-Ramadhan sebelumnya, banyak televisi yang melanggar, sehingga KPI memberikan sanksi. Berdasarkan P3-SPS, terdapat empat bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh televisi pada Bulan Ramadhan. *Pertama*, pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu (melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu atau pekerjaan tertentu atau yang memiliki cacat fisik dan/atau mental). *Kedua*, pelanggaran atas perlindungan anak. *Ketiga*, pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan. *Keempat*, pelanggaran ketentuan penggolongan program siaran.

Memasuki Bulan Suci Ramadan 2019⁴, KPI melakukan pemantauan siaran Ramadhan. Hal ini dilakukan KPI, untuk memastikan seluruh program siaran yang hadir sepanjang bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan regulasi penyiaran, sehingga dapat mendukung hadirnya kekhusyukan beribadah bagi masyarakat.

KPI memiliki catatan khusus terhadap siaran sepanjang bulan Ramadan yang dirangkum selama beberapa tahun pelaksanaan pemantauan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan, terjadi perubahan tingkat konsumsi masyarakat yang berimbas pada peningkatan belanja iklan di televisi. Selain itu didapati perubahan preferensi pilihan tontonan serta perubahan jam menonton masyarakat, yang disesuaikan dengan tuntutan peningkatan kualitas ibadah, baik secara pribadi maupun sosial.

Tentang perubahan pola menonton, didapati kenaikan jumlah penonton pada waktu sahur serta penambahan jumlah penonton anak. Dari data yang dimiliki KPI, diketahui pula bahwa program siaran dengan jenis hiburan menjadi paling banyak dikonsumsi oleh pemirsa, dibandingkan program siaran lain seperti religi, berita ataupun program anak.

Berdasarkan data-data di atas, KPI meminta agar pengelola televisi

4 <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35192-anugerah-syiar-ramadhan-tetapkan-net-tv-sebagai-tv-terbaik-ramadhan-2019>

dan radio memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengutamakan prinsip perlindungan anak dan remaja pada setiap program siaran, terutama yang hadir pada waktu menjelang sahur, mengingat pada waktu tersebut masih masuk jam tayang D (dewasa). 2. Memasukkan nilai-nilai religiusitas pada program hiburan dan series yang pada bulan Ramadan ini terjadi peningkatan konsumsi dari masyarakat, agar tetap sejalan dengan semangat kesucian bulan Ramadan. 3. Meningkatkan sensor internal pada program hiburan agar jangan sampai terjadi pelanggaran regulasi penyiaran yang juga dapat menodai kesucian bulan Ramadan. 4. Menambahkan durasi program religi dari yang sudah ada selama ini. 5. Untuk program religi yang berbentuk materi ceramah keislaman, diharapkan tidak membahas materi khilafiyah dan kekhilafahan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

Beberapa KPID, di antaranya KPID Jawa Barat melakukan hal yang sama. Dalam surat edaran⁵ yang berperihal Imbauan Siaran Ramadhan dijelaskan, sesuai dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia/ Daerah (KPI/KPID) untuk mengawasi isi program siaran yang sejalan dengan tujuan penyiaran nasional yakni, memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, maka pada bulan Ramadhan 2019, KPID Jawa Barat mengimbau kepada seluruh penanggung jawab lembaga penyiaran untuk lebih menjaga isi siaran di antaranya:

Pertama, program siaran harus sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 terutama: a. Materi siaran dewasa (film, lagu, perbincangan, iklan, iklan rokok, dll) tidak disiarkan melewati pukul 03.00 WIB; b. Adzan/penanda waktu shalat dilarang disisipi dan/atau ditemplei (*bult in*) iklan komersial dan menunjukkan ketepatan waktu sesuai edaran pihak yang berwenang; c. Waktu-waktu penting pada bulan Ramadhan, seperti saat Adzan Magrib, Makan Shaur, dan Hari Raya Idul Fitri, tidak menayangkan *greeting* ucapan selamat dan sejenisnya yang mengundang unsur politis.

5 Surat Edaran KPI Jawa Barat Nomor : 480/640/IS/KPID-Jabar/IV/2019. Perihal Imbauan Tayangan Ramadhan. 30 April 2019

Kedua, tidak menyiarkan program siaran dan iklan yang akan mengganggu kehidupan orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadhan. *Ketiga*, para pelaku penyiaran (terutama host, presenter, artis dan pengisi acara) program sahur maupun menjelang buka puasa diharapkan berperilaku sesuai dengan semangat menjaga kesucian dan kehidupan ibadah puasa, misalnya dengan menjaga etika berbusana, ucapan, bahasa tubuh dan tingkah laku yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa.

Keempat, lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan tayangan yang berkualitas dan menjaga fungsi informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, sehingga tujuan penyiaran nasional dapat tercapai sesuai harapan.

B. Siaran Ramadhan di Televisi

Bagi televisi, bulan Ramadhan juga bulan kompetitif, yakni persaingan di antara sajian program Ramadhan. Persaingan program televisi pada Bulan Ramadhan di Indonesia sangat ketat. Beberapa program yang tadinya berada di peringkat atas atau masuk dalam kelompok 30 besar program dengan rating paling tinggi, pada Bulan Ramadhan turun drastis. Hal itu membuktikan Bulan Ramadhan bukan hanya berkah bagi umat Islam, tetapi juga bagi stasiun televisi. Mereka jor-joran memproduksi program Ramadhan yang bervariasi sekaligus rajin dalam mencari iklan/sponsor.

Hasil observasi Permadi (2018)⁶, kompetisi untuk meraih tv share paling besar terlihat pada laporan Nielsen pada Minggu, 20 Mei 2018. Pada hari keempat Ramadan RCTI naik ke peringkat pertama yang sebelumnya diduduki ANTV, sedangkan SCTV yang sebelumnya berada di peringkat kedua turun ke posisi keempat. Terdapat 9 program milik RCTI tercatat dalam 30 besar rating tertinggi selama Bulan Ramadan, sedangkan 7 program ANTV, 6 program SCTV, 5 program MNCTV dan IVM dengan 3 program berdasarkan hasil rating/share pada puasa hari pertama.

Berdasarkan kreativitas program, acara Khatam Al Qur'an milik Rajawali Televisi (RTV) yang dipandu Ali Zaenal dan Ustad Syech Jaber cukup menarik karena saat sahur pemirsa diajak untuk mengaji bersama sambil melihat tampilan ayat-ayat Al Qur'an yang setiap harinya

6 Iwan Permadi. Geliat Program TV di Bulan Ramadhan. <https://www.kompasiana.com/ipe/5b0345ec16835f16607c8cc5/geliat-program-tv-di-bulan-ramadan>.

mengkhatamkan satu juz.

Kemudian acara Hafidz Indonesia di RCTI yang dipandu oleh Irfan Hakim juga layak untuk ditonton karena production valuenya cukup bagus terutama ketika menampilkan kontestan bernama Keyla, yang tuna netra akibat saat masih bayinya ada kesalahan saat masuk ke mesin inkubator karena lahir premature. Dia sangat fasih dan luar biasa dalam hafalan Al Qur'annya-cukup inspiratif.

Program lain seperti sinetron, variety show, talkshow dan dokumenter seperti biasa memang sudah sering disaksikan yang membahas tempat ibadah muslim, kuliner, tokoh dan tema-tema dari dunia Islam.

Program tausiah yang bertahan adalah Ustadz Quraish Shihab di Tafsir Al Misbah (MetroTV), Ustadz Widjayanto-Syair Syair Ramadan (Kompas TV), Arman Maulana, lead vocal band Gigi, jelang berbuka puasa (Net TV), dan yang sekarang lagi naik daun Ustad Abdul Somad di TV One baik saat berbuka puasa dan sahur. Kejutan lain adalah Rhoma Irama bermain sinetron Cinta dan Doa (IVM) dan memberikan tausiah dalam Nasihat Mama Dedeh & Bang Rhoma (IVM) jelang berbuka puasa.

Tahun 2019⁷, terdapat 15 program unggulan pada televisi pada Bulan Ramadhan. Program khusus tersebut ditayangkan pada waktu-waktu unik sesuai dengan jadwal sahur dan berbuka. Setiap stasiun televisi seolah berlomba memproduksi program terbaik demi menghibur penonton saat sahur dan buka.

1. Sahur bareng Wendy Cagur, Ivan Gunawan, Jessica Iskandar & masih banyak lagi di *Gado-Gado Sahur* TransTV yang tayang setiap hari pukul 02.30 WIB; 2. Trans 7 punya *Sahur Segerr* yang diramaikan Parto Patrio, Denny Cagur, dan kawan-kawan. Tayang setiap hari pukul 02.00 WIB; 3. *Sahurnya Pesbukers* di ANTV diramaikan oleh Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dll. Acara ini tayang setiap hari pukul 02.00 WIB; 4. *Saat ngabuburit*, ada Pesbukers Ramadan yang juga diramaikan bintang-bintang gak kalah kerennya; 5. *Para Pencari Tuhan Jilid 12: Ganti Nasib* di SCTV yang tayang setiap hari pukul 03.00 WIB; 6. *Istri-Istri Akhir Zaman* diperankan para aktor yang telah berhijrah. Acara ini tayang di SCTV setiap hari pukul 04.30 WIB; 7. Sinetron religi *Merindu Baginda Nabi* yang juga bertabur aktor kawakan juga tayang setiap hari

7 <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/danti/program-tv-spesial-ramadan-yang-siap-temani-puasamu-di/full>.

pukul 15.00 WIB; 8. RCTI punya sinetron religi *Amanah Wali 3* yang diperankan band Wali & tayang setiap hari pukul 02.45 WIB; 9. Michelle Ziudith & Cemal Faruk ramaikan cast sinetron religi *Aku Bukan Ustadz: Mendadak Soleh* yang tayang tiap hari pukul 04.45 WIB di RCTI; 10. Setiap Senin sampai Rabu, dengarkan merdunya *Sabyan Gambus* dalam *Voice of Ramadan* di GTV pada pukul 14.30 WIB; 11. Vincent, Desta, Sule dkk ramaikan *Ini Sahur* di NET TV yang tayang setiap hari pukul 02.00 WIB; 12. MNCTV punya sinetron religi *Kun Anta 3* yang tayang setiap hari pukul 19.30 WIB; 13. Nisa Sabyan dkk juga eksis di program *Salam Kilau Ramadan* yang tayang perdana mulai Minggu (5/5) pukul 15.00 WIB di MNC; 14. Indosiar punya program *Festival Ramadan 2019* yang tayang perdana pada Minggu (5/5) pukul 18.00 WIB; 15. Mulai hari Senin (6/5), bisa ditonton lomba dakwah *Aksi Indonesia 2019* pada pukul 02.00 WIB di Indosiar.

C. Pengaruh Siaran Ramadhan

Peranan media massa sangat besar dalam penyampaian informasi karena media massa mempunyai beberapa keunggulan, antara lain, media massa memiliki jangkauan luas dalam penyampaian pesan kepada khalayak dan memiliki pengaruh langsung dan segera terhadap penerima pesan. Selain itu, media massa mempengaruhi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Media massa memang tidak dapat menentukan *what to think*, tetapi mempengaruhi *what to think about*. Dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, media massa membentuk citra atau gambaran dunia kita seperti yang disajikan media massa (Rakhmat, 1994: 228).

Media massa berfungsi sebagai gatekeeping yang menyaring, menonjolkan, menyurutkan isu atau objek tertentu. Umumnya pesan yang disajikan terus-menerus dalam kolom yang besar akan mengukuhkan suatu nilai yang dianggap benar/penting oleh masyarakat. Se-lokal apapun posisi media massa, pada era globalisasi informasi ini, dapat menembus sekat-sekat bahasa dan wilayah. Pada era globalisasi informasi, berita, gambar atau musik dapat melintasi perbatasan dengan cepat sekali. Informasi itu setadinya bisa saja ditulis untuk publik atau khalayak terbatas, tetapi globalisasi informasi memungkinkan lepas konteks, baik konteks pembaca, pendengar, maupun penonton. Nina Winangsih Syam (2002: 45) pun menguatkan bahwa globalisasi informasi telah menciutkan

dunia dari besar (L) menjadi sedang (M) dan dari sedang menjadi kecil (S). Hal itu terjadi karena penggabungan antara teknologi komputer dengan komunikasi yang mendorong keunggulan dalam penyebaran informasi.

Karakteristik yang paling menonjol dari eksistensi media massa adalah efek pesan yang disampaikan kepada komunikan (massa). Dari bergai karakter media mainstream (surat kabar, majalah, radio, televisi), televisi dianggap paling besar memberikan pengaruh terhadap khalayak. Televisi memiliki keunggulan lebih, dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Televisi dalam menyampaikan pesannya bersifat audio visual dapat dilihat dan didengar dan juga “datang langsung” ke rumah-rumah. Dengan segala kemudahan, masyarakat dengan tidak harus meninggalkan rumah dan sambil santai bersama keluarga dapat menikmati hiburan beraneka ragam, informasi yang serba cepat dan memuaskan (dapat didengar, dipandang, dan dibaca).

Televisi tidak mengenal pembatas daratan dan lautan, gunung-gunung, dan lembah-lembah. Bahkan, batasan negara pun bukan merupakan penghalang bagi masuknya siaran televisi. Di beberapa wilayah yang terjangkau, kita dapat menyaksikan siaran-siaran dari negara lain. Apalagi jika dilengkapi dengan teknologi yang lebih muktahir, semua siaran televisi dunia dapat disaksikan di rumah.

Karena kemampuan daya sebar dan daya pikat itulah, khalayak (masyarakat) lebih besar perhatiannya terhadap televisi, ketimbang media mainstream lainnya. Bahkan dari sisi usia khalayak, televisi dapat menyerap perhatian semua segmen pasar. Mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada orang tua dapat menyaksikan semua acara televisi dengan tidak perlu memiliki kemampuan khusus, seperti halnya kehadiran media cetak yang memerlukan kemampuan membaca.

Efek media massa, seperti televisi terhadap komunikan/audien terdiri dari efek kognitif, efek afektif/emotif, dan efek konatif/behavioral. Ketiga komponen inilah yang nantinya membentuk suatu sistem yang disebut sikap komunikan (*mass behavior*). Steven M. Chaffee dalam Rakhmat (1999: 218) berpendapat bahwa jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa adalah perubahan perasaan atau sikap dan perubahan tingkah laku, atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavioral.

Jadi, efek pesan media massa meliputi efek kognitif, afektif, dan

behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Salah satu konten siaran Ramadhan di televisi yang berefek langsung, terutama pada efek behavioral khalayak adalah siaran Adzan Magrib⁸. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS) melarang siaran adzan disisipi dan/atau ditempli (*built in*) iklan. Pelarangan tersebut berangkat dari fenomena masa lalu bahwa sejumlah televisi atau radio acapkali menyisipkan iklan pada siaran adzan. Fenomena tersebut sempat mencuat tatkala adzan, khususnya Adzan Magrib menjadi siaran yang sangat dirindukan miliaran umat Islam di dunia atau ratusan juta penduduk Indonesia tatkala sedang menjalankan Ibadah Puasa. Pada Bulan Ramadhan, Adzan Magrib menjadi idola dan rata-rata ber-rating tinggi, sehingga orang berlomba untuk menyisipkan informasi dan promosi di antara siaran Adzan Magrib.

Built in iklan pada Adzan Magrib makin nge-*trend*, ketika Ramadhan berhimpitan dengan peristiwa politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Anggota Legislatif. Para calon dan politikus berebut menyisipkan kampanye politik mereka di antara siaran Adzan Magrib. Hal itu pun berangkat dari pemahaman mereka bahwa waktu siaran Adzan Magrib pada Bulan Ramadhan menyedot perhatian banyak orang.

Adzan Magrib pada Bulan Ramadhan mengalami penambahan makna yang luar biasa ketimbang waktu adzan lainnya. Dalam pemahaman masyarakat muslim Indonesia, adzan memiliki pemaknaan simbolik yang banyak dan memiliki nilai ideologis ketauhidan. Adzan sebagai penanda waktu penting dan strategis. Adzan pun menunjukkan nilai bahwa umat Islam sangat menghargai waktu.

Pada Bulan Ramadhan, adzan mengalami penambahan makna, selain menunjukkan batas waktu shalat juga waktu Ibadah Puasa. Puasa merupakan ibadah yang berbatas waktu, sehingga awal dan akhirnya terjaga dengan batas yang jelas. Awal berpuasa ditandai dengan masuknya

8 Mahi M. Hikmat. Aturan Siaran Adan Magrib. 6 Mei 2019. Pikiran Rakyat: Bandung

waktu shubuh dan diakhiri dengan ditandai waktu magrib. Dalam batas waktu ibadah puasa inilah, sehingga Adzan Magrib menjadi idola. Ketika orang lapar dan dahaga sepanjang hari, mereka mengakhirinya dengan kumandang Adzan Magrib. Suara Adzan Magrib pada bulan Ramadhan memiliki nilai kebahagiaan yang luar biasa.

Oleh karena itu, imbauan yang penting juga dikuatkan, baik terhadap televisi, radio, maupun media masyarakat lainnya, akurasi waktu penanda Adzan Magrib pun tidak kalah pentingnya. Umat seringkali dihadapkan pada persoalan kegamangan, ketika siaran Adzan Magrib di televisi, radio, mesjid dan media lainnya, berbeda waktu. Adzan Magrib dari media mana yang harus menjadi rujukan?

Keistimewaan waktu Magrib pada Bulan Ramadhan bagi keunikan masyarakat muslim Indonesia telah membuktikan teori simbolik dari Bertens (2001). Petanda waktu Magrib telah mempengaruhi gambaran mental, pikiran atau konsep masyarakat Indonesia sebagai bagian dari karakteristik manusia sebagai makhluk simbolik. Telah lahir sejumlah kreativitas dari masyarakat Indonesia untuk menguatkan penanda waktu Magrib dengan penanda-penanda baru untuk menyongsong waktu Magrib. Masyarakat muslim Indonesia selama Bulan Ramadhan menjadi memiliki kebiasaan *ngabuburit* untuk menyimbolkan kegiatan-kegiatan menjelang waktu Magrib atau saat berbuka puasa. Sebagian masyarakat muslim Indonesia lainnya menyebutnya takjilan untuk menyimbolkan kegiatan yang hampir sama.

Oleh karena itu, dalam point lainnya, P3 SPS pun menggariskan televisi agar dalam menyiarkan program acara *ngabuburit* atau *takjilan* atau istilah lainnya, tidak lepas, apalagi bertolak belakang dengan semangat Ibadah Puasa, seperti halnya dalam berbusana sehingga wajar sejumlah artis tampil di televisi mendadak berhijab atau perilaku lainnya baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sejumlah siaran, baik dalam bentuk iklan maupun program acara lainnya, yang setadinya dibatasi hanya diperbolehkan disiarkan pada jam dewasa, seperti mulai pukul 22.00 - 03.00 untuk program siaran klasifikasi dewasa; pukul 21.30 sampai pukul 04.30 Wib untuk iklan rokok dan sejenisnya, untuk memelihara semangat Ibadah Puasa di waktu sahur agar diganti dengan program acara yang memberikan spirit pada memupuk nilai Ibadah Puasa. Hal itu teramat penting dilakukan agar segala simbol untuk mengapresiasi “kemeriahan” Ramadhan di Indonesia, tidak menyisihkan, bahkan harus menguatkan

kekhusuan dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Keberadaan televisi pada Bulan Suci Ramadhan menambah semarak kegiatan Ramadhan. Bahkan, khalayak dapat menuntut ilmu agama dengan tidak harus beranjak dari kursi; banyak lembaga penyiaran televisi yang menyajikan berbagai program acara keagamaan. Televisi pun dapat menjadi salah satu alternatif cara meningkatkan amalan ibadah umat Islam di Bulan Penuh Berkah itu.

Oleh karena itu, visi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang memberikan tugas dan kewenangan berimbang pada Komisi Penyiaran tepat sekali. Selain memiliki tugas dan kewajiban menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik ditambah dengan kewenangan mengawasi dan memberikan sanksi, Komisi Penyiaran pun harus memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran.

KPI (Pusat)⁹ pun memberikan apresiasi tinggi kepada program-program siaran Ramadhan di televisi yang edukatif, sehat, berkualitas serta selaras dengan regulasi penyiaran. Penghargaan ini diselenggarakan secara rutin, sebagai contoh dalam ajang Anugerah Syiar Ramadhan 2019 yang diselenggarakan KPI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis (2019) mengatakan, pemberian penghargaan untuk program bertema ramadhan terbaik itu bertujuan mendorong industri penyiaran di tanah air untuk berinovasi menghasilkan program-program siaran yang berkualitas untuk masyarakat. Momentum bulan Ramadhan secara filosofis merupakan sarana meningkatkan ketaqwaan lewat ibadah-ibadah khusus. Karenanya, lembaga penyiaran khususnya televisi, diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menyuguhkan program siaran yang berkualitas dan berisikan semangat perbaikan diri.

Koordinator Anugerah Syiar Ramadhan 2019 sekaligus Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah (2019), menjelaskan, program siaran ramadhan yang masuk dalam nominasi dan pemenang anugerah telah melalui rangkaian proses seleksi yang ketat dan penjurian oleh juri yang kompeten. Malam puncak Anugerah Syiar Ramadhan 1440 H/ 2019 dilaksanakan pada 15 Juli 2019 di Menara Bank Syariah Mandiri mulai

9 <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35192-anugerah-syiar-ramadhan-tetapkan-net-tv-sebagai-tv-terbaik-ramadhan-2019>

Pukul 19.00 WIB - selesai. Terdapat 8 (delapan) kategori program siaran utama yang dinilai oleh KPI, MUI dan Kemenpora untuk kemudian ditetapkan program siaran terbaik. Kedelapan kategori tersebut adalah Reality Show, Sinetron, Ceramah, Pencarian Bakat, Wisata Budaya, Talkshow, Kultum, dan Dokumenter. Selain itu, KPI juga memberikan penghargaan secara khusus terhadap televisi terbaik dalam menayangkan program syiar ramadhan.

Masih dalam rangka Anugerah Syiar Ramadhan, penghargaan juga diberikan atas 6 (enam) kategori pengisi acara di televisi. Penghargaan ini secara khusus diberikan atas kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk kategori sebagai berikut: Host Muda Inspiratif, Dai Muda Inspiratif, Penyanyi Muda Inspiratif, Aktor Muda Inspiratif, Program Televisi Inspirasi Pemuda Indonesia, dan Production House Inspirasi Pemuda Indonesia.

Selain itu, anugerah ini turut memberi penghargaan kepada siaran dengan kategori spesial syariah. Penghargaan ini diberikan KPI bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Ada tiga kategori yakni: Literasi Keuangan Syariah, Hijrah Menuju Tuntunan Syariah, dan Halal: Gaya Hidup Sesuai Syariah.

Anugerah Syiar Ramadhan 2019/1440 H menetapkan Net. atau Net TV sebagai televisi terbaik dalam Ramadhan 2019. Net TV dinilai memenuhi seluruh kriteria yang diinginkan para juri sebagai televisi ramadhan terbaik 2019. Penetapan Net TV sebagai televisi terbaik ramadhan disampaikan pada malam puncak Anugerah Syiar Ramadhan 2019 yang berlangsung di Menara Bank Syariah Mandiri, Senin, 15 Juli 2019.

Berikut Pemenang Anugerah Syiar Ramadhan 2019/1440 H: Kategori utama ASR 2019:

Televisi Terbaik Ramadhan 2019: Net TV, Kategori Program Sinetron: Para pencari Tuhan Jilid 12 “ganti nasib”/Eps.9 (SCTV), Kategori Program Kultum: Mutiara Hati Quraish Shihab (SCTV), Kategori Program Ceramah: Indahnya Ramdhan/Eps.13 Mei 2019 (TV One), Kategori Program Realty Show: Kupenuhi Panggilan-Mu/Eps. Budi - Difabel Pembuat Kaki Palsu (NET TV), Kategori Program Wisata Budaya Ramadhan: Muslim Travellers/eps. Jeju Korea Selatan (NET TV), Kategori Program Pencari Bakat: Akademi Sahur Indonesia (AKSI)/eps. 14-05-2019 (Indosiar), Program Talkshow: Halo Ustadz/17 Mei 2019

(Inews TV), Program Dokumenter: Menjemput Berkah (Trans7).

Kategori Muda 2019 ASR 2019: Dai Muda Inspiratif = Suwandi (AKSI Indosiar) Group Musik Muda Inspiratif = Aleehya, Host Muda Inspiratif = Muthia Amalia (Muslim Traveler - NET TV), Aktor Muda Inspiratif = Silvia Anggraini (PPT - SCTV), Production House Inspirasi Pemuda Indonesia = The Little Giantz (NUSSA - NET TV), Program Inspirasi Pemuda Indonesia = Titik Balik (iNews).

Kategori Spesial Syariah ASR 2019: Kategori Literasi Keuangan Syariah: Metro TV “Economics Challenges Special Ramadhan”, Kategori Halal Lifestyle = Net TV “Muslim Travelers”, Kategori Hijrah Lifestyle = Metro TV “Dakwah on The Spot”. ***

BAB VI

PENGAWASAN SIARAN POLITIK

A. Tahun Politik

Kehidupan politik di Indonesia paling aneh, paling absurd, paling unik, dan sekaligus paling sulit diramalkan. Demikian Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran: Deddy Mulyana menuliskan dalam bukunya *Komunikasi Politik* (2013). Kesimpulan Prof. Deddy Mulyana atas pemerhatian kehidupan politik di Indonesia memang benar. Salah satunya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang pada akhir masa jabatan DPR Periode 2009-2014 dinilai banyak masalah, sehingga dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 yang secara substansial mengembalikan Pilkada oleh DPRD. Namun, belum pun undang-undang tersebut dijadikan panduan penyelenggaraan Pilkada, Presiden Yudhoyono pada akhir masa jabatannya juga mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2014 yang kontra substansi. Presiden SBY mengembalikan Pilkada tetap secara langsung.

Undang-Undang Pilkada 2014 terganjal Perpu dan Perpu pun harus mendapat persetujuan DPR. Sembari pada awal-awal periodenya, DPR 2014-2019 pun disibukkan dengan problem internal. Padahal, tahun 2015 Indonesia harus menyelenggarakan sekitar 227 Pilkada: 11 Pemilihan Gubernur, 180 Pemilihan Bupati, dan 36 Pemilihan Walikota. Lima di antaranya di Jawa Barat: Pemilihan Bupati Pangandaran, Bupati Bandung, Bupati Indramayu, Bupati Karawang, dan Walikota Depok.

Drama politik unik yang sempat menguras pikiran, tenaga, bahkan dana rakyat untuk membuat undang-undang dan Perpu serta mengundang riak-riak ketidaksetujuan dari sejumlah elemen rakyat dan kegamangan KPU sebagai penyelenggara, berakhir dengan Pilkada kembali diselenggarakan secara langsung. DPR menyetujui Perpu No. 1 Tahun 2014 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kendati Pilkada kembali secara langsung tentu semua pihak

tidak berharap permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pilkada era lalu tetap terjadi. Visi DPR Periode 2009-2014 mengubah Pilkada kembali ke DPRD merupakan wujud kekesalan karena Pilkada langsung melahirkan banyak problem. Selain Pilkada langsung terlalu banyak menghamburkan dana rakyat melalui APBD, juga rentan konflik horisontal, makin mewabahnya money politics, rendahnya tingkat partisipasi, menumbuhkan politik dinasti, dan sejumlah problem lainnya. Bahkan, Pilkada langsung pun berujung pada tidak signifikannya antara pengorbanan yang diberikan dengan hasil yang didapatkan. Di beberapa daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada langsung banyak yang berakhir berseragam oranye KPK.

Realitas itu tentu harus dijadikan pembelajaran berharga. Pengalaman pahit Pilkada langsung masa lalu harus dijadikan catatan besar dengan membangkitkan semangat rezim Pilkada baru yang lebih baik. Cara Pilkada boleh sama diselenggarakan secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah masing-masing, tetapi berbagai perbaikan, dari mulai tahapan, prosedur, sampai menghasilkan pemimpin daerah, harus dilakukan. KPU, Bawaslu/Panwaslu, dan seluruh rakyat harus *move on*. Bukankah, visi Presiden SBY ketika menyodorkan Perpu No. 1 Tahun 2014 adalah mempertahankan cara Pilkada langsung dengan melakukan perbaikan berbagai lini yang menjadi problem pada Pilkada langsung sebelumnya.

UUD 1945 mengamankan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Oleh karena itu, kendati Pilkada diselenggarakan secara langsung, tetapi semangat demokratis harus tetap menjadi ruhnya. Dalam pandangan Surbakti (2008), setidaknya ada empat hal yang dapat dijadikan parameter untuk menakar derajat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan. *Pertama, predictable procedures*; Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan harus mengandung kepastian hukum).

Perpu 1 Tahun 2014 yang menjadi undang-undang belum cukup memadai untuk memberikan kepastian hukum karena merupakan produk proses politik yang disepakati dalam kompromi berbagai fraksi dan faksi di DPR, bahkan lahir dari ide Pemerintah SBY. Oleh karena itu, sangat memungkinkan mengandung banyak kekosongan hukum, ketentuan yang kontrakdiktif, dan mengandung tafsir ganda. Oleh karena itu, perlu diperbaiki, dijabarkan, dan dirinci, baik melalui berbagai perbaikan ketika

diundangkan, segera dibuat Peraturan Pemerintah-nya maupun yang lebih teknis dengan membuat Peraturan KPU.

Kedua, free and fair election; Pengaturan setiap tahap penyelenggaraan berdasarkan asas-asas demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, terutama yang menyelenggarakan Pilkada langsung tahun 2015 segera membuat aturan teknis yang selain memberikan kejelasan setiap tahapan juga memupuk asas Luber dan Jurdil. Seperti syarat baru yang ada pada Perpu 1 Tahun 2014 tentang Uji Publik yang belum memberikan rujukan yang pasti dalam penyelenggaraannya.

Ketiga, electoral integrity; Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada harus mendapat pengawasan pada setiap tahapan secara akurat dan tepat, sehingga hasilnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Perpu 1 Tahun 2014 memberikan tambahan amunisi bagi Bawaslu/Panwalu dengan adanya pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), sehingga kekurangan SDM pengawas yang selama ini sering menjadi alasan Bawaslu/Panwaslu tidak lagi harus menjadi persoalan. Hal itu tentu harus didukung dengan perangkat strategi pengawasan yang jitu yang berupa aturan atau apapun untuk memandu pengawasan pada setiap tahapan, sehingga efektif, efisien, tepat, dan cepat.

Keempat sistem penyelesaian sengketa memiliki prosedur yang jelas dan keputusan yang adil. Pilkada langsung merujuk Perpu 1 Tahun 2014 memiliki banyak sengketa: di antaranya sengketa antarpemilih, sengketa antarpeserta, sengketa antar-penyelenggara yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, sengketa tata usaha negara yang kewenangannya berada di PT TUN, dan perselisihan hasil pemilihan yang penyelesaiannya tidak lagi di MK (Mahkamah Konstitusi), tetapi berada pada Pengadilan Tinggi sampai ke MA.

Bagi Bangsa Indonesia, terutama bagi para penyelenggara Pemerintahan, lebih khusus lagi bagi penyelenggara Pemilu, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 merupakan pertarungan besar bagi penguatan proses demokrasi langsung. Desain demokrasi langsung yang terstruktur menuju pada demokrasi yang lebih efektif & efisien melalui visi pengintegrasian penyelenggaraan Pemilu, banyak bergantung dari citra Pilkada Serentak 2015 ini.

Pilkada 9 Desember 2015 harus dapat menjawab kegundahan politik sebagian rakyat dan politikus yang sempat “berpaling” pada pengembalian

“kedaulatan” DPRD. Mereka sempat meyakini bahwa Pilkada Langsung harus dihentikan dan dikembalikan kepada kewenangan DPRD. Bahkan, upaya mereka sempat merealitas dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 yang kemudian secara dramatis melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan berakhir pada UU No. 8 Tahun 2015 yang melegalkan Pilkada Serentak.

Oleh karena itu, tahun 2017 diselenggarakan juga pemilihan kepala daerah secara langsung di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang dikenal dengan Pilkada Serentak Gelombang 2. Sementara itu, Pilkada serentak gelombang 1 tahun 2015 diselenggarakan di 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota.

Tahun 2018, kehidupan kenegaraan Indonesia sangat istimewa ketimbang tahun sebelumnya, terutama dalam perspektif politik. Sejarah politik nasional telah mencatat 171 daerah menyelenggarakan Pilkada: 17 Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, 39 Pemilihan Walikota-Wakil Walikota, dan 115 Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, sehingga Presiden Joko Widodo pun menyebutnya sebagai Tahun Politik.

Tahun Politik bagi label 2018 tidak hanya karena diselenggarakannya 171 Pilkada Serentak, tetapi tahun ini pun masuk pada tahap krusial penyelenggara Pemilihan Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun politik berikutnya: 2019. Oleh karena itu, pada 2018, semua pemangku kepentingan Pemilu sedang berjuang berjibaku menuju sukses Tahun Politik, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) doble pekerjaan, Pemerintah pun harus optimal memfasilitasi dan menggelontorkan dana APBN & APBD dengan angka fantastik, dan seluruh rakyat pun harus konsen ikut berpartisipasi. Semua dilakukan dengan harapan, dua tahun politik: 2018 – 2019, Indonesia sukses dalam suksesi kepemimpinan, baik di daerah maupun di pusat.

Yang baru dan sangat urgen, Pilkada Serentak 2018 “rasa” Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Tidak hanya dalam konteks berhimpitannya tahapan, tetapi kemenangan di Pilkada Serentak 2018 dapat menjadi miniature bagi peta prediksi kemenangan merebut kursi legislatif dan puncak kursi eksekutif periode 2019-2024. Pada Pilkada Serentak 2018, Partai Politik dan para Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden mulai *warming up* untuk pertempuran Tahun Politik Kedua: 2019.

Yang sangat urgen harus dicermati dan dikawal bersama, Tahun Politik 2018 & 2019 harus berdampak positif bagi perkembangan bangsa dan negara ini karena akan banyak hal yang dikorbankan. Pilkada Serentak 2018 harus melahirkan pemimpin daerah yang mumpuni dalam berbagai aspek, sehingga dapat menjadi tumpuan bagi kehidupan rakyat di daerah untuk lebih baik; Pemilu Legislatif 2019 harus menghasilkan “senator” profesional yang selalu berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan rakyat; Pemilu Presiden 2019 harus menelorkan negarawan sejati untuk membawa negara dan bangsa ini pada puncak kegemilangan yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini.

Oleh karena itu, Tahun Politik: 2018-2019 tidak hanya dianggap seremonial untuk memenuhi hajat demokrasi, tetapi tahun yang sangat menentukan nasib bangsa, negara, dan rakyat. Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden 2019, tidak cukup hanya memenuhi prasyarat peningkatan kualitas demokrasi (Surbakti: 2008) dengan *Predictable Procedures* (semua aturan yang dibuat mengandung kepastian hukum), *Free and Fair Election* (Pemilu Luber & Jurdil), *Electoral Integrity* (pengawas menjamin hasil pemilihan sesuai pilihan rakyat), dan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Namun harus menghasilkan akselerasi yang maha dasyat bagi perbaikan berbagai lini kehidupan bangsa dan negara.

B. Konten Siaran Politik

Salah satu provinsi yang banyak menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2018 adalah Provinsi Jawa Barat. Selain pemilihan gubernur-wakil gubernur, di Jawa Barat pun diselenggarakan 16 kab./kota: Kota Cirebon, Sukabumi, Bandung, Banjar, Bogor, Kab. Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Subang, Bogor, Garut, Cirebon, dan Ciamis. Pilkada serentak Jabar 2018 lebih banyak ketimbang di provinsi lainnya, sehingga pihak-pihak yang terlibat pun jauh lebih banyak. Besarnya keterlibatan warga tergambar secara nyata dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang rata-rata 20 persen dari jumlah pemilih di Indonesia atau kisaran 31 juta jiwa lebih.

Pilkada Serentak 2018 pun tidak terlepas dari berbagai kerawanan, baik kerawanan pelanggaran maupun kerawanan konflik. Penyebabnya pun bisa saja yang pernah terjadi sebelumnya atau peristiwa baru. Secara kuantitatif Pilkada Serentak Jabar 2018 lebih banyak ketimbang 2015

yang diikuti lima kabupaten; 2017 hanya diikuti satu kabupaten serta dua kota. Persaingan semakin ketat karena berhimpitan pula dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Pilkada Serentak 2018 ikut menentukan kemenangan pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Apalagi Jawa Barat lumbung suara, sehingga sangat menggiurkan bagi setiap Parpol.

Realitas tersebut sangat dipahami banyak pihak, termasuk penyelenggara Pilkada Serentak 2018, sehingga muncullah gagasan untuk memperkokoh posisi melalui kerjasama positif dengan lembaga negara lain yang sama-sama memiliki komitmen sukses Pilkada Serentak Jabar 2018. Dibangunlah kesepakatan bersama antara KPU Jabar, Bawaslu Jabar, KPID Jabar, dan KIP Jabar. Keempat lembaga tersebut berkomitmen untuk mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam konteks memaksimalkan sukses Pilkada Serentak Jabar 2018.

Kendati peraturan perundang-undangan yang mengatur keempat lembaga itu berbeda, tetapi terdapat tugas pokok, fungsi dan kewenangan berarsiran yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. KPU & Bawaslu jelas lembaga penyelenggara Pilkada Serentak. KPI/KPID pun memiliki peran penting dalam Pilkada Serentak, terutama terkait dengan pengawasan lembaga penyiaran (televisi dan radio), sehingga pada P3-SPS pun terdapat pasal khusus yang mengatur siaran jurnalistik dan iklan Pilkada. Bahkan, secara khusus, baik KPI maupun KPID Jabar mengeluarkan surat edaran yang menegaskan posisinya dalam Pilrentak 2018.

Jauh sebelum tahapan penyelenggaraan Pilrentak 2018, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengedarkan surat imbauan kepada seluruh lembaga penyiaran agar dalam ikut serta menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 tetap menjaga independensi dan keberimbangan. Pun dalam menyiarkan program siaran jurnalistik dengan berbagai bentuk pemberitaan, harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik dan taat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Memang Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dengan tegas mengatur bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Lebih jelas tentang

siaran Pilkada/Pemilu diatur dalam Standar Program Siaran yang secara substansial menyuratkan kewajiban bersikap adil dan proposional terhadap para peserta Pilkada/Pemilu, dilarang memihak salah satu peserta Pilkada/Pemilu dan dibiayai atau disponsori oleh peserta Pilkada/Pemilu, kecuali dalam bentuk iklan. Program siaran pun wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Pilkada/Pemilu, baik yang dikeluarkan Pemerintah maupun penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur khusus tentang siaran pemilu, terutama dalam hal pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam 11 pasal dan 35 ayat. Secara substansial ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur perihal: a. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; b. Media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran; c. Pesan kampanye Pemilu Peserta Pemilu kepada masyarakat; d. Bentuknya tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang tepat diterima melalui perangkat penerima pesan; e. Keharusan patuh pada larangan kampanye; f. larangan pada masa tenang; g. Pemberian alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu;

Selain itu diatur juga tentang h. Ketentuan lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu; i. Penetapan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap peserta pemilu; j. Rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang; k. Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsanya atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat; l. Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran; m. Pelarangan menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye pemilu; n. Pelarangan menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu; o.

Pelarangan menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain; p. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye pemilu televisi untuk di setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi dan 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye pemilu.

Untuk substansi tersebut, dalam Pasal 296 ditegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. Berbicara KPI, tentu tidak terlepas juga berbicara KPID yang notabene memiliki wilayah pengawasan terkait konten siaran, termasuk siaran politik pada lembaga penyiaran yang daerah layanannya di provinsi tersebut.

Namun di balik sejumlah pelarangan tersebut, program siaran pun wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilu. Hal itu tentu berangkat dari kesadaran bahwa peran media massa, khususnya lembaga penyiaran tetap sangat penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Terlebih trend Pemilu di Indonesia, termasuk Pilkada dan Pilkada Serentak, angka partisipasi politik warga dalam memilih terus melorot. Oleh karena itu, semua pihak dan semua lembaga yang memiliki aksesitas yang tinggi terhadap publik harus didorong untuk ikut serta menyosialisasi Pemilu, termasuk lembaga penyiaran.

Pasca pembatasan kampanye "tradisional" dalam bentuk pesta rakyat arak-arakan ke jalanan, media massa dapat dijadikan sandaran bagi penguatan kognisi politik rakyat. Trend visi pemindahan kampanye dari pengerahan massa ke media massa, makin menguat. Realitas itu sudah berjalan dan telah membuktikan dapat meminimalisasi berbagai eksese negatif, seperti konflik horizontal sembari mengoptimalkan penguatan kognisi rakyat.

Hal itu menunjukkan pergeseran fase demokrasi mengarah pada praktek budaya demokrasi modern. Negara-negara yang menganut paham demokrasi modern lebih mengedepankan kampanye politik menggunakan teknologi informasi, khususnya televisi sebagai sarana kampanye yang efektif. Era reformasi mengedepankan demokrasi sebagai sistem politik nasional, sehingga mendorong Indonesia pada praktek-praktek fase demokrasi pada budaya demokrasi di negara asalnya. Demokrasi bukan produk asli negara-negara Dunia Ketiga, tetapi barang

yang “diimpor” dari Barat.

Dalam konteks komunikasi politik, menurut Blumler dan Gurevitch (1995), Amerika seringkali dianggap sebagai negara yang tingkat modernisasi komunikasi politiknya paling maju. Media demokrasi ala Amerika sering dianggap sebagai the role model untuk menjelaskan perkembangan komunikasi politik di negara-negara demokrasi Barat. Perkembangan gejala kampanye di banyak negara demokrasi, baik negara maju maupun negara berkembang, mengalami proses “Amerikanisasi”.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, sangat wajar jika praktek-praktek pase demokrasinya pun merupakan proses Amerikanisasi. Surbakti (2000) menyebutkan secara tersurat bahwa demokrasi langsung oleh rakyat yang terjadi di Indonesia memenuhi ciri-ciri Amerikanisasi Politik, yakni: 1) Penggunaan teknologi komunikasi, khususnya televisi sebagai sarana kampanye; 2) Kapitalisasi politik atau penggunaan uang dalam jumlah yang besar untuk kampanye; dan 3) Reduksi kompetisi politik menjadi kompetisi citra para calon. Ketiga hal itu nyaris ada dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Walaupun beberapa realitas membuktikan, perkembangan gaya kampanye politik di Indonesia dari jalan raya ke media massa disebabkan oleh beberapa faktor internal. *Pertama*, adanya pertimbangan pemerintah dan regulator mengenai faktor keamanan dan ketertiban. *Kedua*, adanya kepentingan partai politik untuk mencari cara kampanye yang paling efektif di tengah mepetnya waktu pendirian partai politik dengan masa Pemilu. *Ketiga*, makin percayanya elit politik pada efektivitas opini publik di media massa seiring dengan makin bebasnya pers di era reformasi (Danial: 2009).

Kepercayaan semacam itu muncul disebabkan relasi antara media dan kekuasaan di era reformasi sudah berubah. Media tidak lagi berada dalam tekanan pemerintah dan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan *civil society* bersifat resiprokal. Hal itu sebagai dampak dari melemahnya kontrol pemerintah terhadap pers; aturan-aturan pendirian media massa menjadi longgar, sehingga jumlah media massa membludak yang juga melahirkan TV swasta yang sudah akrab dengan iklan-iklan komersial. Mereka melihat iklan politik sebagai suatu lahan baru yang dapat digarap demi keuntungan komersial.

Realitas itu selain akan memberikan keuntungan banyak bagi optimalisasi sosialisasi penyelenggaraan berbagai event politik, di

antaranya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, dapat mendorong makin tidak sehatnya siaran politik. Jatuhnya sanksi sejak dini dari KPI terhadap sejumlah lembaga penyiaran sebelum tahapan Pilkada Serentak 2018, menjadi *warning* agar *stakeholder* siaran politik untuk lebih waspada.

Realitas itu juga dapat menjadi ranjau bagi lembaga penyiaran untuk terjebak pada ketidaknetralan. Siaran politik mereka akan cenderung didominasi oleh kepentingan politik tertentu. Apalagi sejumlah lembaga penyiaran di Indonesia telah mempertontonkan diri sebagai lembaga penyiaran milik pihak tertentu yang baik secara personal maupun kelompok menunjukkan entitas politik tertentu.

Hal itu menjadi tantangan berat bagi Penyelenggara Pilkada Serentak 2018. Oleh karena itu, KPU (D), Bawaslu/Panwaslu, KPI (D), dan seluruh masyarakat harus bergandengan tangan merapatkan barisan untuk menggagas regulasi yang dapat meminimalisasi akses negatif konten siaran politik. Mereka harus mengawal kewajiban lembaga penyiaran dalam ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui siaran politik dengan tetap konsisten pada netralitas dan independensi. Lembaga Penyiaran harus tetap berada pada kesadaran frekuensi yang mereka gunakan adalah milik publik sehingga harus digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan publik.

C. Kampanye di Lembaga Penyiaran

Sudah beberapa kali pesta demokrasi, termasuk Pemilu 2019, banyak lembaga penyiaran lokal hanya dapat mengurut dada; Pesta tinggal pesta, tetapi pendapatan tetap sepi, menguap ke Ibu Kota. Padahal, baik Undang-Undang Penyiaran maupun P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran) mengamanahkan, setiap lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup untuk konten Pemilu.

Namun, Teori Manajemen Media Massa mengajarkan, setiap sajian media massa harus mencerminkan keseimbangan antara idealisme dan finansial. Kewajiban menyajikan konten Pemilu harus diimbangi dengan anggaran operasional memadai. Faktanya, kewajiban menyajikan konten Pemilu justru diikuti dengan pelarangan program siaran dibiayai atau disponsori peserta Pemilu, kecuali dalam bentuk iklan.

Sementara itu, Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pun membatasi siaran iklan kampanye Pemilu di media massa hanya 21 hari

menjelang hari tenang. Bahkan, PKPU (Peraturan KPU) membatasi iklan kampanye di lembaga penyiaran lebih ketat lagi, terinci, dan rigid, sembari anggarannya "tidak jelas"; mengharuskan pembiayaan ditanggung KPU, sedangkan KPU pun tidak memiliki kemampuan yang memadai.

KPU dengan ketat mengatur iklan kampanye hingga hal-hal sangat teknis, mulai dari ketentuan hari penayangan, jumlah spot per hari, durasi penayangan per spot, hingga kebijakan fasilitasi anggaran yang sangat terbatas. Untuk peserta Pemilu calon Presiden-Wakil Presiden dan Partai Politik menjadi kebijakan KPU (Pusat), sehingga dipastikan memilih lembaga penyiaran nasional (Jakarta); Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kebijakan KPU Provinsi yang dipastikan memilih lembaga penyiaran di ibu kota Provinsi; sembari jumlah lembaga penyiarannya pun dibatasi. Sementara itu, sebagian lembaga penyiaran, apalagi lembaga penyiaran lokal yang berada di wilayah layanan kabupaten/kota gigit jari.

Padahal, dengan jumlah Parpol dan calon DPD banyak, lembaga penyiaran berharap mendapat kue pesta demokrasi iklan kampanye. Buktinya hanya mimpi. Berharap pada para calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD pun tidak kunjung datang karena mereka ketakutan dalam bayangan pengawasan Bawaslu yang kadang "mengebyah-uyahkan" calon Legislatif sebagai peserta Pemilu dan obyek pengawasan mereka. Padahal Undang-Undang Pemilu dengan tegas menyebutkan, peserta Pemilu 2019 yang harus menjadi obyek pengawasan Bawaslu adalah Calon Presiden-Wakil, Parpol, dan calon DPD.

Berbagai kebijakan pembatasan iklan kampanye Pemilu di media massa di antara waktu panjang masa kampanye Pemilu 2019 (23 September 2018–13 April 2019) cukup mengherankan. Padahal, dalam banyak perspektif, kendati sulit dapat mengubah pilihan, iklan di media massa cukup efektif sebagai saluran informasi di antara lemahnya pendidikan politik, jangka waktu sempit, berubah-ubahnya peraturan, dan minimnya program sosialisasi. Waktu 21 hari kampanye (24 Maret - 13 April 2019) di sela masa tenang menjelang hari pemilihan, cukup sempit untuk media massa mempengaruhi kognisi pemilih di antara luasnya wilayah, banyaknya penduduk, dan variannya tingkat pendidikan.

Padahal, pasca pembatasan kampanye "tradisional" dalam bentuk pesta arak-arakan ke jalanan, media massa-lah salah satunya yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan kognisi politik rakyat. Visi kampanye Pemilu kekinian mengubah behavior pengerahan massa untuk berpindah

ke media massa. Realitas itu cukup teruji karena telah membuktikan dapat meminimalisasi berbagai eksekusi negatif, seperti konflik horizontal sembari mengoptimalkan penguatan kognisi rakyat.

Kampanye di media massa bagi kehidupan politik nasional masih merupakan barang baru. Sampai 1997, Pemerintah masih menganggap, kampanye politik di media massa “berbahaya”. Pemerintah Orde Baru masih memberlakukan larangan terhadap Parpol untuk berkampanye di media massa melalui SK Menpen RI No.012/Kep/Menpen/1997, 3 Februari 1997 dan SK Mendagri No.07/1997 tentang Juklak Kampanye Pemilu, 30 Januari 1997.

Namun, sejalan dengan lahirnya Orde Reformasi, praktek demokrasi Indonesia pun bergeser mengarah pada praktek budaya demokrasi modern. Negara-negara yang menganut paham demokrasi modern lebih mengedepankan kampanye politik menggunakan teknologi informasi sebagai sarana kampanye yang efektif. Hal itu pun diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pada sejumlah Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, membatasi sebagian dari kampanye “tradisional”, misalnya, model rapat umum yang berpotensi terjadi pengerasan massa.

Kendati model kampanye sudah beranjak lebih ‘modern’, tetapi para regulator Pemilu tampaknya masih ragu, sehingga kebijakan pembatasan iklan kampanye di media massa masih diberlakukan. Bahkan, dilengkapi dengan ancaman-ancaman sanksi berat, sehingga peserta Pemilu acapkali ketakutan untuk tampil di lembaga penyiaran, walaupun bukan dalam bentuk iklan. Hal itu sangat berdampak makin lemahnya literasi politik rakyat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Pembatasan kampanye di lembaga penyiaran seperti itu tidak memiliki alasan yang memadai di antara lemahnya tingkat kognisi rakyat. Kebijakan membatasi kampanye di lembaga penyiaran yang berlebihan dapat dipersepsi sebagai upaya menghalangi perkembangan kognisi politik rakyat. Adanya peserta Pemilu yang berduit atau lahir dari pemilik lembaga penyiaran, sehingga dapat mendorong lahirnya media partisan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena secara teoretis dan historis kelahiran media massa partisan merupakan sunatullah.

Kendati begitu, bukan berarti juga ada pembiaran terhadap perilaku lembaga penyiaran tersebut. Secara umum, Indonesia sudah memiliki peraturan perundangan tentang lembaga penyiaran yang di

dalamnya mengatur pula tentang kadar objektivitas mereka. Bahkan, sudah dilahirkan juga “polisi” media massa, seperti Dewan Pers dan KPI. Secara khusus dalam konteks Pemilu, peraturan perundangan pun dengan tegas mengatur peran lembaga penyiaran dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya yang paling pokok harus bersikap dan berperilaku adil.

Oleh karena itu, langkah yang tepat yang sejatinya dilakukan penyelenggara Pemilu bukan membatasi kampanye di lembaga penyiaran, tetapi menguatkan skenario pengaturan teknis kampanye di lembaga penyiaran melalui kewenangannya dan berkoordinasi secara langsung dengan para “polisi” media massa sebagaimana konsepsi gugus tugas antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. ***

D. Debat Publik

Di Indonesia, fenomena debat publik muncul sejalan trend pemilihan pemimpin secara langsung. Debat publik yang acapkali ditayangkan langsung di layar kaca diasumsikan berpengaruh kuat terhadap perubahan perilaku pemilih, baik sebagai sarana sosialisasi politik, pendidikan politik, maupun partisipasi politik. Bahkan bagi para kandidat, debat publik dapat menjadi sarana marketing politik. Oleh karena ini, setiap Pilkada, termasuk dalam Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018, serta Pemilihan Presiden Tahun 2019, debat publik cukup mendapat perhatian, baik perhatian media massa maupun rakyat.

Walaupun debat publik yang terjadi selama ini belum ideal, tetapi sebagai langkah pemenuhan hajat demokrasi cukup mendapat apresiasi. Debat yang ideal sejatinya mempertandingkan dua pandangan yang berseberangan, yakni pandangan pihak pendukung (pro) dan pandangan pihak penentang (kontra). Sebagaimana debat calon Presiden Amerika Serikat yang mempertemukan dua kandidat dari Partai Demokrat dan Republik.

Debat dengan melibatkan lebih dari dua pasangan calon, sulit untuk dipertemukan. Dalam debat, setiap pasangan akan memiliki peran ganda: suatu waktu masuk pada pihak yang pro dengan sejumlah gagasan visi, misi, dan program kerja dan pihak lain sebagai yang kontra sehingga berperan meng-*counter* paparan-paparan pihak yang pro. Dengan seperti itu, masing-masing calon akan kelihatan kelebihan sekaligus kelemahannya. Dalam konteks inilah, rakyat pemilih dapat memberikan

penilaian sekaligus mendapatkan referen memadai untuk menentukan pilihan tepat di bilik suara.

Sejatinya, debat merupakan cara berkomunikasi khas masyarakat berkonteks rendah (*low contact communication*) yang individualis, liberal, lugas, berbicara apa adanya. Kemunculannya di Indonesia sebagai tindaklanjut import ideologi demokrasi. Di Amerika, salah satu bumbu demokrasi adalah debat. Namun, ketika debat ala Amerika dilakukan, seringkali menjadi kurang sinergis dengan budaya Indonesia.

Apalagi dengan kebanyakan karakter masyarakat Indonesia yang notabene lemah lembut, tidak ngotot dan tidak keras; bersikap baik terhadap pendatang '*someah hade ka semah*'. Karakter ini tercermin dalam setiap persaingan seperti halnya debat publik, orang Indonesia selalu tetap bersikap baik, walaupun terhadap lawan atau pesaing. Kendati pun kesal, orang Indonesia jarang mengungkapkannya secara langsung; paling menggerutu di dalam hati.

Oleh karena itu, setadinya banyak anggapan bahwa debat publik dalam konteks demokrasi Indonesia hanya sebagai bagian dari pase seremonial, sehingga tidak menjadi keharusan Pilkada menghadirkan debat. Andaikan dimainkan debat yang sebenarnya, belum tentu bersinergis dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahkan, dengan belum dewasanya pola pikir politik sebagian besar calon dan para pendukung, bukan hal yang tidak mungkin argumen yang cerdas dan kritik yang tajam malah dapat memperuncing konflik.

Hal itu tergambar dalam debat-debat yang dilakukan selama ini, termasuk juga dalam Debat Calon Gubernur DKI Jakarta, calon Gubernur Jawa Barat, bahkan debat calon Presiden Indonesia. Para calon seringkali terjebak pada kata-kata sarkasme yang tidak menukik pada persoalan program kerja calon lain, tetapi pada persoalan privat yang kadang tidak dilandasi data yang akurat, mengstereotifkan profesi tertentu yang dapat mengundang kemarahan pemilik profesi, mencontohkan pihak ketiga yang belum tentu benar.

Agitasi politik yang selama ini "milik" Amerika sudah mulai merambah wilayah komunikasi politik para calon kepala daerah dan calon presiden di Indonesia. Namun sayang, seringkali dibumbui sentimen-sentimen personal dan kelompok yang seharusnya tidak menjadi bahan perdebatan karena akan kontraproduktif dengan esensi debat publik di Indonesia untuk menumbuhkan partisipasi politik rakyat.

Debat publik di Indonesia bukan di Amerika. Debat publik di Indonesia seharusnya sejalan dengan **Model Persuasi Hugh Rank** yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) yang ada pada para calon serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif. Para calon dipandu untuk bersaing dalam kebaikan; Berlomba memaparkan, visi-misi, dan program yang baik, bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang baik, sehingga yang terpilih calon terbaik.

Para calon harus dihindarkan pada “kebiasaan” membully calon lain, sehingga mencari-cari keburukan calon lain untuk jadi amunisi debat publik, maka jadilah debat publik parade keburukan, sehingga siapapun pemimpin yang terpilih akan pemimpin yang sudah diketahui keburukannya oleh rakyatnya, sehingga wajar kalau rakyat selalu curiga, bahkan tidak percaya. Inilah di antaranya yang meruntuhkan wibawa kepemimpinan.

Makanya Islam mengajarkan debat pada wilayah “kehati-hatian” karena seringkali debat mendorong pada upaya memaksakan kehendak dan pendapat. Bahkan tidak jarang, dalam proses perdebatan muncul kata-kata melecehkan, meremehkan, dan menghina lawan bicara karena merasa pendapatnya satu-satunya yang paling benar. Debat demikian dapat juga menebar kebencian dan permusuhan (*mukhasamah*). Apalagi masyarakat Indonesia masyarakat patrilineal. Ketika pemimpinnya, idolanya, atau calonnya dihina di depan publik, maka yang marah grassroots pendukungnya. Debat seperti itu akan menjadi cikal bakal meletusnya konflik horizontal (*muqatha'ah*). Di panggung di antara calon boleh bersalaman cipika cipiki, tetapi di-grassroots, bisa sebaliknya. Maka hati-hatilah menyajikan debat publik.

E. Ancaman Informasi Hoax

Melejitnya teknologi informasi melalui internet di Indonesia memang sangat membanggakan sekaligus mengkhawatirkan. Keberadaannya banyak memberi manfaat sekaligus menyodorkan mudharat, sehingga gerakan ber-internet sehat dan cerdas pun terus masif. Euforia dunia maya dalam berbagai bentuk media sosial menembus sekat dan jarak: yang jauh dapat menjadi dekat yang dekat dapat menjadi jauh;

yang tua dapat mengaku muda yang muda dapat berperilaku seperti orang tua.

Teknologi internet mewarisi daya imajinasi manusia yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kendati tidak pernah keliling dunia, tetapi siapapun dapat merambah lekuk-lekuk seluruh wilayah dengan berselancar dari situs ke situs. Namun, ancaman dari makin merebaknya teknologi internet pun makin rentan, seperti makin bertebarannya informasi berkonten prasangka, bahkan bohong yang dapat menyesatkan yang trend disebut *hoax*. Berbagai informasi, baik dalam bentuk kata-kata verbal maupun gambar dan bentuk non-verbal lainnya yang setadinya benar, acapkali ditambah-kurang, direkayasa, bahkan bisa juga diputarbalik, sehingga menjadi berbeda.

Realitas itu didorong dengan makin membudayanya hobi *men-twit*, *meng-share*, *mem-broadcast*, *meng-up-load*, *mem-posting* pada masyarakat, sehingga informasi sekecil apapun dapat membesar menjadi heboh, gaduh, dan riuh. Ketika informasi itu bernilai positif akan dapat memberikan manfaat yang besar, tetapi sebaliknya, ketika prasangka dan kebohongan yang bersifat *hoax* akan cenderung menyesatkan.

Hal itulah di antaranya yang menguatkan banyak peraturan perundangan dan kode etik profesi yang terkait dengan pengaturan media massa, termasuk media sosial mengamankan pelarangan penyebaran “virus *hoax*”. Kendati belum memasukkannya dalam prinsip dan sebagai kewajiban, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamankan salah salah peran pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan **informasi yang tepat, akurat, dan benar**; Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tegas melarang **isi siaran bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong**; Pun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) **melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan** yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun menyuratkan larangan yang sama, Badan Publik **wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan**. Bahkan tiga dari keempat paket Undang-Undang Komunikasi itu pun mengkategorikan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan sebagai tindak pidana.

Dalam Ilmu Komunikasi dikenal pula Interpersonal Deception Theory atau teori kebohongan. Teori ini mengajarkan ganjaran negatif bagi komunikator pembongong. Teori kebohongan yang dikembangkan David Buller dan Judee K. Burgoon memberikan gambaran komprehensif tentang faktor komunikasi yang relevan dalam produksi pesan penipuan dan mendeteksi penipuan (Littlejohn, 2009).

Kualitas berkomunikasi ditentukan oleh ganjaran di antara pihak yang terlibat. Semakin tinggi derajat keuntungan (*rewarding*) yang didapatkan para pihak, semakin meningkat pula kualitas komunikasi, sehingga akan terjadi proses evaluasi terhadap lawan komunikasi, menghasilkan ganjaran positif atau sebaliknya. Ganjaran positif dapat berupa kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan; ganjaran negatif di antaranya dalam bentuk kebohongan yang dapat menurunkan kualitas komunikasi, seperti halnya penarikan dukungan terhadap pejabat politik karena ingkar janji.

Teori ini mengajarkan bahwa setiap orang itu komunikator, sehingga setiap apapun yang disampaikan akan mendapatkan evaluasi, baik secara personal maupun kelompok. Dalam konteks penggunaan media massa, ketika orang sering menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan, maka ia akan mendapatkan ganjaran Low-Reward Person yang dalam bentuk ril dapat menurunnya tingkat kepercayaan, penarikan dukungan, kehilangan teman dan sahabat, bahkan diadukan pidana ke yang berwenang.

Oleh karena itu, Islam mengkategorikan bohong itu dosa besar karena tidak hanya dapat menyesatkan orang lain, tetapi juga berdampak buruk bagi pelakunya. Para ulama bijak mengibaratkan, perilaku seseorang itu seperti melempar bola ke tembok yang akan kembali ke dirinya sendiri. Menyebarkan informasi hoax tidak hanya akan berdampak pada terpedayanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri.

Kekasih Allah Swt. dan panutan umat, Nabi Muhammad Saw. dalam sabdanya mengamanahkan bahwa keselamatan seseorang bergantung dari menjaga lisan. Dalam era teknologi informasi tinggi seperti sekarang ini, yang dimaksud lisan tidak sekedar percakapan komunikasi interpersonal dalam bentuk bahasa verbal, tetapi bahasa non-verbal yang diperpanjang dan diperluas melalui media massa, seperti halnya larangan ujaran kebencian dan menebar informasi menyesatkan.

Islam mengajarkan, dalam centang perenangny informasi, di antara fakta, berita, prasangka, gossip, dan fitnah yang dibingkai dan dibungkus teknologi yang tinggi, setiap orang perlu ekstra hati-hati, tidak asal memaknai dan mendiseminasi, tetapi harus *tabayun* (periksalah dengan teliti), dalam bahasa komunikasi konfirmasi *chek and recheck*. Apalagi jika informasi itu mengandung *zhan* (prasangka), lebih baik diam, tidak perlu ikut menyebarkan karena prasangka tidak sedikit pun memberikan faedah dalam kebenaran (An-Najm: 28). Dalam bahasa hukum dikenal istilah *pre judice* atau menghukum pada orang yang belum tentu bersalah atau dalam bahasa komunikasi *trial by the press*, sehingga diam dapat menjadi emas, hati-hati dan teliti dalam berbagi informasi itu lebih baik.

F. Keterbukaan Informasi Pemilu

Satu hal yang selama ini selalu menjadi problem menakutkan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah konflik. *Point entry* besar yang menjadi pemicu konflik dalam Pemilu di antaranya tuntutan keterbukaan informasi, terutama dari penyelenggara dalam menggelar setiap tahapan. Ketertutupan merupakan salah satu pemicu konflik karena dengan ketertutupan memungkinkan terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dapat dijadikan salah satu solusi dalam meminimalisasi konflik dalam Pemilu.

Sejatinya keterbukaan informasi menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu. Paling tidak sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu harus memiliki komitmen besar dalam mengimplementasikan KIP. KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Apalagi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegas menyebutkan dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu satu

di antaranya adalah **terbuka** selain juga **jujur** dan **akuntabel**. Prinsip tersebut tentu tidak hanya untuk menjadi lipstik semata, tetapi harus menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, ketika berbicara keterbukaan, maka Penyelenggara Pemilu sejatinya merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang KIP.

Apalagi dalam sejumlah pasal Undang-Undang Pemilu dengan tegas memerintahkan kepada Penyelenggara Pemilu untuk selalu mengumumkan sejumlah tahapan yang krusial. Penyelenggara Pemilu bukan hanya harus menyediakan informasi yang kontinyu dalam status informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala atau informasi yang wajib disediakan setiap saat, tetapi informasi yang wajib diumumkan serta merta. Misalnya, dalam tahapan penetapan DPT, terdapat kewajiban KPU untuk mengumumkannya sejak DPS sampai hasil pemutahirannya. Jika pengumuman tidak dilakukan, maka keabsahan DPT menjadi cacat.

Namun, amanah keterbukaan informasi bagi penyelenggara Pemilu tidak harus ditanggapi dengan “membabi-butu”, semua serba dibuka; dipublikasikan melalui media, tetapi harus juga disertai dengan upaya pertindungan terhadap pihak-pihak yang selayaknya informasinya dirahasiakan. Badan Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) memiliki tugas di antaranya melakukan pemilahan informasi.

Dengan pemilahan informasi, penyelenggara Pemilu akan paham substansi keterbukaan informasi yang ternyata bukan berarti seluruh informasi yang ada harus disampaikan kepada publik, terdapat informasi-informasi yang justru “harus dirahasiakan” yang dalam istilah Undang-Undang KIP sebagai informasi dikecualikan. Secara umum informasi yang dapat “dirahasiakan” tersebut adalah informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Penyelenggara Pemilu dapat menolak memberikan informasi jika informasi yang diminta termasuk informasi dikecualikan serta informasi tidak dikuasai atau belum didokumentasikan; Pemilahan informasi pun

sebagai salah satu upaya untuk melindungi penyelenggara Pemilu agar tidak “terjebak” pada indikasi pelanggaran ketentuan pidana Undang-Undang KIP, baik diindikasikan secara sengaja menghambat pemberian informasi maupun membocorkan (membuka) suatu informasi yang sejatinya harus “dirahasiakan”. Kedua pelanggaran itu sangat memungkinkan terjadi dalam setiap tahapan Pemilu yang sarat informasi.

Seperti halnya “tuntutan” terhadap informasi pribadi calon anggota Legislatif, KPU harus mengkajinya dengan saksama bahwa tidak semua informasi dalam profile calon anggota Legislatif adalah informasi terbuka, terutama bagi kandidat yang tidak sedang menjabat, baik sebagai pejabat negara maupun pejabat publik. Informasi (rahasia) pribadi kandidat yang masih “warga negara biasa” dilindungi berdasarkan Pasal 17 UU KIP, seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Penyelenggara Pemilu pun harus mengembangkan layanan informasi penyelenggaraan Pemilu ketika warga negara memerlukan. Dalam konteks ini pula, penyelenggara Pemilu harus menetapkan standar layanan informasi publik yang benar merujuk pada peraturan perundang-undangan KIP.

Kendati sempat terjadi silang pendapat di antara berbagai pihak terkait dengan jangka waktu layanan informasi. Peraturan perundangan KIP menetapkan terdapat jangka waktu layanan informasi yang harus menjadi rujukan baik bagi pemohon informasi maupun bagi Badan Publik. Misalnya, ketika pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik, maka Badan Publik harus segera memberikan respon paling lambat dalam jangka waktu 10 hari kerja. Jika tidak dilakukan, maka akan menjadi sumber sengketa informasi. Termasuk juga pada tahapan keberatan yang dapat dilakukan pemohon jika tidak ditanggapi dalam 10 hari kerja tersebut kepada pimpinan Badan Publik. Badan Publik wajib menanggapi dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Adanya jangka waktu yang cukup panjang tersebut dipersepsi oleh berbagai pihak cukup menghambat pemenuhan layanan informasi.

Apalagi dalam penyelenggaraan Pemilu yang notabene juga setiap tahapan diberikan jangka waktu pula, sehingga dapat tepat waktu dengan fokus hari H Pemilu. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat melakukan terobosan hukum dengan mensinergikan antara jangka waktu tahapan Pemilu dengan jangka waktu pemenuhan layanan informasi publik.

Dalam Per-KI No. 1 Tahun 2014 terdapat beberapa point yang krusial, di antaranya tanggapan atau pemberian informasi atas permohonan informasi kepada Penyelenggara Pemilu. Ketika warga negara memohon informasi kepada Penyelenggara Pemilu, maka harus mendapatkan tanggapan tidak lagi dalam jangka waktu 10 hari kerja, tetapi cukup 2 hari kerja. Begitu pun dalam mengajukan keberatan kepada pimpinan Badan Publik, tidak lagi 30 hari, tetapi Pimpinan Badan Publik diberi jangka waktu 3 hari kerja untuk menanggapi.

Hal yang sama dalam pengajuan sengketa informasi terhadap Komisi Informasi terdapat pemangkasan waktu, sehingga lebih cepat dan tepat sesuai tuntutan waktu tahapan Pemilu. Komisi Informasi tidak harus menyelesaikan sengketa informasi antara warga negara dengan penyelenggara Pemilu dalam jangka waktu 100 hari kerja, tetapi dapat lebih singkat. Pemangkasan waktu terjadi pada masa pendaftaran sengketa informasi, proses administrasi pendaftaran pada Panitia Komisi Informasi, sampai proses mediasi dan adjudikasi non-litigasi di Komisi Informasi.

Keberadaan peraturan tersebut cukup memberikan potensi untuk terwujudnya kualitas layanan informasi Pemilu pada Badan Publik Penyelenggara Pemilu. Selain yang lebih utama guna meningkatkan keterbukaan akses warga negara terhadap informasi yang dimiliki penyelenggara Pemilu, terutama yang terkait erat dengan setiap tahapan Pemilu. ***

BAB VII

PENGAWASAN SIARAN KONTEN LOKAL

A. Dominasi Konten Siaran

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama. *Pertama*, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. *Kedua* adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem stasiun berjaringan.

Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki lima kewenangan, dua di antaranya menetapkan dan menyusun regulasi penyiaran sebagai penjabaran dari substansi Undang-Undang Penyiaran. Regulasi yang dimaksud adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang disingkat P3 SPS.

Khusus mengenai konten lokal, Undang-Undang Penyiaran¹ mengamanahkan sistem berjaringan dalam sistem penyiaran Indonesia. Hal itu bukan hanya dimaksudkan pada tidak terjadinya monopoli penguasaan lembaga penyiaran, tetapi juga untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang berkonten lokal. Hal itu sangat urgen ketika faktanya siaran nasional dikuasai oleh televisi Jakarta yang notabene lebih didominasi oleh siaran berkonten Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Padahal, bicara Indonesia bukan hanya Jabodetabek, tetapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

1 Pasal 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Lembaga Penyiaran Jakarta, terutama televisi merambah wilayah siaran sebagian besar Indonesia karena memiliki daya jangkauan siaran nasional. Padahal frekuensi yang mereka gunakan adalah milik publik yang pengaturannya oleh Pemerintah dan pemanfaatannya harus diperuntukan kepentingan publik. Oleh karena itu, isi siaran yang ditayangkan oleh televisi Jakarta seharusnya bermuatan siaran yang juga mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan seluruh publik di Indonesia.

Seperti halnya siaran 17 televisi Jakarta yang nyaris memasuki seluruh wilayah Jawa Barat karena wilayah terdekat. Selain masyarakat Jawa Barat merupakan konsumen produktif dengan jumlah penduduk sangat banyak; seperlima penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Oleh karena itu, isi siaran televisi Jakarta yang menjangkau Jawa Barat seharusnya memberikan porsi konten lokal ke-Jawa Barat-an yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian Remotivi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, siaran 10 televisi Jakarta bersiaran nasional sumber siarannya 48% dari Jabodetabek, 7% internasional, dan 38% dari wilayah Indonesia di luar Jabodetabek. Persentase tersebut dibagi dalam 33 wilayah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga rata-rata provinsi hanya mendapatkan ruang pemberitaan 1,15%. Kendati Bogor, Depok, dan Bekasi merupakan bagian dari Jawa Barat, tetapi Jawa Barat juga memiliki Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu, yang seharusnya juga mendapatkan ruang siaran yang memadai.

Seharusnya, siaran televisi manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memberikan ruang siaran yang proporsional bagi isi siaran yang berkonten lokal ke-Jawa Barat-an alih-alih mencerminkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pasal 68 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) menegaskan, program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh siaran berjaringan per hari. Program siaran tersebut paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.

Jika televisi masih mempertahankan sentralistik penyiaran, tentu

amanah SPS tersebut tidak mungkin terpenuhi karena setiap provinsi harus dipenuhi minimal 10%, sehingga dengan 34 provinsi di Indonesia, lembaga penyiaran yang bersiaran nasional harus menyediakan 340% program siaran lokal. Agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan, setiap televisi yang bersiaran nasional harus menjalankan amanah UU Penyiaran dengan sistem siaran berjaringan. Jika hal tersebut dilakukan, lembaga penyiaran pun memiliki jatah siaran televisi 90%, boleh program siaran nasional, internasional atau dari negeri antah berantah sekali pun. Karena stasiun siaran berjaringan di 34 provinsi hanya memiliki jatah minimal 10% program siaran.

Namun, kondisinya sebagaimana diungkapkan Armando (2007)² televisi Jakarta mendikte isi siaran sesuai dengan selera Jakarta. Rujukan nilai isi siaran televisi adalah standard budaya Jakarta; Masyarakat daerah sama sekali tidak dapat memanfaatkan televisi sebagai sarana informasi mengenai daerahnya sendiri; Segenap keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertelevisian hanya bisa dinikmati oleh Jakarta. Pengiklan hanya perlu membayar stasiun televisi di Jakarta untuk kepentingan pemasaran produknya, tanpa perlu sedikit pun mengucurkan uang kepada daerah-daerah di luar Jakarta yang dijadikan sasaran penjualannya; Bisnis pertelevisian tersebut tidak menumbuhkan industri pendukung maupun lapangan pekerjaan di daerah luar Jakarta.

Hal itu tentu terjadi juga di Jawa Barat yang notabene jumlah “korban”-nya akan lebih banyak ketimbang provinsi lain karena memiliki penduduk yang besar, jaraknya lebih dekat dengan Jakarta, sehingga kemungkinan menerima siaran televisi Jakarta akan lebih tinggi. Mereka pun berhak mendapatkan program siaran lokal; mengenal potensi-potensi yang berada di sekitarnya. Jawa Barat pun merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber isi siaran yang sangat mungkin tidak kalah menariknya dari konten ke-Jakarta-an.

Di wilayah Jawa Barat terdapat lebih dari 100 seni budaya, 33 cagar budaya penting, 12 kampung adat, 30 musieum (Disparbud Jabar, 2015), dan sejumlah potensi lainnya yang sangat menarik untuk diangkat ke permukaan menjadi program siaran lokal, termasuk di dalamnya tempat wisata, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata kuriner.

Potensi tersebut dapat disajikan menjadi program siaran berkonten lokal yang berdimensi budaya populer dengan menggunakan tenaga

2 Mahi M. Hikmat: Konten Lokal di TV. Bandung: Pikiran Rakyat.2015

profesional lokal melalui PH (*Production House*) lokal yang juga kompetitif. Program siaran lokal, tidak berarti siaran yang berkonten lokal saja. UU Penyiaran dan P3 SPS pun menyuratkan tentang pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk di dalamnya SDM (Sumber Daya Manusia). Sasaran utama sistem penyiaran berjaringan di antaranya selain lahirnya program siaran berkonten lokal, juga memberikan kesempatan pada kreator-creator lokal untuk eksis dan berkiprah.

Dalam pandangan lain, program siaran pun harus memiliki visi finansial, artinya konten siaran apapun akan layak tayang jika memiliki nilai keuntungan ekonomis. Oleh karena itu, lembaga penyiaran pun kini kerap kali disebut industri penyiaran karena di dalamnya dominan visi finansial. Padahal harus diingat, baik secara teoretis maupun historis, lahirnya media massa, termasuk di dalamnya media penyiaran berangkat dari visi ideal untuk memberikan layanan pada publik, baik dalam fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, pewaris budaya, pencatat sejarah, dan kekinian muncul fungsi ekonomi.

Lahirnya fungsi ekonomi mendorong media penyiaran harus memiliki keseimbangan visi antara ideal dan finansial, bukan melahirkan dominasi serba nilai ekonomis, bahkan mendorong media kapitalis. Oleh karena itu, isi siaran yang sejatinya dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan publik yang harus diprioritaskan sembari menyeimbangkannya dengan aspek-aspek nilai ekonomis yang juga penting bagi pembiayaan operasional lembaga penyiaran.

Munculnya konten lokal pada televisi selain amanah peraturan perundang-undangan, penyiaran juga merupakan kebutuhan, keinginan, dan harapan sejati dari publik, sehingga harus menjadi prioritas bagi semua lembaga penyiaran. Sembari lembaga penyiaran pun dimungkinkan membungkusnya dalam sajian populer yang dapat mendatangkan keuntungan finansial. Harus disadari juga oleh semua pihak, media penyiaran adalah media global yang harus mengikuti tuntutan budaya populer. Di antara keridloan mereka untuk juga ikut melestarikan budaya adiluhung; budaya lokal, kita pun harus mengiklaskan mereka mengkreatnya, sehingga lahir lah sajian yang layak memiliki nilai ekonomi.

Sebagai contoh, tayangan Pilgub DKI Jakarta di TV Jakarta³ masif pada hampir seluruh wilayah Indonesia dengan variasi program acara, baik dalam bentuk berita, debat, talkshow, atau iklan. Oleh karena itu,

3 Mahi M. Hikmat: Jakarta Bukan Indonesia. Bandung: Pikiran Rakyat.2015

informasi Pilgub DKI selalu menjadi *trending topics* tidak hanya bagi kalangan *citizen*, tetapi juga dalam perciciran di warung kopi, pasar, dan tempat kerumunan masyarakat lainnya; tidak hanya bagi masyarakat Jakarta, tetapi juga di provinsi lainnya.

Program acara berkonten Pilgub DKI Jakarta berhasil mengangkat tahap demi tahap menjadi tontonan masyarakat lokal. Padahal, informasi Pilgub DKI tidak banyak memberikan manfaat langsung pada masyarakat lokal, termasuk pada upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di seluruh Indonesia. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin dominasi informasi Pilgub DKI menjadi *noise* bagi pendidikan dan sosialisasi politik Pilkada di daerah lainnya.

Indonesia bukan hanya DKI Jakarta, sehingga informasi Pilgub DKI minim manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih bagi 100 daerah lainnya yang juga menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015: 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, termasuk di antaranya 3 daerah di Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi . Bisa jadi, bagi rakyat di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, mereka lebih tahu nama calon dan visi-misi kandidat Gubernur DKI Jakarta ketimbang calon kepala daerahnya.

Data sementara hasil Pilgub DKI Jakarta 2017 menunjukkan tingkat keberhasilan luar biasa dalam angka partisipasi pemilih: rata-rata 78%; melampaui target nasional 77% dan melonjak dari Pilkada DKI lalu yang hanya 65%. Namun, hampir di seluruh Pilkada di 100 daerah, termasuk di Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Bekasi angka partisipasi pemilihnya rendah; di bawah target nasional.

Memang, informasi Pilgub DKI Jakarta mendapat porsi acara istimewa dari media penyiaran, terutama televisi Jakarta yang memiliki wilayah layanan luas dan kualitas gambar baik. Hal itu terjadi selain karena disebut-sebut “rasa” Pilpres dan sempat mengundang tokoh-tokoh nasional dan lokal populer untuk ikut bertempur, rating tayangan Pilgub DKI Jakarta pun cukup menjanjikan profit besar. Padahal, masih terdapat 100 Pilkada lainnya dan tujuh di antaranya Pilgub, yang sejatinya mendapat porsi yang proporsional dari TV Jakarta.

Sistem berjaringan dalam sistem penyiaran Indonesia sebagaimana amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimaksudkan di antaranya untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang

berkonten lokal. Hal itu sangat urgen ketika faktanya siaran televisi Jakarta lebih didominasi siaran konten Jakarta, padahal wilayah layannya hampir ke seluruh Indonesia, sehingga banyak pihak menyebutnya televisi nasional. Bicara nasional bukan hanya Jakarta, tetapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

TV Jakarta, merambah wilayah siaran sebagian besar wilayah Indonesia karena memiliki daya jangkauan siaran nasional. Padahal, frekuensi yang mereka gunakan adalah milik publik yang pengaturannya oleh Pemerintah dan pemanfaatannya harus diperuntukan kepentingan publik. Oleh karena itu, isi siaran yang ditayangkan televisi Jakarta seharusnya bermuatan siaran yang juga mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan seluruh publik di Indonesia.

B. Peran Lembaga Penyiaran Lokal

Lembaga penyiaran lokal yang memiliki peran dalam menyiarkan konten lokal ada dua, yakni LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) dan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta). LPPL dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat daerah. Apalagi daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak, seperti Jawa Barat, pendirian LPPL Radio dan Televisi cukup penting karena merupakan aset daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan visi dan misi daerah masing-masing.

LPPL Radio dan Televisi menjadi pusat informasi utama dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan masyarakat dalam rangka sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat, pengelolaan informasi daerah yang akurat, cepat dan handal yang akan menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas aparatur daerah, sekaligus di dalamnya informasi kinerja DPRD (Yantos, 2015).

Apalagi dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk

badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

LPPL TV dan Radio pemerintah daerah memiliki peran penting bagi perkembangan daerah, di antaranya: 1. Mengutamakan informasi secara aktual, kritis, bermutu dan berkembang dalam kerangka pembangunan masyarakat yang modern, beradat dan heterogen; 2. Menjadi motor penggerak positif kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan di daerah; 3. Menunjang dan menyukseskan visi dan misi daerah; 4. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat daerah; 5. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa; 6. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa dan daerah di tengah arus globalisasi; 7. Menyelenggarakan program siaran sesuai dengan budaya bangsa umumnya dan daerah khususnya dalam keberagaman yang ada di dalam masyarakat; 8. Meningkatkan citra positif bangsa pada umumnya dan daerah khususnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 pada Pasal 14 ditegaskan bahwa Isi siaran jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari. Kemudian pada Pasal 16 ditambahkan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

Ketentuan tersebut harus ditegakkan agar konten lokal ke-Jawa Baratan dapat berkembang baik. Hal itu berangkat dari kesadaran bahwa pengaruh isi siaran terhadap pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak cukup besar. Bahkan, akhir-akhirnya ini lembaga penyiaran sering dituduh sebagai salah satu aspek dominan bagi lahirnya pendapat, sikap, dan perilaku negatif, termasuk dalam konteks perkembangan budaya lokal.

Munculnya konten lokal pada lembaga penyiaran selain amanah

peraturan perundangan Penyiaran juga merupakan kebutuhan, keinginan, dan harapan sejati dari publik, sehingga harus menjadi prioritas bagi semua lembaga penyiaran. Sembari lembaga penyiaran pun dimungkinkan membungkusnya dalam sajian populer yang dapat mendatangkan keuntungan finansial. Harus disadari juga oleh semua pihak, media penyiaran adalah media global yang harus mengikuti tuntutan budaya populer. Di antara keridloan mereka untuk juga ikut melestarikan budaya adiluhung; budaya lokal, kita pun harus mengiklaskan mereka meng-kreat-nya, sehingga lahirlah sajian yang layak memiliki nilai ekonomi.

Seperti halnya sajian wayang golek yang manggung hanya dengan ikon si cepot, tanpa panggung dan nayaga, bahkan berpadu dengan ikon lainnya. Mungkin itu salah satu alternatif menyajikan konten lokal dalam kreativitas budaya populer. Hal yang sama bukan tidak mungkin dilakukan pada konten lokal lainnya yang memang layak tetap eksis dalam globalisasi informasi ini. Kalau tidak, mari kita tagih komitmen itu. Indonesia bukan hanya Jakarta; Aturan jangan hanya jadi pajangan; Konten lokal berhak eksis dalam hiruk pikuk pertelevisian Indonesia.

C. Wakil Rakyat dan Konten Lokal

Secara politis eksistensi DPRD terkait dengan aksesitasnya untuk mendorong makin meningkatnya konten lokal pada lembaga penyiaran, baik pada lembaga penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) maupun pada Sistem Penyiaran Lokal (SPL). Ketiga fungsi DPRD, baik dalam hal Pembuatan Peraturan Daerah, Pengawasan, maupun Penganggaran dapat diimplementasikan dalam penguatan konten lokal di lembaga penyiaran.

Untuk menguatkan konten lokal pada Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), DPRD dapat mengakses KPID. Aksesitas terhadap KPID lebih mudah bagi DPRD Provinsi karena KPID Provinsi adalah “anak kandung” DPRD Provinsi. Bahkan, setelah lahir pun KPID Provinsi masih memiliki sejumlah kewajiban terhadap DPRD Provinsi, sekaligus DPRD Provinsi pun memiliki kewenangan terhadap eksistensi KPID, misalnya, dalam hal fungsi pengawasan dan penganggaran.

KPID Provinsi memiliki kewajiban melaporkan segala bentuk hasil kerjanya kepada Gubernur dan DPRD, baik dalam hal menjalankan amanah tugas dan kewenangan maupun dalam hal penggunaan anggaran. Ketentuan ini pun dapat “dibalik” bahwa DPRD pun memiliki kewenangan untuk mengawasi, bahkan mengoreksi terhadap kinerja KPID. Bahkan,

jika terdapat kekeliruan dari kinerja KPID, bukan hal yang tidak mungkin DPRD pun memberikan tindakan, kendati tidak diatur bentuk tindakan apa yang dapat dijatuhkan pada KPID, minimal, peringatan bahwa KPID menggunakan anggaran Pemerintah Daerah sehingga kinerjanya harus lebih fokus pada kepentingan rakyat daerah.

Dalam konteks optimalisasi konten lokal pada lembaga penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), DPRD Provinsi pun dapat mendorong KPID Provinsi untuk “serius” dalam mengawasi konten lokal pada SSJ. Sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran (P3-SPS) bahwa setiap SSJ wajib menyajikan konten lokal pada wilayah layanan berjangkanya minimal 10 persen dari waktu siarnya. Oleh karena itu, jika ada lembaga penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) tidak taat pada ketentuan tersebut, KPID Provinsi dapat menindaknya dalam bentuk sanksi. Bahkan, KPID pun dapat menggagas pertemuan dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) untuk mengadakan kesepakatan bersama terkait pemuatan konten lokal tersebut.

Dalam konteks ini pula, DPRD dapat mendorong KPID untuk menjadi fasilitator dalam mempertemukan antara Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dengan instansi penyedia konten lokal, sehingga terjadilah hubungan yang saling menguntungkan. Masyarakat lokal, potensi dan sumber daya lokal terinformasikan pada Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) sekaligus menikmatinya, lembaga penyiaran SSJ pun memiliki konten lokal yang dapat saja diangkat dalam kreativitas tinggi pada budaya populer sehingga laya jual yang menghasilkan rating yang bagus.

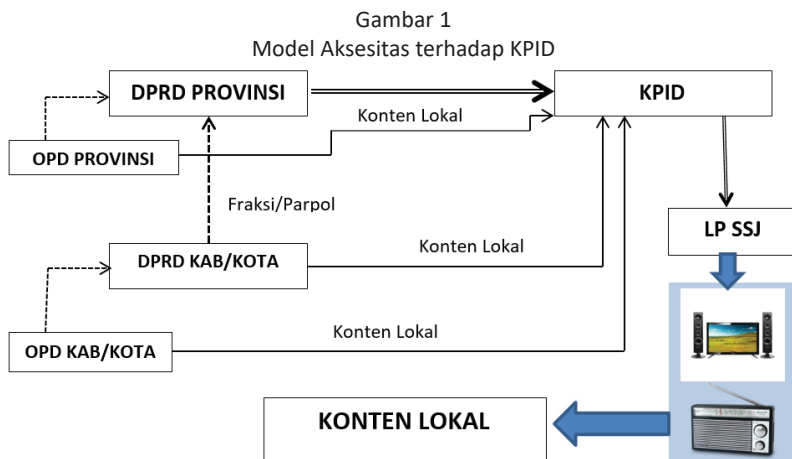
Pemanfaatan aksesitas DPRD Provinsi terhadap KPID pun tidak hanya dapat dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, tetapi juga dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota, kendati tidak dapat secara langsung dengan menjalankan ketiga fungsinya seperti DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota dapat langsung meng-akses KPID untuk melakukan kerjasama, dan hal yang sama dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota. Kendati kerjasama yang dibangun tidak dapat bersifat “vertikal” sebagaimana yang dapat dilakukan oleh DPRD Provinsi.

Pada dasarnya keberadaan KPID Provinsi bekerja untuk seluruh

masyarakat provinsi. Bahkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun ditegaskan bahwa KPID (KPID) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh karena itu, keberadaan KPID juga berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat (daerah) akan penyiaran. Dalam konteks inilah, DPRD Kabupaten/Kota sebagai wakil rakyat daerah kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang memutarakan roda Pemerintahan di Daerah memiliki aksesitas juga terhadap KPID.

Aksesitas DPRD dapat juga dibangun melalui jaringan Partai Politik dan/atau Fraksi yang ada di DPRD Provinsi. Kendati antara DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat hubungan “vertikal” secara langsung terhadap DPRD Provinsi, tetapi melalui jaringan Fraksi dan/atau Partai Politik hal itu dapat dilakukan. Melalui fungsi-fungsi DPRD Provinsi dengan atas aspirasi dari DPRD Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota, konten-konten yang diprogramkan dipromosikan melalui program-program lembaga penyiaran, dapat melalui KPID melalui pendekatan normatif terhadap Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang masih pada daerah layanan di daerah tempat KPID bertugas.

Secara sistematis paparan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Model Aksesitas Melalui KPID sebagai berikut:



Model kedua yang dapat dikembangkan dalam mendorong penyajian konten lokal melalui optimalisasi fungsi DPRD adalah melalui eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sebagaimana dipaparkan pada bahasan di atas (A & B) bahwa eksistensi LPPL sangat bergantung dari optimalisasi fungsi DPRD, baik fungsi Pembuatan Peraturan Daerah, Pengawasan, maupun Penganggaran. Jika ketiga fungsi DPRD tersebut tidak mengarah pada pembentukan, pemanfaatan, dan penguatan LPPP, maka LPPL pun tidak dapat hidup atau eksis di lingkungan masyarakat.

Sejak “mengandung” atau mengajukan perijinan, LPPL memerlukan support dari DPRD melalui Peraturan Daerah karena salah satu persyaratan pendirian LPPL adalah berbentuk badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam konteks inilah, selain Kepala Daerah, DPRD pun berperan penting dalam ikut mendorong berdirinya LPPL melalui optimalisasi fungsi Pembuatan Peraturan Daerah, misalnya, melalui hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah terkait pendirian LPPL ke Kepala Daerah, hingga mengawal menjadi LPPL.

Fungsi Penganggaran DPRD pun dapat dioptimalkan dalam mendukung operasional LPPL karena salah satu sumber anggaran LPPL adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, eksistensi LPPL pasca berdiri pun sangat bergantung dari DPRD dalam memberikan besaran anggaran oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, DPRD pun memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap LPPL, baik terkait dengan penggunaan anggaran APBD maupun terkait konten siaran yang disajikan oleh LPPL. Bahkan dalam batas tertentu DPRD dapat “mengintervensi” LPPL untuk eksisten konten lokal agar menjadi prioritas program siaran di LPPL, minimal sesuai amanah peraturan perundang-undangan dalam 60 persen dari seratus persen waktu tayang LPPL.

Namun kalau mencermati peraturan perundang-undangan terkait pengaturan frekwensi udara tentang wilayah layanan siaran bagi lembaga penyiaran, termasuk LPPL yang notabene berbeda dengan wilayah administrasi pemerintahan, perlu juga disikapi dengan strategi yang tepat. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas (A & B) bahwa Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Dalam logika Pemerintahan Administratif, Pemerintahan Provinsi dapat mendirikan LPPL yang daerah layanannya mencakup seluruh Kabupaten/Kota, sehingga jika akan mendesiminasi informasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang harus diketahui masyarakat dan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat menggunakan saluran informasi di antaranya LPPL. Oleh karena itu, LPPL dapat ditempatkan sebagai “corong” Pemerintah Provinsi, sehingga fungsinya berada pada wilayah kerja Dinas Komunikasi dan Informatika atau Biro Humas Setda Provinsi. Begitu pun di Kabupaten/Kota dapat didirikan LPPL yang fungsinya tidak jauh berbeda untuk mendiseminasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui masyarakat di wilayahnya sekaligus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kecamatan, bahkan sampai Kelurahan/Desa, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.

Namun logika tersebut tidak dapat terwujud dengan pengaturan wilayah layanan yang ada, sehingga mendirikan LPPL oleh Pemerintah Provinsi nyaris “sia-sia”. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kalau mendirikan LPPL karena posisi ibu kota provinsi di Bandung, maka daerah layannya LPPL-nya, baik jasa layanan radio maupun televisi, hanya sekitar Bandung dan sekitarnya atau sekitar diameter 20 kilometer dari pusat kota Bandung. Namun, kalau LPPL didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lumayan logis, maksudnya sangat memungkinkan seuruh wilayah kabupaten/kota dapat menjadi wilayah layanan LPPL, bahkan lebih. Itu pun tidak semua, seperti di Provinsi Jawa Barat, jika Pemerintah Kabupaten Bogor mendirikan LPPL sangat memungkinkan ada sebagian wilayah Kabupaten Bogor yang tidak terjangkau karena luasnya wilayah Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Realitas tersebut dapat disikapi dengan strategi. Yang utama yang menjadi misi Pemerintah Daerah, termasuk DPRD dalam mendorong konten lokal sekaligus konten melalui lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio lokal. Kalau di tingkat kabupaten/kota, DPRD sebaiknya mendorong Pemerintah Daerah untuk mendirikan LPPL, sehingga berbagai aksesitas DPRD Kabupaten/Kota yang terkait ketiga fungsinya perlu dioptimalkan sebagaimana dipaparkan di atas. Seperti di Jawa Barat sudah ada delapan kabupaten/kota mendirikan LPPL dan akan segera diikuti oleh Kabupaten/Kota lainnya.

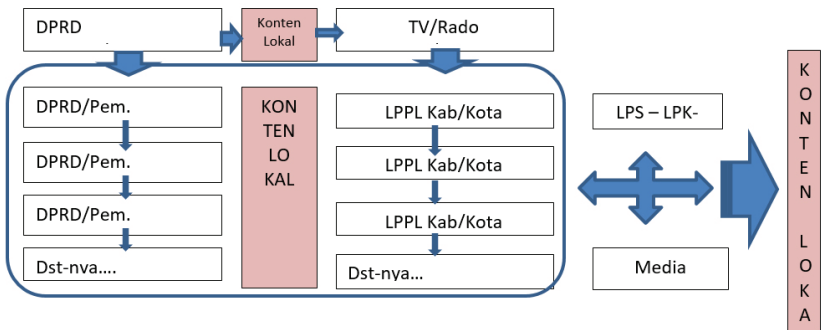
Namun untuk DPRD Provinsi, optimalisasi fungsi DPRD dalam

upaya mendorong penyajian konten lokal termasuk informasi tentang kinerja institusinya pada lembaga penyiaran lokal tidak menggunakan strategi mendirikan LPPL. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan lembaga atau bagian tertentu yang tugasnya menghimpun informasi terkait konten lokal dan informasi terkait institusinya yang sebenarnya tugas ini berada pada wilayah tugas Dinas Komunikasi dan Informatika atau Biro Humas. Namun, agar spesifik dan fokus dapat difungsikan dalam lembaga atau bagian khusus yang tetap berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Biro Humas. Hal itu di antaranya yang dilakukan oleh TV Parlemen, TV Mahkamah Konstitusi, bahkan yang profesional dan bersifat bukan nirlaba adalah CNN.

Pemerintah Provinsi dapat mendirikan TV atau Radio Pemerintah Daerah dan DPRD pun dapat melakukan hal yang sama seperti TV atau Radio Parlemen yang tugasnya mengumpulkan konten lokal dan konten tentang institusinya untuk disiarkan. Kemudian, Pemerintah Provinsi atau DPRD membuka jejaring siaran dengan LPPL yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga informasi tersebar sampai ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan jika, semua Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mendirikan LPPL. Namun, jika semua Pemerintah Kabupaten/Kota belum mendirikan LPPL, maka jaringan siaran dapat dilakukan dengan LPS, baik LPS Radio maupun Televisi sesuai kebutuhan wilayah layanan.

Secara sistematis paparan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Model Jaringan Siaran LPPL & LPS sebagai berikut :

Gambar 2
Model Jaringan Siaran LPPL & LPS



D. Pengawasan Konten Lokal

Makin banyaknya lembaga penyiaran mendorong pada perkembangan penyiaran menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang sangat penting. Untuk mengawasi penyiaran di Indonesia, sebagaimana isi Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan tingkat provinsi dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Dalam Pasal 8 disebutkan KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam ayat (2)-nya disebutkan pula bahwa KPI/KPID pun memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berbeda dengan isi media cetak sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 secara eksplisit menyiratkan bahwa lembaga sensor masih berlaku. Dalam Pasal 47 ditegaskan, “Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.”

Selain itu, yang penting mendapat perhatian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang juga merupakan konten utama yang harus diawasi oleh KPI/KPID adalah tentang Pelaksanaan Siaran pada Bab IV Pasal 36 :

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan mamfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang atau; c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar-golongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Walaupun tidak menjelaskan secara rinci, undang-undang ini pun memberikan petunjuk kepada KPI/KPID untuk membentuk Pedoman Perilaku Siaran sebagaimana isi Pasal 48. Dalam ayat (4)-nya dipaparkan bahwa Pedoman Perilaku penyiaran sekurang-kurangnya harus berkaitan dengan : a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b. Rasa hormat terhadap hal pribadi; c. Kesopanan dan kesusilaan; d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. Penyiaran program dalam bahasa asing; h. Ketepatan dan kenetralan program berita; i. Siaran langsung; serta j. Siaran iklan.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi

lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi system penyiaran nasional Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia pun membuat Standar Program Siaran yakni ketentuan yang ditetapkan Komisi penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.

Sesuai dengan amanah Pasal 4 Ayat (2) pada huruf c-nya bahwa KPI/KPID pun memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Salah satu yang harus diawasi oleh KPI/KPID adalah terkait dengan kewajiban menyajikan konten lokal.

Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran. Penyiaran dimaksud memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Merencanakan dan memproduksi program (mata acara); 2. Menyiapkan / mengadakan program; 3. Menyiapkan pola acara, baik harian (rundown), mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan seterusnya; 4. Menyelenggarakan siaran, baik artis maupun jurnalistik; 5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain; 6. Mengadakan kerjasama dengan *production house*; 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; 8. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Lembaga penyiaran manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memberikan ruang siaran yang proporsional bagi isi siaran yang berkonten lokal ke-Jawa Barat-an; mencerminkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pasal 68 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) menegaskan bahwa program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh siaran berjaringan per hari. Program siaran tersebut paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu

setempat.

Porsi kewajiban bersiaran konten lokal pada lembaga penyiaran lokal tentu lebih besar. Hal itu juga sama menjadi objek pengawasan KPID. Apalagi di Jawa Barat lembaga penyiaran lokal cukup banyak, dapat dikategorikan terbanyak di antara provinsi se-Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan besarnya animo masyarakat untuk mendirikan media penyiaran lokal. Pertama, Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Kedua, faktor otonomi daerah, adanya demokratisasi daerah menjadikan sentralisme kekuasaan dan kebijakan harus didistribusikan kepada daerah-daerah. Desentralisasi ini sudah barang tentu melahirkan peluang adanya kebijakan daerah untuk menentukan media penyiarnya sendiri. Ketiga, faktor kebutuhan informasi lokal, informasi sudah menjadi kebutuhan semua kalangan masyarakat tanpa kecuali masyarakat daerah. Masyarakat daerah inilah yang membutuhkan informasi yang lebih luas lagi kapasitasnya, tentang lokalitas informasi kedaerahannya sendiri. Suplai informasi ini akan kompatibel dan representatif diberikan oleh media televisi yang berstatus lokal. Keempat, pemerataan investasi, tidak bisa disangkal bahwa membangun dan mendirikan media penyiaran televisi tidak semata merupakan kebutuhan dari adanya otonomisasi dan desentralisasi yang tengah terjadi di seluruh daerah Indonesia, akan tetapi mendirikan media penyiaran merupakan lahan investasi yang cukup menjanjikan bagi kalangan masyarakat sekitar (Wahyudin, 2017).

Lembaga penyiaran lokal yang memiliki peran dalam menyiarkan konten lokal ada dua, yakni LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) dan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta). LPPL dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat daerah. Apalagi daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak, seperti Jawa Barat, pendirian LPPL Radio dan Televisi cukup penting karena merupakan aset daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan visi dan misi daerah masing-masing.

Untuk mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, serta wewenang, KPID Jawa Barat membagi struktur pelaksana tupoksi dalam tiga bidang, yakni: Bidang Kelembagaan yang konsen pada pembinaan Sumber Daya Internal dan literasi media untuk masyarakat eksternal, Bidang Infrastruktur yang konsen pada pelayanan perijinan lembaga penyiaran,

dan Bidang Pengawasan Isi Siaran yang konsen pada pemantauan, penerimaan pengaduan dari masyarakat, pemberian sanksi dan apresiasi terhadap konten siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran.

Keberadaan Bidang Pengawasan Isi Siaran diharapkan terwujudnya cita-cita dan tujuan Undang-Undang Penyiaran, yakni, memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu diwujudkan program pengawasan terhadap konten siaran, memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada publik untuk mengadukan konten siaran yang tidak sesuai dengan etika dan norma, serta memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang betul-betul memiliki komitmen dalam bentuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki lima kewenangan, dua di antaranya menetapkan dan menyusun regulasi penyiaran sebagai penjabaran dari substansi Undang-Undang Penyiaran. Regulasi yang dimaksud adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang disingkat P3 SPS.

Khusus mengenai konten lokal, Undang-Undang Penyiaran mengamanahkan sistem berjaringan dalam sistem penyiaran Indonesia. Hal itu bukan hanya dimaksudkan pada tidak terjadinya monopoli penguasaan lembaga penyiaran, tetapi juga untuk memberikan keadilan pada lahirnya siaran-siaran yang berkonten lokal. Hal itu sangat urgen ketika faktanya siaran nasional dikuasai oleh televisi Jakarta yang notabene lebih didominasi oleh siaran berkonten Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Padahal, bicara Indonesia bukan hanya Jabodetabek, tetapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Seharusnya, siaran televisi manapun yang menjangkau wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memberikan ruang siaran yang proporsional bagi isi siaran yang berkonten lokal ke-Jawa Barat-an alih-alih mencerminkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pasal 68 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) menegaskan, program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh siaran berjaringan per hari. Program siaran tersebut paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.

Berdasarkan Direktori Lembaga Penyiaran Berizin di Provinsi Jawa Barat (2015), jumlah lembaga penyiaran di Provinsi Jawa Barat 365 dengan rincian sebagai berikut LPS Radio 237, LPK Radio 62, LPPL Radio 8, LPK TV 3, LPS TV 55. Penelitian Hikmat dkk (2018) dengan fokus pada LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) yang berjumlah 237 radio dan 55 LPS TV. Karena jumlah LPS Radio SPL di Jawa Barat cukup banyak, maka penelitian itu memotret siaran lokal mereka dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan data melalui angket (kuesioner) yang menyajikan 10 pertanyaan ringkas. Kesepuluh pertanyaan tersebut untuk mengungkap: 1) Jenis lembaga penyiaran (SSJ atau SPL); 2) Jenis jasa lembaga penyiaran (LPP, LPS, LPK); 3) Domisili pemilik modal LP; 4) Bahasa pengantar siaran yang utama digunakan; 5) Lama siaran; 6) Penggunaan bahasa daerah; 7) Program acara berkonten lokal; 8) Sumber materi acara; 9) Waktu dan durasi siaran berkonten lokal; 10) Keberlanjutan siaran konten lokal.

Dengan jumlah populasi lembaga penyiaran di Jawa Barat 277 dalam penyebaran kuesioner diambil secara random dan menggunakan teknis sampling aksidental, sehingga terdapat 84 responden dari lembaga penyiaran di Jawa Barat yang berhasil mengisi kuesioner. Identitas responden sangat variatif, mulai dari top manajemen berjumlah 17 responden, middle manajemen 42 responden, dan low manajemen 25 responden.

Dari 84 responden 73 orang atau 86,90% mewakili Stasiun Penyiaran Lokal (SPL) dan 11 orang atau 13,10% mewakili Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Berdasarkan asal responden, dari 84 responden berasal dari tiga jasa penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) 69 orang atau 82,14%, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 9 orang atau 10,71%, dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) 6 orang atau 7,14%.

Dari 84 lembaga penyiaran di Jawa Barat yang dijadikan responden penelitian, ternyata 66 lembaga penyiaran atau 78,57% milik orang asli daerah (tempat lembaga penyiaran itu berdomisili), ada 9 atau 10,71% lembaga penyiaran milik konsorsium atau group media, ada 9 atau 10,71% milik orang DKI Jakarta, dan tidak satupun atau 0% lembaga penyiaran yang milik orang asing/luar negeri.

Data ini menumbuhkan harapan besar terhadap makin tumbuhnya konten lokal di lembaga penyiaran. 78,5% pemilik lembaga penyiaran di Jawa Barat adalah orang asli daerah tempat lembaga penyiaran itu

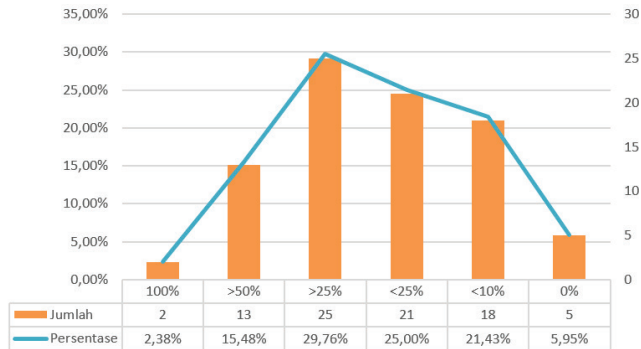
berdomisili, artinya mereka sangat memungkinkan memiliki *seen and belonging* terhadap konten lokal. Mereka diasumsikan akan memiliki komitmen positif untuk terus memberikan tempat pada konten-konten lokal yang ada di daerahnya; terdapat rasa kepedulian yang lebih tinggi pada hidup-matinya konten lokal.

Berdasarkan penggunaan bahasa pengantar dalam bersiaran, ternyata kondisi lembaga penyiaran di Jawa Barat variatif, walaupun perbandingannya cukup jauh, tetapi terbukti ada lembaga penyiaran di Jawa Barat yang menggunakan bahasa pengantar bahasa asing alih-alih Bahasa Inggris atau memadukan Bahasa Inggris dengan bahasa daerah. Dari 84 lembaga penyiaran di Jawa Barat yang menjadi responden, 36 atau 42,86% lembaga penyiaran menggunakan Bahasa Indonesia, 36 atau 42,86% lagi menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia, ada 7 atau 8,33% menggunakan tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Inggris), hanya 4 atau 4,76% lembaga penyiaran yang menggunakan Bahasa Daerah, bahkan ada 1 atau 1,19% lembaga penyiaran yang menggunakan pengantar Bahasa Inggris.

Dari durasi yang mereka miliki, 84 lembaga penyiaran yang menjadi responden dalam hal penggunaan bahasa daerah juga variatif, bahkan sangat kecil jumlah yang seluruh waktunya dipakai dengan siaran menggunakan bahasa daerah, yakni hanya 2 atau 2,38% lembaga penyiaran, sisanya, 13 atau 15,48% yang menggunakan bahasa daerah lebih dari 50%, 25 lembaga penyiaran atau 29,76% menggunakan bahasa daerah di atas 25%, tetapi di bawah 50%, ada 21 LP atau 25% menggunakan bahasa daerah kurang dari 25%, dan ada 8 LP yang menggunakan bahasa daerah di atas 10%, tetapi di bawah 25%, serta ada 5 LP atau 5,95% LP yang sama sekali atau 0% dalam penggunaan bahasa daerah.

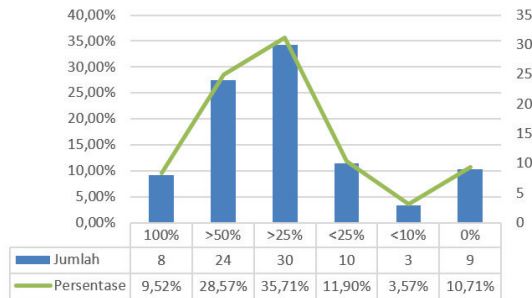
Dari 84 lembaga penyiaran di Jawa Barat yang dijadikan responden, hanya 8 atau 9,52% lembaga penyiaran yang memiliki program bermuatan lokal 100%, 24 atau 28,57% LP yang acara bermuatan lokalnya di atas 50% di bawah 100%, 30 LP atau 35,71% memiliki acara yang bermuatan lokal di atas 25% dan di bawah 50%, 10 atau 11,90% LP memiliki acara yang bermuatan lokal hanya lebih kecil dari 25% dan lebih besar dari 10%, 3 atau 3,57% yang memiliki acara bermuatan lokal di bawah 10%, sisanya ada 9 LP yang sama sekali tidak menyelenggarakan acara bermuatan lokal atau 0% konten lokal.

Gambar 3
Penggunaan Bahasa Daerah



Sumber : Hikmat dkk. (2018)

Gambar 4
Acara yang Bermuatan Lokal



Sumber : Hikmat dkk. (2018)

Namun, yang membanggakan bahwa lebih dari 97% dari 84 lembaga penyiaran di Jawa Barat yang dijadikan responden mengisi program suaranya dengan sumber materi inhouse Production, sedangkan sisanya 3% menyiarkan program acara hasil kerjasama, dan 0% tidak hasil akuisisi. Data tersebut dapat diasumsikan menggambarkan tingkat kreativitas insan penyiaran yang tinggi di Jawa Barat. Hal tersebut tentu menjadi potensi sumber daya penyiaran yang ke depan menjanjikan kondisi yang lebih baik daripada sekarang. Karena dalam *The art of broadcasting*, kreativitas dan inovasi merupakan ruh yang penting, harus ada, dan wajib dipertahankan. Insan penyiaran itu seharusnya orang yang kreatif.

Dalam mengawasi konten siaran, KPID Jawa Barat selain memiliki program, juga menggunakan strategi. Begitu pun dalam mengawasi

tayangan konten lokal, baik di Lembaga Penyiaran SSJ (Stasiun Sistem Jaringan) maupun pada STP (Stasiun Penyiaran Lokal). Selain melakukan pemantauan dengan merekam program, menerima pengaduan dari masyarakat, juga melakukan kegiatan lainnya, seperti *Focus Group Discussion* (FGD), *Workshop*, dan menyampaikan surat imbauan kepada lembaga penyiaran.

Sejumlah rekomendasi dari hasil FGD pun didapatkan dan sebagian sudah diimplementasikan melalui program kerja. Hasil FGD di antaranya mencatat rekomendasi terkait dengan optimalisasi pengawasan siaran konten lokal sebagai berikut:

Pertama, KPID Jawa Barat harus melakukan survey lebih mendalam tentang siaran konten lokal di lembaga penyiaran SSJ, sehingga memiliki data yang akurat per lembaga penyiaran. Hal itu penting sebagai bahan referensi untuk memberikan penguatan pada penegakan aturan konten lokal, termasuk di dalamnya jika KPID Jawa Barat harus menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dimaksud.

Kedua, KPID Jawa Barat harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran dalam penyajian konten lokal di Jawa Barat, sehingga konten lokal yang dimaksud yang disiarkan lembaga penyiaran sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan;

Ketiga, KPID Jawa Barat harus mendorong agar Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, melalui dinas-dinas terkait memberikan akses seluas-luasnya kepada Lembaga Penyiaran untuk menggali sumber daya dan konten lokal yang ada di daerah;

Keempat, KPID Provinsi Jawa Barat harus menjadi fasilitator, mempertemukan antara Lembaga Penyiaran dengan Dinas-Dinas terkait untuk penyajian konten lokal di Lembaga Penyiaran, sehingga terjadi kesepahaman dalam program untuk menguatkan konten lokal dalam penyajian di media penyiaran;

Kelima, KPID Jawa Barat harus mendorong Lembaga Penyiaran dalam menayangkan/menyiarkan konten lokal, tidak hanya terjadi pada aspek-aspek simbolik, tetapi juga harus mengangkat nilai-nilai ideologis dan social value yang terjadi pada masyarakat, termasuk di antaranya dalam penggunaan Bahasa Sunda dengan berdasarkan standar Bahasa Sunda yang baik;

Keenam, KPID Jawa Barat harus mendorong Lembaga Penyiaran

agar dalam menayangkan konten lokal sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, kehidupan masyarakat yang nyata dengan standar yang baik serta bahasa yang dapat dimengerti;

Ketujuh, KPID Jawa Barat harus mendorong bentuk CSR Lembaga Penyiaran yang siarannya masuk pada wilayah layanan Jawa Barat berupa kewajiban dalam menayangkan konten lokal.

Rekomendasi tersebut belum semuanya dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat dengan alasan terdapatnya berbagai kendala. Kendati faktanya di lapangan, kewajiban 10 persen konten lokal pada lembaga penyiaran SSJ sudah terpenuhi karena selain melakukan dari hasil rekomendasi tersebut KPID Jawa Barat pun pernah langsung meminta komitmen pada lembaga penyiaran SSJ melalui pertemuan langsung dan para pengelola lembaga penyiaran SSJ, terutama 17 televisi menyanggupinya. Namun, yang sekarang menjadi konsen KPID Jawa Barat, tidak hanya pemenuhan angka 10 persen siaran berkonten lokal, tetapi setidaknya terdapat tiga hal yang harus didorong sebagai tindak lanjut komitmen dengan lembaga penyiaran SSJ. Ketiga hal tersebut yakni:

Pertama, KPID Jawa Barat harus terus memantau guna memelihara keberlangsungan konten lokal 10 persen dari jam siaran yang sudah dipenuhi oleh lembaga penyiaran SSJ, sehingga lembaga penyiaran SSJ kontinyu memenuhi ketentuan tersebut.

Kedua, perlahan, tetapi pasti, KPID Jawa Barat harus menguatkan komitmen lembaga penyiaran SSJ dalam menyajikan konten lokal, sehingga sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, secara bertahap mengalami kenaikan atau penambahan jam tayang. Mereka harus diingatkan bahwa 10 persen dari jam siaran untuk konten lokal itu angka minimal. Peraturan perundang-undangan mengamanahkan secara bertahap jam siaran untuk konten lokal harus ditambah sampai angka 50 persen.

Ketiga, KPID Jawa Barat pun harus terus mengawal siaran konten lokal di lembaga penyiaran SSJ guna mendorong secara bertahap bahwa waktu tayangnya tidak lagi pada jam “hantu” atau pukul 12.00-03.00 yang notebene jarang sekarang penontonnya atau ratingnya sangat rendah. Peraturan perundang-undangan pun mengamanahkan bahwa siaran konten lokal pada lembaga penyiaran SSJ harus memenuhi 30 persennya ada pada *prime time* atau sekitar pukul 18.00-21.00 Wib.

Ketiga hal tersebut dapat menjadi fokus strategi KPID Jawa

Barat dalam melakukan pengawasan terhadap siaran konten lokal minimal 10 persen pada lembaga penyiaran SSJ. Strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui program dalam bentuk langkah-langkah implementatif sebagai berikut:

1. KPID Jawa Barat harus meng-*up date* survey siaran konten lokal yang ada pada lembaga penyiaran SSJ, sehingga didapat data yang aktual dan valid tentang tayangan konten lokal pada lembaga penyiaran SSJ, terutama 17 lembaga penyiaran televisi;
2. Data hasil *up date* survey tersebut menjadi dasar bagi KPID untuk mengirimkan surat himbauan, bahkan sanksi jika terbukti ada lembaga penyiaran SSJ yang tidak menyiarkan konten lokal atau menyiarkan tetapi durasinya masih di bawah 10 persen;
3. KPID Jawa Barat dapat melakukan pertemuan langsung dalam berbagai bentuk: silaturahmi, diskusi, FGD, atau kegiatan sejenis lainnya yang khusus mengundang lembaga penyiaran SSJ. Pada kesempatan tersebut, KPID Jawa Barat harus memaparkan hasil *up date* survey konten siaran lokal, sehingga setiap lembaga penyiaran SSJ diberikan kesempatan untuk menyanggah atau melakukan perbaikan, sehingga data hasil survey lebih akurat. Data hasil survey setelah mendapat perbaikan menjadi rujukan bersama, baik bagi KPID Jawa Barat maupun bagi lembaga penyiaran SSJ untuk membangun komitmen dalam hal: menambah waktu jam tayang dari 10 persen menuju 50 persen secara bertahap dan memindahkan sebagian program berkonten lokal pada *prime time* secara bertahap hingga mencapai 30 persen. Tidak perlu mempersoalkan kecepatan pencapaian, tetapi komitmen bertahap, sehingga terdapat dokumen yang memberikan rujukan kapan perintah peraturan perundang-undangnya itu terimplementasikan.
4. KPID Jawa Barat dapat membangun segi-lima komunikasi antara KPID, Lembaga Penyiaran, Pemerintah Daerah (dinas terkait), kelompok masyarakat strategis yang paham tentang kekayaan konten lokal di daerah, dan pengusaha yang konsen pada pelestarian konten lokal. Kelima pihak tersebut harus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dalam komitmen terus memupuk lahirnya program siaran berkonten lokal dengan menguatkan berdasarkan sumber daya dan potensi masing-masing.
5. Kelima pihak pun harus ikut mengawasi bersama tentang program konten lokal pada SSJ, sehingga tetap fokus taat pada peraturan

perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat bagi publik, terutama publik lokal.

Strategi untuk pengawasan konten lokal pada Stasiun Penyiaran Lokal (STP) beracuan pada kewajiban menyajikan konten lokal yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 ditegaskan, isi siaran jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari. Kemudian, durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari. Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olah raga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu. Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

Mengacu pada data kuantitatif hasil penelitian Hikmat dkk. (2018) bahwa ada 9 LPS Radio Lokal atau 10,7 persen yang tidak menyiarkan konten lokal dan terdapat 42 LPS Radio lokal atau 50 persen yang menyiarkan konten lokal di bawah 50% dari jam siar mereka. Hal itu dapat diasumsikan bahwa 50 persen lembaga penyiaran swasta radio lokal di Jawa Barat belum menjalankan kewajiban menyiarkan konten lokal alih-alih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Realitas itu menjadi kewajiban bagi KPID Jawa Barat untuk mengawasinya, bahkan memberikan sanksi sebagaimana wewenang KPID Jawa Barat.

Apalagi jika LPS Lokal tersebut tidak berdiri “mandiri”, tetapi merupakan anak perusahaan dari group media tertentu, sangat dimungkinkan mereka memiliki keterbatasan ruang untuk memprioritaskan siaran konten lokal.

Mengawasi penegakan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3-SPS

(Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran) merupakan tugas dan wewenang KPI/KPID, termasuk menyiarkan konten lokal. Terlepas, terjadi pelanggaran ataupun tidak pada lembaga penyiaran. Namun, mengacu pada kegiatan pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Barat, terutama untuk LPS Radio Swasta yang ada di luar Bandung Raya, tampaknya pekerjaan yang memerlukan strategi yang ekstra karena tidak hanya berkait dengan ketajaman program kerja dan kepiawaian para pemantaunya, tetapi juga penyediaan teknologi yang memadai untuk memantau sekitar 227 LPS Radio yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. ***

BAB VIII

APRESIASI PENYIARAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai regulasi cukup adil. Seperti halnya peraturan lainnya, UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada KPI dan KPID untuk melakukan pengawasan terhadap konten siaran, menerima aduan dari masyarakat terkait konten yang melanggar, memeriksa dan meminta keterangan lembaga penyiaran dan pihak lainnya yang terkait, serta menjatuhkan sanksi pada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Selain itu, UU Penyiaran pun memberikan kewenangan kepada KPI dan KPID untuk memberikan apresiasi pada lembaga penyiaran yang menghasilkan karya berprestasi, baik berdasarkan penilaian KPI atau KPID maupun apresiasi dari masyarakat.

Dalam menjalankan amanah untuk memberikan apresiasi pada lembaga penyiaran yang berhasil membuat karya yang berprestasi, baik KPI Pusat maupun KPID di seluruh Indonesia mengagendakan berbagai kegiatan. Kendati, realitas penyelenggaraannya bagi KPID - KPID di seluruh Indonesia sangat variatif: ada yang setiap tahun diselenggarakan, ada yang dua tahun sekali, atau diadakan tatkala dukungan anggaran ada. Namun, pada dasarnya seluruh KPID di seluruh provinsi di Indonesia sepakat agar setiap tahun ada kegiatan yang menunjukkan pemberian apresiasi terhadap prestasi lembaga Penyiaran.

Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (atau disebut juga sebagai Anugerah KPI: Pusat) adalah penghargaan penyiaran Indonesia yang dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Anugerah ini rutin diadakan sebagai bentuk apresiasi KPI atas kerja keras lembaga penyiaran yang berupaya menyuguhkan konten siaran yang menarik, tetapi tetap sehat dan berkualitas. Dalam Anugerah KPI, peserta yang berpartisipasi terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok lembaga penyiaran televisi berjaringan (baik publik maupun swasta), dan kelompok lembaga

penyiaran radio dan televisi lokal. Selanjutnya, program-program tersebut dinilai oleh tim juri yang independen, kredibel, dan ahli dalam bidangnya.

Untuk penjurian, Komisi Penyiaran Indonesia menggandeng beberapa orang yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran, dan melibatkan sejumlah lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia terutama terkait tayangan berbasis anak. Anggota KPI beserta beberapa orang yang ditunjuk tersebut bersama-sama dalam satu tim penjurian untuk memberi penilaian terhadap program penyiaran baik televisi maupun radio yang dinilai berkualitas dan edukatif.

Sebagai contoh, pada tahun 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelenggarakan Anugerah KPI pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019. Anugerah KPI sebagai bentuk apresiasi atas kerja insan televisi dan radio yang memiliki program siaran yang dinilai memenuhi syarat sebagai program tayangan yang sehat, edukatif dan berkualitas. KPI menerima 185 tayangan televisi dan 130 siaran radio untuk 16 kategori penghargaan. Untuk menilai 315 program itu, KPI meminta bantuan 21 orang juri dengan beragam latar belakang, seperti psikolog, sutradara dan kritikus film, praktisi perfilman, pengamat penyiaran, akademisi hingga anggota DPR.

Dalam penganugerahan itu, KPI memberikan penghargaan khusus kepada radio komunitas terbaik dan pemerintah daerah peduli penyiaran. Kategori program yang diikutsertakan dalam penganugerahan itu yaitu program anak, program animasi, kategori program drama seri, program film televisi dan dokumenter. Program dokumenter, ILM radio, program peduli perempuan, program ILM, program wisata budaya, program berita atau jurnalistik, program peduli disabilitas, program talkshow berita, program talkshow non berita, program peduli perbatasan dan daerah tertinggal untuk televisi serta program peduli perbatasan dan daerah tertinggal untuk radio. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada tokoh penyiaran untuk kategori pengabdian seumur hidup.

Di Provinsi Jawa Barat, KPID Provinsi Jawa Barat pun menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Penghargaan kepada lembaga penyiaran yang berprestasi yang diberinama KPID Jabar Award. Kegiatan tersebut diselenggarakan KPID Jabar sejak 2007 dan secara rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan KPID Jabar Award yang ke-13. Kegiatan itu sebagai bentuk apresiasi diberikan pada lembaga penyiaran radio dan

televisi di Jawa Barat yang telah menciptakan program-program acara siaran yang sehat, menarik, menghibur dan mendidik bagi khalayak masyarakat Jawa Barat.

Berikut ini catatan kecil yang dibuat penulis terkait penyelenggaraan KPID Jabar Award sepanjang lima tahun terakhir (2015-2019) yang sempat dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, Bandung.

A. KPID Jabar Award 2015

Memberikan penilaian terhadap ratusan karya kreator mumpuni bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu keberanian yang cukup untuk menerima kritik, sanggahan, masukan, saran, bahkan mungkin cemoohan. Jawa Barat, khususnya Bandung sangat dikenal sebagai lumbung subur para kreator hebat dalam berbagai bidang. Apalagi terkait dengan penyiaran, Jawa Barat telah melahirkan banyak talens yang banyak berkontribusi pada makin meriah dan berkualitasnya program siaran.

Tidak perlu tunjuk hidung, siapa-siapa talens asal Jawa Barat yang sukses menyedot perhatian khalayak karena menelorkan program siaran ber-rating tinggi atau tampil sukses memerankan skenario program siaran. Mereka membuktikan bahwa Jawa Barat memang lumbungnya para kreator penyiaran. Mereka pun ikut membawa harum Paris van Java ini.

Begitu pun dalam special event anugerah penyiaran KPID Jawa Barat Award 2015, tidak mudah bagi KPID Jawa Barat untuk menentukan program acara dan lembaga penyiaran yang layak mendapatkan anugerah. Kendati KPID Jawa Barat dibantu oleh Lima Dewan Juri yang independen, berpengalaman dan mumpuni di bidang masing-masing, tetapi bukan jaminan dapat memenuhi kepuasan para kreator penyiaran.

KPID Jawa Barat pun tidak dapat menjamin bahwa hasil penilaian obyektif seratus persen karena dalam Teori Obyektivitas, obyektif seratus persen itu hanya mimpi. Pada dasarnya semua hal yang terjadi di dunia ini tidak dapat terlepas dari nilai subyektivitas, baik subyektivitas individu maupun kelompok.

KPID Jawa Barat hanya dapat berikhtiar untuk menunjukkan komitmen, siapapun yang berprestasi layak mendapat penghargaan; Bahwa untuk menentukan program siaran dan lembaga penyiaran yang terbaik dari yang terbaik bukan pekerjaan yang mudah, tetapi dengan perjalanan panjang dan perdebatan maha alot; Menekan dalam-dalam

subyektivitas dan memunculkan tinggi-tinggi obyektivitas. Maka, lahirnya program siaran yang dianggap berhak mendapatkan anugerah Award versi KPID Jawa Barat.

Siapun yang mendapat anugerah, bukan itu yang menjadi tujuan pokok special event yang digelar 16 Oktober 2015 itu. Yang paling utama dari event ini adalah terbangunnya silaturahmi erat di antara masyarakat Jawa Barat, lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat plus yang wilayah layanannya memasuki Jawa Barat, Pemerintahan Jawa Barat, dan KPID Jawa Barat.

Event ini adalah hajat bersama man power penyiaran Jawa Barat, sehingga tema besar event ini adalah Menuju Jawa Barat Provinsi Termaju. Salah satu aspek yang dapat mendorong dan memberikan kontribusi pada Jawa Barat Termaju di antaranya eksistensi dunia penyiaran. Program siaran yang ada dan masuk pada wilayah Jawa Barat harus memberikan kontribusi positif pada pembangunan Jawa Barat; pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, sehingga seluruh man power penyiaran harus bersatu membangun silaturahmi.

Sejumlah ilmuwan sudah membuktikan, silaturahmi (komunikasi) berkait erat dengan kesehatan fisik. Stewart menunjukkan orang yang terkucil secara sosial cenderung lebih cepat mati. Kemampuan berkomunikasi (bersilaturahmi) yang buruk mempunyai andil dalam penyakit jantung koroner, dan kemungkinan terjadinya kematian naik pada orang yang ditinggalkan mati oleh pasangan hidupnya (Tubbs dan Moss, 1994).

Hasil penelitian Michael Babyak dari Universitas Duke dan beberapa rekannya dari AS dengan melibatkan 750 orang kulit putih sebagai sampel dan memakan waktu 22 tahun, menemukan, orang-orang yang berkomunikasi tidak efektif (tidak suka berteman, memusuhi, mendominasi pembicaraan) berpeluang 60% lebih tinggi menemui kematian pada usia dini dibandingkan orang-orang yang berperilaku sebaliknya; ramah, suka berteman, dan berbicara tenang. Bahkan. Hasil penelitian Lull dkk (dalam Tubbs & Moss, 1996) terhadap 100 perusahaan di AS: membuktikan juga bahwa 96 Persen orang percaya: ada korelasi yang pasti antara komunikasi dengan produktivitas kerja

Realitas itu, bagi umat Islam sudah merupakan keyakinan dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena tidak hanya Sabda Rasulullah, sejumlah ayat dalam Al-Quran pun dengan tegas menyuratkan pentingnya

memupuk tali silaturahmi. Allah Swt sangat tidak menyukai umat manusia yang bercerai berai dan memerintahkan untuk tetap menjalin kesatuan yang harmonis melalui silaturahmi (Ali-Imran:101-103).

Dalam konteks ini, harus menjadi catatan besar, permasalahan penyiaran yang berkembang akhir-akhir ini, misalnya, terkait tuduhan publik yang sering menyudutkan isi siaran sebagai sumber berbagai bencana. Kemerosotan akhlak, kenakalan remaja, memabahnya narkoba, masifnya minuman keras, seks bebas dan kekerasan terhadap anak, seringkali mengkambinghitamkan lembaga penyiaran.

Padahal, semua tahu lembaga penyiaran pun banyak memberikan kontribusi positif karena menjalankan fungsi pendidikan, informasi, dan juga kontrol sosial. Lembaga penyiaran adalah potensi bangsa yang besar yang juga dapat menjadi salah satu faktor penentu maju-mundurnya suatu negara, termasuk suatu wilayah seperti Jawa Barat.

Terlebih kondisi dunia penyiaran daerah pun tengah berada pada titik sulit karena terlalu dominannya lembaga penyiaran Jakarta yang sering disebut televisi nasional. Tidak sedikit televisi dan radio lokal yang kembang kempis, hidup segan mati pun tak mau karena mereka kehabisan kesempatan untuk mendapatkan kue iklan. Hal itu merupakan persoalan-persoalan bersama yang notabene dapat melemahkan kontribusi penyiaran pada penguatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Padahal, masyarakat berharap lembaga penyiaran pun dapat bangkit dan berkontribusi pada perbaikan nasib bangsa ini. Harapan itu akan menjelma di antaranya jika terbangun silaturahmi di antara para pengelola lembaga penyiaran, masyarakat, Pemerintahan Daerah, KPID, dan element masyarakat Jawa Barat lainnya. Oleh karena itu, mari... special event anugerah penyiaran KPID Jawa Barat Award 2015 imi jadikan momentum kebangkitan dunia penyiaran di Jawa Barat.

Pada tahun 2015, Malam penganugerahan KPID Jabar Award 2015 digelar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ballroom Hotel Papandayan, Jl. Gatot Subroto No. 83 Bandung. KPID Jabar Award 2015 yang diikuti oleh 97 peserta lembaga penyiaran radio 75 dan televisi 22 dari seluruh wilayah di Jawa Barat.

Keikutsertaan secara aktif untuk menjadi peserta KPID Jabar Award 2015, terlihat dari antusiasme lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang mengirimkan karya dengan jumlah keseluruhan

262 karya yang berasal dari 97 lembaga penyiaran radio dan televisi komunitas, swasta, dan publik. Kategori yang dilombakan pada tahun 2015, baik untuk radio maupun televisi terdiri dari enam kategori, yaitu: kategori feature dan dokumenter, kategori talkshow, kategori iklan layanan masyarakat (ILM), kategori berita, kategori musik etnik daerah, serta kategori program anak-anak. Selain itu. KPID Jawa Barat pun memberikan penghargaan Kategori Penghargaan Khusus: *Lifetime Achievement Award* untuk Kategori penyiaran *Radio Lifetime Achievement Award* untuk Kategori penyiaran Radio kepada tokoh penyiaran Jawa Barat melalui penghargaan Gubernur Jawa Barat atas prestasi dan dekasi terhadap kehidupan penyiaran di Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 001/SK/KPIDJABAR/9/2015, dalam penyelenggaraan KPID Jabar Award 2015, KPID Jabar mengangkat Dewan Juri Independen yang terdiri dari Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H.,M.Si., Dr. Intan Muntias,M. Si., Dr. Jaeni Wastaf,M.Si., Askurifa'i Baksin,S.Sos.,M.Si., dan Pepi Siti Paturohmah,S.S.,M.Pd.

Setelah melalui penilaian Dewan Juri tersebut, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan KPID Jawa Barat Nomor NOMOR: 002 /SK/KPIDJABAR/10/2015 menetapkan Lembaga Penyiaran Radio yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2015. Pemenang KPID Award Radio tahun 2015 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Musik Etnik Daerah Jawa Barat, dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2015 NOMOR: 002 /SK/KPIDJABAR/10/2015 PEMENANG RADIO KPID JABAR AWARD 2015 KATEGORI BERITA RADIO: Radio PR FM Bandung, Nama Program Citizen Report “Polisi Tambal Jalan”; KATEGORI FEATURE RADIO: Radio Gema Parahyangan Ciamis Nama Program Urang Sunda; KATEGORI TALKSHOW RADIO: Radio Dakta Bekasi Nama Program HUMAS PEMKOT BEKASI; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO: Radio Citra Suara Sukapura Tasikmalaya Nama Program Gas Elpiji 3 Kg; KATEGORI MUSIK ETNIK DAERAH JAWABARAT: Radio Cosmo Bandung Nama Program Sundut Maut; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK RADIO: Radio LPP RRI Bandung Nama Program Cerdik Cerdas dan Mendidik.

Keputusan KPID Jawa Barat Nomor NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/10/2015 menetapkan Lembaga Penyiaran Televisi yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2015. Pemenang KPID Award Televisi tahun 2015 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Hiburan (Seni dan Budaya Lokal), dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2015 NOMOR : 002 /SK/KPIDJABAR/10/2015 PEMENANG TELEVISI KPID JABAR AWARD 2015 KATEGORI BERITA TELEVISI: Televisi NET TV Bandung Nama Program NET Jabar; KATEGORI FEATURE TELEVISI: Televisi MTV Sumedang Nama Program Hajat Lembur; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI: Televisi Kompas TV Jabar Nama Program I Love Parahyangan; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TELEVISI : Televisi PAR TV Sumedang Nama Program Jaga Lingkungan; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: Televisi TVRI Jabar Nama Program Hariring; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK TELEVISI: Televisi MQTV Bandung Nama Program Cerita Anak Muslim

Lembaga penyiaran yang berprestasi tersebut selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari KPID Jawa Barat juga hadiah uang pembinaan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta) rupiah untuk lembaga penyiaran televisi dan Rp7.000.000 (tujuh juta) rupiah untuk lembaga penyiaran radio, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Radio diberikan kepada Ahmad Sutisna yang dikenal dengan panggilan Uwa Kepoh. Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Televisi diberikan kepada H. Us Tiarsa yang dikenal dengan panggilan Kang Uus. Mereka mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan KPID Jawa Barat Tahun 2015.

B. KPID Jabar Award 2016

Sudah selayaknya, setiap peraturan perundang-undangan memegang teguh prinsip keadilan. Tidak boleh ada satu pihak pun, baik secara individu maupun kelompok; baik personal maupun kelembagaan,

hanya dijadikan objek “penderita” suatu aturan, tanpa ada kesempatan untuk mereguk manfaat. Teori Ekonomi Hukum mengajarkan, selain mendapatkan punishment, objek hukum berhak juga mendapatkan reward sebagai akibat dari perbuatan hukumnya.

Pun Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang dikenal UU Penyiaran, menyuratkan prinsip keadilan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang secara tersirat sebagai “pengawal” UU Penyiaran, selain memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban membuat regulasi, mengawasi program acara, menerima aduan masyarakat terkait program acara yang disajikan lembaga penyiaran, bahkan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap kreativitas positif lembaga penyiaran.

Hal itu berangkat dari pemahaman filosofis bahwa tidak ada satu pun yang ada di dunia ini hanya memberikan satu sisi efek, tetapi selalu dobel-efek: positif dan negatif. Pun eksistensi lembaga penyiaran, satu sisi memang layak diwaspadai dapat memberikan pengaruh negatif pada kognitif, afektif, dan perilaku manusia, terutama anak-anak dan remaja yang berada pada wilayah usia rentan. Banyak sekali penelitian yang telah membuktikan bahwa media penyiaran, baik televisi maupun radio, memiliki keperkasaan untuk membolak-balikkan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia.

Namun pada sisi lain, eksistensi lembaga penyiaran pun memberikan kontribusi besar pada peningkatan nilai-nilai kognitif dan afektif manusia; dapat memandu dan memberikan rujukan pada arah berperilaku positif. Bahkan, yang lebih realistis, lembaga penyiaran pun dapat menjadi solusi dari sejumlah masalah sosial ekonomi yang berkembang di Republik ini, seperti meramaikan iklim usaha, penanggulangan pengangguran dan mendongkrak pendapatan negara.

Oleh karena itu, UU Penyiaran memperlakukannya dengan adil; satu sisi menciptakan pagar sebagai rambu-rambu terhadap program acara, sehingga tidak berdampak buruk pada masyarakat, tetapi pada sisi lain melindungi dan memberikan kesempatan pada lembaga penyiaran untuk tetap eksis berkreasi mengabdikan pada negeri.

Keadilan itulah di antaranya yang diimplementasikan KPID Jawa Barat dalam mengemban amanah peraturan perundangan penyiaran. Hal itu menjadi teramat penting karena jumlah media penyiaran di Jawa Barat

dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) memberikan Jawa Barat sebanyak 311 Kanal Frekuensi Radio FM. Jumlah ini adalah yang terbanyak se-Indonesia. Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk terjadinya sebuah peluang usaha.

Untuk televisi analog, baik stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF). Pada dasarnya frekuensi yang digunakan oleh televisi adalah pada kisaran 478 s/d 806 MHz UHF. Mengingat bahwa stasiun pemancar televisi membutuhkan pita frekuensi yang lebar karena harus membawa sinyal video dan sinyal audio (*Frequency Carrier*), untuk itu pemerintah membagi pengkalan televisi menjadi 41 kanal yang dibagi dalam 2 band yaitu Band IV (Kanal Bawah) dan Band V (Kanal Atas). Dari ke 41 kanal televisi tersebut, sesuai KM-76 tahun 2003, Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 11 wilayah layanan.

Dari pengalokasian kanal televisi tersebut, di dalamnya termasuk 17 TV berjaringan yang lazim oleh masyarakat disebut Televisi Nasional. Jawa Barat pun menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Sampai Juni 2016 terdapat 51 televisi lokal yang sudah berijin, ditambah 1 Televisi Publik, 3 TV Komunitas, dan 13 Radio Komunitas, sehingga di Jawa Barat kini hidup 533 lembaga penyiaran yang esok-lusa sangat mungkin bertambah.

Oleh karena itu, menjalankan amanah UU Penyiaran; membina lembaga penyiaran, bukan pekerjaan yang mudah. Selain melakukan pengawasan, pemantauan, menerima aduan masyarakat, dan menjatuhkan sanksi, KPID Jabar pun memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran dalam bentuk penganugerahan KPID Jawa Barat Award sekaligus menganugerahkan *Lifetime Achievement Award* kepada warga Jabar yang telah mendedikasikan eksistensinya bagi kemajuan dunia penyiaran di Jawa Barat.

Pada tahun 2016, penganugerahan KPID Jabar Award

diselenggarakan untuk yang ke-9 kalinya. Tema yang diangkat tahun 2016, Mendorong Lahirnya Insan Penyiaran yang Nyeni, Nyakola, Nyunda, dan Narigama. Insan Penyiaran yang nyeni dibuktikan dengan karya kreasi program acara yang memiliki nilai estetika yang tinggi, nyakola dibuktikan dengan karya kreasi konten siaran yang bernilai pendidikan dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu dan pengetahuan; Insan penyiaran yang nyunda ditunjukkan dengan program siaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, narigama membuktikan diri dengan karya program siaran yang sesuai dan sejalan dengan nilai agama, budaya, dan karakteristik Bangsa Indonesia.

Keempat variabel utama itulah yang memandu Dewan Juri dan Komisioner KPID Jawa Barat dalam menentukan indikator penilaian bagi program siaran yang layak mendapatkan Anugerah KPID Award Tahun 2016, baik dalam kreasi bentuk tayangan/siaran Seni dan Budaya Lokal, Berita, Feature, Talkshow, Program Anak, dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Semoga reward atas kreasi dan inovasi tinggi lembaga penyiaran yang nyeni, nyakola, nyunda, dan narigama, membawa angin segar menuju program siaran yang lebih sehat sebagai ruh idealisme media dalam menangkal derasnya ancaman kapitalisme media yang makin menjadi-jadi. (Pikiran Rakyat, 2016).

Pada tahun 2016, radio siaran yang ikut serta mengirimkan karya mereka untuk dinilai Dewan Juri adalah 58 stasiun radio yang terdiri dari 49 radio swasta dan 9 radio komunitas. Mereka mengirimkan 117 karya yang terdiri dari 29 berita, 39 talkshow, 25 hiburan seni budaya lokal, 14 program anak, 7 iklan layanan masyarakat, dan 3 siaran pendidikan dan seni budaya lokal radio komunitas.

Lembaga penyiaran televisi yang ikut serta mengirimkan karya mereka untuk dinilai Dewan Juri adalah 19 lembaga penyiaran yang terdiri dari 16 televisi swasta dan 3 televisi publik komunitas. Mereka mengirimkan 117 karya yang terdiri dari 29 berita, 39 talkshow, 25 hiburan seni budaya lokal, 14 program anak, 7 iklan layanan masyarakat, dan 3 siaran pendidikan dan seni budaya lokal radio komunitas.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 001/SK/KPIDJABAR/9/2016, dalam penyelenggaraan KPID Jabar Award 2016, KPID Jabar mengangkat Dewan Juri Independen yang terdiri dari Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiate, M.Si., Dr. H. Enjang A.S..M.Ag., M.Si., Eddy D.Iskandar, Yusef Puwasuganda, dan Agatha Lily,

M.Si.

Setelah melalui penilaian Dewan Juri tersebut, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan KPID Jawa Barat Nomor NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2016 menetapkan Lembaga Penyiaran Radio yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2015. Pemenang KPID Award Radio tahun 2016 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Musik Etnik Daerah Jawa Barat, dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2016 NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2016 PEMENANG RADIO KPID JABAR AWARD 2016 KATEGORI BERITA RADIO: Radio LPPL Kab. Bogor Nama Program Bogor hari ini; KATEGORI TALKSHOW RADIO: Radio MQFM Bandung Nama Program Bincang Pendidikan; KATEGORI HIBURAN (SENI BUDAYA LOKAL) RADIO: Radio GSP Pamanukan Subang Nama Program Kacapi Kongres; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK RADIO: Radio Lita FM Bandung Nama Program Tali Alit; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO KOMUNITAS: Radio CBS Cirebon Nama Program Permainan Anak; KATEGORI SIARAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN HIBURAN: Radio Komunitas Bunut Sukabumi Nama Program Hariring Peuting Lengser Jeung Panganten.

Keputusan KPID Jawa Barat Nomor NOMOR: 002 /SK/KPIDJABAR/11/2016 menetapkan Lembaga Penyiaran televisi yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2016. Pemenang KPID Award Televisi tahun 2016 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Hiburan (Seni dan Budaya Lokal), dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2016 NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2016 PEMENANG TELEVISI KPID JABAR AWARD 2016 KATEGORI KATEGORI PROGRAM ANAK TELEVISI: Televisi LPPL Kuningan TV Nama Program Dunia Anak (Lomba Kemerdekaan); KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: Televisi RCTV Cirebon Nama Program Ragam Pranatacara basa Cerbon; KATEGORI PROGRAM SSJ TELEVISI: Televisi NET TV Nama Program NET Jawa Barat;

KATEGORI BERITA TELEVISI: Televisi Bandung TV Nama Program Tanggara Pasundan; KATEGORI FEATURE TELEVISI: Televisi PJTV Bandung Nama Program Bandung Weekly; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI: Televisi TVRI Jabar Nama Program Sarasehan Komunitas Pecinta Stasiun Jabar; KATEGORI PROGRAM ANAK TELEVISI: Televisi LPPL Kuningan TV Nama Program Dunia Anak (Lomba Kemerdekaan); KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: Televisi RCTV Cirebon Nama Program Ragam Pranatacara basa Cerbon; KATEGORI PROGRAM SSJ TELEVISI: Televisi NET TV Nama Program NET Jawa Barat .

Lembaga penyiaran yang berprestasi tersebut selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari KPID Jawa Barat juga hadiah uang pembinaan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta) rupiah untuk lembaga penyiaran televisi dan Rp7.000.000 (tujuh juta) rupiah untuk lembaga penyiaran radio, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Radio diberikan kepada H. Demas Korompis yang dikenal dengan panggilan Kang Demas. Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Televisi diberikan kepada Dr. H. Dede Mulkan, M.Si. yang dikenal dengan panggilan Kang Dekan. Mereka mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan KPID Jawa Barat Tahun 2016.

C. KPID Jabar Award 2017

Panitia KPID Jabar Award 2017 berinisiatif menyodorkan Tema KPID Jabar Award ke-10 adalah *Pelangi Penyiaran untuk Jabar Harmoni* menjadi tema besar dalam penganugerahan KPID Jabar Award ke-10 tahun 2017 ini. Namun, penulis mempersepsi tema itu luar biasa, setidaknya dapat menjadi simbol bagi realitas yang berkembang pada dunia penyiaran kekinian.

Pelangi sering juga disebut bianglala yang merupakan gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna yang tampak di langit jika terjadi hujan ringan atau di sekitar air terjun yang deras. Pelangi adalah cahaya yang memancar dari perpaduan banyak warna (polikromatik) dari matahari. Mata manusia dapat menangkapnya dalam tujuh warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan violet.

Realitas pelangi seperti itu, seringkali dimaknai keindahan. Namun, keindahan yang tidak hanya satu, tetapi banyak, bisa tujuh, bahkan tak terhingga. Pun dunia penyiaran pada era ini yang penuh gemerlap keindahan: acaranya kreatif, inovatif, dan menarik; talennya cantik, tampan, lucu, kocak, dan menawan; kontennya kadang menggemaskan, menggelikan, sering juga menjengkelkan. Oleh karena itu, banyak yang mencaci nyaris benci, tetapi yang jatuh hati sampai tergila-gila dan kecanduan pun tidak sedikit.

Kuantifikasi lembaga penyiaran pun terus meningkat. Televisi, misalnya, kini bukan hanya analog yang terbatas frekuensi, ada digital yang menembus batas ruang dan waktu; streaming yang eksis bersama dunia maya. Terlebih penyiaran berlangganan yang hadir melalui satelit dengan sejuta chanel beragam acara. Mereka hadir dalam keseharian masyarakat; tinggal pijit remote, tersajilah program alternatif.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 13/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menhub No. 15/2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation), memberikan Jawa Barat sebanyak 311 Kanal Frekuensi Radio FM. Jumlah itu adalah yang terbanyak se-Indonesia yang terbagi dalam 83 wilayah layanan.

Di atas kertas, televisi analog yang terdata secara pasti, baik stasiun lokal maupun berjaringan sebagaimana diatur dalam Menkominfo No.76/2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF). Pada dasarnya frekuensi yang digunakan oleh televisi adalah pada kisaran 478 s/d 806 MHz UHF. Mengingat bahwa stasiun pemancar televisi membutuhkan pita frekuensi yang lebar karena harus membawa sinyal video dan sinyal audio (*Frequency Carrier*), untuk itu pemerintah membagi pengkalan televisi menjadi 41 kanal yang dibagi dalam 2 band yaitu Band IV (Kanal Bawah) dan Band V (Kanal Atas). Dari 41 kanal televisi, sesuai Kepmen No.76/2003, Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 11 wilayah layanan.

Dari pengalokasian kanal televisi tersebut, di dalamnya termasuk 17 TV berjaringan yang lazim oleh masyarakat disebut Televisi Nasional. Jawa Barat pun menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Sampai Oktober 2017 terdapat 55 televisi lokal yang sudah berijin, ditambah 1 Televisi Publik, 3 TV Komunitas, 237 radio

swasta dan 62 Radio Komunitas plus 47 TV digital serta 18 penyiaran berlangganan, sehingga di Jawa Barat hidup 536 lembaga penyiaran yang esok-lusa sangat mungkin bertambah.

Namun, banyaknya lembaga penyiaran tidak juga menjamin sajian program acaranya tidak mengandung unsur fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, mempertentang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), termasuk juga memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional sekaligus tidak memberikan perlindungan khusus pada khalayak anak-anak dan remaja (Ps.36 UU No.32/2002). Kendati mereka menjalankan fungsi menyampaikan informasi, mendidik, memberikan hiburan yang sehat, serta kontrol sosial, tetapi tak jarang berbungkus keberpihakan dan ketidaknetralan.

Oleh karena itu, UU Penyiaran pun mengamanahkan lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi (KPID). KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI/KPID dipilih melalui fit propes test yang dilakukan DPR/DPD, sehingga secara substansial KPI/KPID mendapatkan delegasi “kekuasaan” dari wakil rakyat untuk mengawal UU Penyiaran. Selain memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban membuat regulasi, mengawasi program acara, menerima aduan masyarakat terkait program acara yang disajikan lembaga penyiaran, bahkan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar, KPI/KPID juga memberikan apresiasi terhadap kreativitas positif lembaga penyiaran.

Eksistensi lembaga penyiaran, satu sisi dapat memberikan pengaruh negatif pada kognitif, afektif, dan konatif khalayak, tetapi pada sisi lain, dapat memberikan kontribusi besar pada peningkatan nilai-nilai positif; dapat memandu dan memberikan rujukan pada arah berperilaku positif; menjadi solusi dari sejumlah krisis, baik krisis budaya maupun sosial, ekonomi, dan politik, seperti mewariskan kembali budaya lokal yang nyaris punah, meramalkan iklim usaha, penanggulangan pengangguran dan menyosialisasikan proses politik. Itulah warna pelangi penyiaran di Jawa Barat.

Sebagai bagian dari media massa, penyiaran ibarat tombak bermata dua, pelanginya dapat memprovokasi memecah belah persatuan, tetapi

dapat juga menjadi perekat di antara majemukitas, sehingga tercipta Jawa Barat yang harmoni. Ibarat sajian musik dari beranekaragam alat, tetapi melahirkan suara indah, demikian K.H. Abdullah Gymnastiar menganalogikan perbedaan sebagai rahmat.

Hal itu merupakan cita-cita besar yang ingin dicapai KPID Jabar dalam Penganugerahan KPID Jabar Award 2017 yang puncaknya diselenggarakan Jumat, 17 November 2017. Di antara pelanginya karya kreatif insan penyiaran di Jawa Barat, semua fokus untuk mewujudkan Jawa Barat yang harmonis dengan memelihara konten lokal yang merupakan warisan budaya. Semua lembaga penyiaran, semua karya diberi kesempatan yang sama, tetapi Pleno KPID Jabar dan Dewan Juri fokus pada karya yang tetap mencintai Jabar sebagai sumber inspirasi.

Kategori disajikan dalam sajian Berita, Feature, ILM, Talkshow, Hiburan, dan Program Anak, tetapi yang juara yang lebih peduli pada pelangi siaran berkonten lokal budaya Jawa Barat dan yang mendorong Jawa Barat tetap menjadi provinsi harmonis, termaju, dan kahiji di antara provinsi dalam negeri. (Pikiran Rakyat, 2017).

Pada KPID Jabar Award 2017, KPID Jawa Barat memberikan penghargaan kepada karya terbaik yang disiarkan di radio lokal, televisi lokal, radio komunitas, dan lembaga penyiaran SSJ (Stasiun Sistem Jaringan) dalam 12 kategori. Ke-12 kategori tersebut terbagi pada televisi SSJ satu kategori: Program Konten lokal (Seni dan Budaya Lokal) dalam bentuk Feature atau Dokumenter, pada televisi lokal: siaran berita, feature dan dokumenter, talkshow, dan program anak, pada radio lokal kategori: siaran berita, talkshow, hiburan (seni dan budaya lokal), iklan layanan masyarakat, dan program anak, serta pada radio komunitas kategori iklan layanan masyarakat.

Dengan jumlah peserta seluruh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat, jumlah karya yang masuk ke meja panitia yang layak dinilai 124 karya yang disiarkan di radio dan 53 karya yang ditayangkan di televisi. Karya tersebut dinilai dengan bobot 70% oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari: Prof. Dr. Hj. Atie Rahmiate, Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga (KPI Pusat), Dr. Harlyantara, M.Si., Nursyawal, S.Sos.M.Ikom, dan Dr. Usman Supendi, M.Pd. Sementara itu, bobot 30 dinilai dari *tract record* lembaga penyiaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS).

Acara puncak penganugerahan KPID Jabar Award ke-10 akan diselenggarakan pada Jumlat, 17 November 2017 di Grand Hotel Asrilia Jalan Pelajar Pejuang Bandung mulai pukul 19.00 dengan menghadirkan sejumlah artis ternama, baik artis nasional maupun lokal, di antaranya: Inka Christie, Dani Java Jive, Rika Rafika, Aerli Rasinah (Cucu Maestro Tari Topeng Indramayu: Mimi Rasinah), The Mister, Saesada (Tari Kaulinan Budak Lembur) dangan diiringi Sweet Java Band.

Setelah melalui penilaian Dewan Juri tersebut, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan KPID Jawa Barat Nomor: 002/SK/KPIDJABAR/11/2017 menetapkan Lembaga Penyiaran Radio yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2017. Pemenang KPID Award Radio tahun 2017 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Musik Etnik Daerah Jawa Barat, dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2017 NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2017 PEMENANG RADIO KPID JABAR AWARD 2017 KATEGORI BERITA RADIO: Radio LPPL Kuningan; KATEGORI TALKSHOW RADIO: Radio PR FM Bandung; KATEGORI HIBURAN (SENI BUDAYA LOKAL) RADIO: Radio Sindo Tri Jaya FM Bandung; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK RADIO: Radio Republik Indonesia Bandung; IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO SWASTA: Radio Dahlia FM Bandung; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO KOMUNITAS: Radio CBS FM Cirebon.

Keputusan KPID Jawa Barat Nomor NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2017 menetapkan Lembaga Penyiaran televisi yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2017. Pemenang KPID Award Televisi tahun 2017 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Hiburan (Seni dan Budaya Lokal), dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2017 NOMOR: 002/SK/KPIDJABAR/11/2017 PEMENANG TELEVISI KPID JABAR AWARD 2017 KATEGORI PROGRAM ANAK TELEVISI: TVRI Jawa Barat; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: Net TV Jawa Barat; KATEGORI BERITA TELEVISI : RCTV

Cirebon; KATEGORI FEATURE TELEVISI : Bandung TV; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI : I New's TV Jawa Barat; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: MGS TV Bogor.

Lembaga penyiaran yang berprestasi tersebut selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari KPID Jawa Barat juga hadiah uang pembinaan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta) rupiah untuk lembaga penyiaran televisi dan Rp7.000.000 (tujuh juta) rupiah untuk lembaga penyiaran radio, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Radio diberikan kepada H.Kuswadijaya Jamhari yang dikenal dengan panggilan Mang Jaya. Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Televisi diberikan kepada Hj. Popong Otje Djununan yang dikenal dengan panggilan Ceu Popong. Mereka mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan KPID Jawa Barat Tahun 2017.

D. KPID Jabar Award 2018

Di negeri-negeri maju yang sarat akan prestasi, *reward* lebih berharga daripada punishment. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar aturan acapkali tidak menghasilkan kejeraan, malah seringkali menumbuhkan dendam dan kecanduan. Dendam pada para penjatuh sanksi dan kecanduan memantapkan kualitas pelanggaran. Oleh karena itu, prestasi indikator para pengawas dan penegak hukum, bukan banyaknya angka pelanggaran, tetapi makin meluasnya kesadaran; Mereka lebih mengedepankan pre-entif dan preventif daripada tindakan.

Apalagi dalam dunia kreatif dan imajinatif yang sarat dengan inovatif dan perspektif, semua ditakar tidak dengan benar-salah; baik-buruk. Nilai-nilai yang berlaku adalah keberterimaan (*social value*). Kebenaran adalah dukungan mayoritas yang dalam kajian Filsafat dilabelkan sebagai kebenaran kuantitatif, sehingga metode survey dijadikan rujukan utama.

Jika dicermati secara saksama, dunia penyiaran di Indonesia tanpanya mengarah ke realitas tersebut, sehingga penamaannya pun industri kreatif; kreativitas menjadi komoditas utama. Demokratisasi penyiaran pun terus berkembang pesat, sehingga sebagian program siaran pun lebih *public oriented*. Hal itu memang sejalan dengan ajaran konstitusi Indonesia yang menempatkan informasi sebagai hak yang

harus didapatkan warga negara sebagaimana amanah Pasal 28F UUD 1945. Kehadiran lembaga penyiaran sebagai saluran informasi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara akan informasi.

Oleh karena itu, setidaknya kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) hanya bertindak selayaknya pemadam kebakaran; bergerak jika ada khalayak yang mengadu; pun Dewan Pers terkait siaran jurnalistik. Sememntara itu, di hulu-nya, aktif LSF (Lembaga Sensor Film) dengan kewenangan menetapkan lulus-tidak lulus sensor bagi film, sinetron, iklan, video clip, dan sejenisnya. Namun, KPI/KPID lebih aktif karena diberi amanah regulator: menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang selanjutnya menjadi buku putih bagi program pengawasan konten siaran. KPI-KPID tidak hanya menunggu aduan publik, tetapi juga aktif mengawasi pelaksanaan UU Penyiaran, dan P3-SPS.

Hal itu berangkat dari pemahaman bahwa UU Penyiaran dan P3-SPS hadir bukan untuk membelenggu kebebasan kreativitas dan imajinitas insan penyiaran, tetapi untuk melindungi publik dari “kewenangan-wenangan” lembaga penyiaran yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, UU Penyiaran pun suara publik yang didelegasikan melalui Pemilu pada wakil rakyat di DPR dan Pemerintah yang dipimpinin Presiden hasil Pemilu Langsung.

Begitu pun P3-SPS, selain melalui tahapan uji publik, dalam UU Penyiaran pun dengan tegas disebutkan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Bahkan ditegaskan kembali, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi, yang jelas kedua lembaga negara tersebut mendapat delegasi langsung dari rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan KPI/KPID pun *public oriented*.

Public oriented-nya KPI/KPID pun ditegaskan dalam tugas dan kewajiban KPI/KPID dengan menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Aduan, sanggahan, serta kritik seringkali ditindaklanjuti dengan kewenangan menjatuhkan sanksi: teguran 1, teguran 2, sampai penghentian program siaran. Puluhan, bahkan ratusan

sanksi sudah dijatuhkan, baik oleh KPI atau KPID dalam per tahunnya, tetapi pelanggaran tetap terjadi, pengaduan masyarakat pun tetap banyak; konten siaran yang tidak mendidik pun tetap ada.

Hal itu terjadi karena lembaga penyiaran dalam menyajikan konten siaran, tidak sekedar *public oriented*, tetapi juga untuk *profit oriented*. Istilah industri kreatif makin terang benderang bahwa tujuan konten siaran disajikan pada publik untuk meraup laba. Oleh karena itu, tidak sinergis dengan tujuan idealis KPI/KPID yang murni berdiri di atas aturan yang berlandaskan *positive value* bangsa, sehingga mengubah strategi pengawasan menjadi lebih beradaptasi dengan *profit oriented* karena UU pun mengamankan pada tugas dan kewajiban KPI/KPID untuk juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran. Hal itu menunjukkan nilai keadilan yang ada pada UU Penyiaran bahwa lembaga penyiaran bukan hanya diberikan *punishment* karena melanggar, tetapi diberikan juga *reward* karena berprestasi.

Konsepsi itu menjadi visi KPI/KPID seluruh Indonesia, sehingga setiap tahun selalu menganugerahkan penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang berprestasi. Seperti di KPID Jawa Barat, tahun 2018 penganugerahan KPID Jawa Barat Award sudah yang ke-11 kali di antara tetap konsisten menjatuhkan sanksi. Tim Juri Independen dan Komisioner KPID Jawa Barat menetapkan bagi Stasiun Penyiaran Lokal (SPL Jawa Barat) dan SSJ (Stasiun Sistem Jaringan) baik radio maupun televisi yang menyajikan siaran berkualitas dalam program berita, feature, talkshow, hiburan seni budaya lokal, Iklan Layanan Masyarakat, dan program anak, berhak mendapat Penganugerahan Award.

KPID Jabar Award bukan penghargaan biasa; selain program siaran memenuhi standar nilai memadai dari sisi ide inovatif, kreativitas tinggi, bernilai edukasi dan informasi, bahasa bersegmentatif, kualitas audio dan/atau video, ketaatan pada aturan, dan prioritas konten lokal. Namun lebih dari itu sebagai respon terhadap profit oriented lembaga penyiaran terhadap program siaran yang berkualitas.

Dalam *Teori Social Exchange Approach*, setiap orang membutuhkan profit, tetapi tidak selamanya harus finansial atau fisik, profit yang tidak kalah pentingnya adalah profit sosial dalam bentuk pengakuan atas kualitas karya program siaran bahwa Anda Layak Dapat Award. Award yang tidak sekedar laba finansial atau fisik yang dapat hilang dalam sesaat, tetapi melegenda dalam *historical book* penyiaran Jawa Barat sepanjang

jaman yang dikenang dan dicontoh oleh anak cucu penerus kemajuan penyiaran Jawa Barat menuju Penyiaran Jawa Barat Juara Lahir Bathin. (Pikiran Rakyat, 2018).

Pada KPID Jabar Award ke-11, KPID Jabar pun memberikan penghargaan kepada tokoh radio dan televisi yang berjasa dalam perkembangan dunia penyiaran di Jawa Barat dalam bentuk Lifetime Achievement Award 2018.

KPID Jabar Award tahun 2018 bertema: Kemilau Penyiaran Jawa Barat Membangun Negeri yang mengandung arti di antara hiruk pikuknya jumlah penyiaran di Jawa Barat yang berjumlah 446, tetapi semuanya komitmen untuk mendorong negeri Indonesia tercinta ini untuk dapat lebih maju dengan terus memacu prestasi bersama melalui konten siaran yang makin informatif, edukatif, hiburan yang sehat serta sebagai kontrol dan perekat sosial bagi kemilau mutiara yang bernilai luhur.

Pada KPID Jabar Award 2018, KPID Jawa Barat memberikan penghargaan kepada karya terbaik yang disiarkan di radio lokal, televisi lokal, radio komunitas, dan lembaga penyiaran SSJ (Stasiun Sistem Jaringan) dalam 13 kategori. Ke-13 kategori tersebut terbagi pada televisi SSJ dua kategori: Program Konten lokal (Seni dan Budaya Lokal) dalam bentuk Feature atau Dokumenter dan Program Talkshow, pada televisi lokal: siaran berita, feature dan dokumenter, talkshow, dan program anak, pada radio lokal kategori: siaran berita, talkshow, hiburan (seni dan budaya lokal), iklan layanan masyarakat, dan program anak, serta pada radio komunitas kategori iklan layanan masyarakat (ILM).

Dengan peserta seluruh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat yang berjumlah 446, jumlah karya yang masuk ke meja panitia yang layak dinilai 146 karya yang disiarkan di radio dan 61 karya yang ditayangkan di televisi. Karya tersebut dinilai dengan bobot 70% oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari: Mayong Suryolaksono, Tisna Sanjaya, Santi Indra Astuti, H. Zaenal Mukarom, dan H.A. Haris Sumardirdja. Sementara itu, bobot 30 dinilai dari *tract record* lembaga penyiaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS).

Acara puncak penganugerahan KPID Jabar Award ke-11 diselenggarakan pada Jumlat, 23 November 2018 di el-Royal Hotel Jalan Merdeka Bandung mulai pukul 19.00 dengan menghadirkan sejumlah artis ternama, baik artis nasional maupun lokal, di antaranya: Ega D'akademi,

Sara Fajira, Neo D'bodor (Kusye & Benny Syafaat), Kang Ubed (Preman Persiun), Fanny Sabila, Gege Gumilar Orchestra, BSV Choir, Lises SMAN 5 Bandung, Rampak Bambu, Hastina Pura, dan KPID Jabar Voice. Acara KPID Jabar Award 2018 pun dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Anggota DPRD Jawa Barat, pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ketua dan anggota KPI Pusat, KPID Provinsi se-Indonesia, tokoh penyiaran dan tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya.

Setelah melalui penilaian Dewan Juri, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan KPID Jawa Barat Nomor: 002/SK/KPIDJABAR/XI/2018 menetapkan Lembaga Penyiaran Radio yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2018. Pemenang KPID Award Radio tahun 2018 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Musik Etnik Daerah Jawa Barat, dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2018 Nomor : 002 /SK/KPIDJABAR/XI/2018 PEMENANG RADIO KPID JABAR AWARD 2018 KATEGORI BERITA RADIO: LPPL Kuningan Nama Program Warta Basa Sunda; KATEGORI TALKSHOW RADIO: PR FM Bandung Nama Program: Peduli Musik Anak; KATEGORI HIBURAN (SENI BUDAYA LOKAL) RADIO: Radio Mustika Subang Nama Program Dongeng Wanda Pantun; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK RADIO : Radio Simpati Cirebon Nama Program: Dialog Si Kecil; IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO SWASTA: Radio Rase Bandung Nama Program : Bandung Juara; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO KOMUNITAS: Radio Komunitas Sportif Cirebon Nama Program: Melestarikan Budaya Topeng.

Keputusan KPID Jawa Barat Nomor: 003/SK/KPIDJABAR/XI/2018 menetapkan Lembaga Penyiaran televisi yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2018. Pemenang KPID Award Televisi tahun 2018 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Hiburan (Seni dan Budaya Lokal), dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award NOMOR: 003/SK/KPIDJABAR/XI/2018 PEMENANG TELEVISI KPID JABAR

AWARD 2018 KATEGORI PROGRAM ANAK TELEVISI: TVRI Jabar Nama Program Anak Indonesia; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: Net TV Jawa Barat; KATEGORI BERITA TELEVISI : PJTV Bandung Nama Program Bewara PJTV; KATEGORI FEATURE TELEVISI SSJ: TVRI Jabar Nama Program Pesona Indonesia Eps. Kembalinya Maestro Topeng; KATEGORI FEATURE TELEVISI LOKAL: RCTV Cirebon Nama Program Ragam Topeng; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI SSJ: Televisi NET Jabar Nama Program Bincang Bersama Tisna Sanjaya; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI LOKAL: Televisi Megaswara TV Bogor Nama Program SKSD; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI: INSPIRA TV Bandung Nama Program Longser Milenia.

Lembaga penyiaran yang berprestasi tersebut selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari KPID Jawa Barat juga hadiah uang pembinaan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta) rupiah untuk lembaga penyiaran televisi dan Rp7.000.000 (tujuh juta) rupiah untuk lembaga penyiaran radio, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Radio diberikan kepada Dra. Hj. Noor Achirul Layla, M.Pd. yang dikenal dengan panggilan Teh Ea. Penghargaan Khusus *Lifetime Achievement Award* untuk tokoh Jawa Barat yang berperan aktif dalam mengembangkan dunia Penyiaran Televisi diberikan kepada Drs. Suhardi, M.Si. Mereka mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan KPID Jawa Barat Tahun 2018.

E. KPID Jabar Award 2019

Kendati program tahunan, penyelenggaraan Peng-anugerahan Penghargaan terhadap karya insan penyiaran yang berprestasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat tetap aktual. Event yang lekat disebut KPID Jabar Award, pada tahun 2019 merupakan yang ke-12 kalinya dengan tema sentral *Go Digital: Mengukir Prestasi Anak Negeri pada Era Digitalisasi Menuju Jabar Juara Lahir Bathin*.

Tema tersebut cukup aktual karena Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi digitalisasi dalam berbagai aspek, termasuk dunia penyiaran. Digitalisasi penyiaran nampaknya tidak dapat ditawar lagi karena selain merupakan tuntutan globalisasi informasi, juga memberikan manfaat

dan peluang yang besar bagi perkembangan sistem penyiaran nasional. Sejumlah negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah bermigrasi, sehingga sistem penyiaran nasional mereka sudah digitalisasi total.

Selama ini, lembaga penyiaran (televisi dan radio) dalam menyebarluaskan isi siaran menggunakan frekuensi gelombang radio. Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita yang hanya dapat dipergunakan oleh satu pihak, misalnya, penggunaan secara bersamaan pada ruang dan jumlah getaran serta lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu (*interference*).

Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategori sebagai milik publik atau publik domain. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai publik domain, yaitu benda publik, milik publik, dan ranah publik. Oleh karena itu, pemanfaatannya pun sebesar-besarnya harus untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Namun, kanal frekuensi yang dipergunakan oleh televisi dan radio tersebut jumlahnya sangat terbatas, sehingga pemanfaatan kanal diatur oleh Pemerintah dengan melalui proses perijinan.

Sebagai contoh, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM-15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) memberikan kanal di wilayah layanan Jawa Barat. Sedikitnya terdapat 311 Kanal Frekuensi Radio FM bagi wilayah layanan Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta potensi ekonomi untuk berkembangnya peluang usaha. Untuk televisi analog baik untuk stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri No.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Frekuensi yang digunakan oleh televisi pada kisaran 478 s.d. 806 MHz UHF.

Ternyata keterbatasan frekuensi tersebut, pada era ini telah

ditemukan solusinya, yakni dengan digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) dikodekan ke dalam bentuk bit (*binary digit*) sehingga dimungkinkan adalah manipulasi dan transformasi data (*bitsreaming*), termasuk penggandaan, pengurangan, dan penambahan. Semua jenis informasi diperlakukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama (byte/bit). Bit ini merupakan karakter dengan dua pilihan: 0 dan 1, *on* dan *off*, *yes* dan *no*, ada informasi atau tidak ada informasi. Penyederhaan ini pada akhirnya dapat merangkul aneka bentuk informasi: huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai keperluan: pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian, sekaligus dalam satu perangkat.

Digitalisasi penyiaran merupakan suatu keniscayaan memajukan industri penyiaran yang masih berbasis sistem siaran analog hingga saat ini. Karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kemajuan jaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Kesempurnaan televisi digital diharapkan menjamin industri penyiaran dengan pasar yang makin beragam. Prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership* pun makin terasa dengan adanya televisi digital.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pun sempat mengeluarkan kebijakan digitalisasi dengan dimulai penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial tanggal 22 November 2011 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) dan tanggal 7 Desember 2011 diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi 478-694 MHz. Namun, kebijakan pemerintah tersebut mendapat “perlawanan” dari asosiasi, sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintah pun, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial serta Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Dari kedua aturan tersebut, Pemerintah sempat memberikan persetujuan pada 103 LPS. Namun, karena perlawananan dari asosiasi melalui PTUN, sehingga 33 keputusan menteri dibatalkan.

Terlepas apapun fakta di lapangan terkait digitalisasi penyiaran di Indonesia, hal itu tetap saja merupakan peluang, bahwa migrasi teknologi dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan. Digitalisasi penyiaran merupakan peluang untuk memperluas dan mengembangkan jangkauan berbagai jenis layanan penyiaran bagi para pendengar dan penonton. Selama ini, penyiaran dengan menggunakan analog, baik penyiaran radio maupun televisi belum dapat menjangkau pemirsa atau pendengar secara merata dengan berbagai jenis layanan. Bahkan, yang dimaksud merata dalam konteks digitalisasi, tidak hanya penyebaran informasi bagi khalayak masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia.

Peluang sebagai efek dari digitalisasi penyiaran juga bagi perkembangan persebaran konten lokal daerah-daerah yang ada di Indonesia yang sangat potensial. Berbagai informasi kearifan lokal daerah-daerah di Indonesia dengan berbagai bentuk dapat melanglang buana disaksikan oleh masyarakat dunia. Kendati konteks kearifan lokal daerah-daerah ke-Indonesiaan itu dapat ditayangkan oleh Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) atau Stasiun Siaran Lokal (SPL).

Dalam konteks inilah prestasi anak negeri, karya-karya berkonten lokal yang memiliki nilai luhur kearifan lokal harus tetap eksis kendati teknologi akan migrasi dari analog ke digital. Digitalisasi penyiaran bukan untuk meninggalkan khazanah konten lokal yang maha kaya, tetapi justru untuk memberikan peluang sehingga dapat mendunia. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi insan penyiaran lokal untuk menunjukkan prestasi yang lebih besar.

Apalagi Jawa Barat, provinsi besar dengan beragam kekayaan potensi lokal. Di wilayah Jawa Barat terdapat lebih dari 100 seni budaya, 33 cagar budaya penting, 12 kampung adat, 30 musieum (Disparbud Jabar, 2015), dan sejumlah potensi lainnya yang sangat menarik untuk diangkat ke permukaan menjadi program siaran lokal, termasuk di dalamnya tempat wisata, baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata kuriner. Jika hal itu dapat mengimbangi digitalisasi penyiaran, insya Allah

lembaga penyiaran akan memberikan kontribusi besar terhadap Visi Jawa Barat Juara Lahir Bathin. (Pikiran Rakyat, 2019)

Setelah melalui penilaian Dewan Juri, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan KPID Jawa Barat Nomor: 002/SK/KPIDJABAR/XII/2019 menetapkan Lembaga Penyiaran Radio yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2019. Pemenang KPID Award Radio tahun 2019 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Musik Etnik Daerah Jawa Barat, dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award 2019 Nomor : 002/SK/KPIDJABAR/XII/2019 PEMENANG RADIO KPID JABAR AWARD 2019 KATEGORI BERITA RADIO : Radio MQFM Bandung Nama Program Sudut Pandang Anda; KATEGORI TALKSHOW RADIO: Radio PR FM Bandung Nama Program Talkshow Pojok Komunitas Tema: Suara Merdu Indonesia Raja Eropa; KATEGORI HIBURAN (SENI BUDAYA LOKAL) RADIO : Radio RGP FM Ciamis Nama Program GAYATRI: Galindeng Budaya Tradisi; KATEGORI PROGRAM ANAK-ANAK RADIO : Radio Salam FM Sukabumi Nama Program Bunayyati Unjuk Gigi; IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO SWASTA: DSK FM Karawang Nama Program Sumpah Pemuda “Dimana Tiga Janjimu” ; KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT RADIO KOMUNITAS : Rakom Bunut FM Sukabumi Nama Program Ulin ka Jabar.

Keputusan KPID Jawa Barat Nomor: 003/SK/KPIDJABAR/XII/2019 menetapkan Lembaga Penyiaran televisi yang berprestasi dan berhak mendapatkan anugerah KPID Jabar Award 2019. Pemenang KPID Award Televisi tahun 2019 untuk setiap kategori, yakni Kategori Berita (KB), Kategori Feature (KF), Kategori Talkshow (KT), Kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Kategori Hiburan (Seni dan Budaya Lokal), dan Kategori Program Anak-anak terdapat dalam lampiran 2. Lampiran II Berita Acara Rapat Dewan Juri KPID Jabar Award Nomor: 003/SK/KPIDJABAR/XII/2019 PEMENANG TELEVISI KPID JABAR AWARD 2019 KATEGORI PROGRAM ANAK TELEVISI: TVRI Jawa Barat Nama Program: Anak Indonesia Eps. Menari Dalam Sunyi; KATEGORI BERITA TELEVISI: Inspira TV Bandung Nama Program Berita Inspirasi Sekilas Jabar; KATEGORI FEATURE TELEVISI LOKAL: Inspira TV

Bandung Nama Program Dedikasi; KATEGORI TALKSHOW TELEVISI LOKAL: AK TV Bandung Nama Program: Milang Bentang Eps. Ua Uko dan Yayan Jatnika; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI SSJ: Kompas TV Jawa Barat Nama Program: Kompas Jabar; KATEGORI HIBURAN SENI DAN BUDAYA LOKAL TELEVISI RCTV Cirebon Nama Program Sejarah Desa.

Lembaga penyiaran yang berprestasi tersebut selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari KPID Jawa Barat juga hadiah uang pembinaan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta) rupiah untuk lembaga penyiaran televisi dan Rp5.000.000 (lima juta) rupiah untuk lembaga penyiaran radio, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.***

BAB IX

POLITIK PENYIARAN DAERAH

A. Pemerintah Daerah dan KPI Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 pada Pasal 18 dengan tegas menggariskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam konteks kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), terutama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebagaimana amanah Pasal 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk Komisi Penyiaran. Kemudian pada Pasal 7-nya diamanahkan pula komisi penyiaran disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

Hal tersebut sangat eksplisit menyuratkan bahwa kedudukan KPI, selain di tingkat pusat juga di tingkat provinsi atau sampai tingkat provinsi yang diberinama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang disingkat KPID. Di tingkat pemerintahan kabupaten/kota tidak dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau tidak ada Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan kedudukan KPID berada di tingkat provinsi, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana amanah UUD NKRI 1945 berarti ada hubungan yang erat antara KPID dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur.

Mencermati landasan yuridis terbentuknya KPID, yakni Undang-

Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat dipetakan tingkat aksesitas Gubernur terhadap KPID Provinsi. Yang paling erat aksesitas Gubernur terhadap KPID terkait dengan penetapan para komisioner KPID Provinsi. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur. Kendati terdapat kata secara administratif, tetapi penetapan Gubernur terhadap anggota KPI Daerah, misalnya, dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur, merupakan kelayakan legal formal dan prasyarat utama untuk eksistensi KPI Daerah.

Keberadaan KPI Daerah sangat ditentukan oleh Gubernur. Tanpa penetapan dari Gubernur, maka KPI Daerah tidak akan memiliki anggota, artinya tidak akan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang, hak dan kewajibannya, bahkan juga tidak “berhak” mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aksesitas yang merupakan prasyarat utama keberadaan KPI Daerah pun berlanjut pada pemberhentian dan penggantian antar-waktu bagi anggota KPI Daerah. Pada Pasal 10 ayat (4) disebutkan bahwa anggota KPI berhenti karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan. Kemudian ditambahkan pada Pasal 11, apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. Penggantian anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Kendati aksesitas Gubernur terhadap KPI Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya “dua point”, tetapi menyuratkan aksesitas pokok karena menjadi syarat utama bagi kedudukan KPI Daerah. Dalam konteks protokoler kenegaraan, para anggota KPI Daerah pun dilantik oleh Gubernur. Pelantikan pun seringkali menunjukkan keabsahan kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi, dalam konteks ini anggota KPI Daerah, sehingga mereka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang harus diterima sebagai anggota KPI Daerah.

Adapun hal-hal lainnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun mengatur tentang proses rekrutmen dan

seleksi anggota KPI Daerah, proses pengusulan anggota KPID kepada Gubernur, proses pengawasan kinerja KPI Daerah, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, serta proses pemberhentian anggota KPI Daerah, merupakan aksesitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Namun, yang perlu mendapatkan catatan terkait hubungan antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin Gubernur adalah terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kedudukan KPI Daerah. Kondisi itu kentara tatkala lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut menggeser posisi KPID dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah. Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga posisi KPID pada Pemerintah Daerah makin tidak jelas.

Oleh karena itu, fakta di lapangan pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah dan melahirkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kondisi kelembagaan dan keuangan sejumlah KPI Daerah di sejumlah provinsi di Indonesia menghadapi masa yang sangat sulit. Puluhan KPI Daerah di antara 34 KPI Daerah bergejolak. Banyak di antara mereka ada yang sempat “mati total” karena tidak mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); beberapa KPI Daerah dilebur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, sehingga independensi mereka terancam.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi dasar bagi sebagian pemerintah provinsi untuk tidak lagi menganggarkan dana kepada KPI Daerah. Padahal, Pasal 9 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tegas menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan KPI Daerah bersumber dari APBD Provinsi. Namun banyak kepala daerah yang “menutup mata”, dengan alasan tidak berani melanggar peraturan perundang-undangan, walaupun sebenarnya mereka pun sedang melanggar Undang-Undang Penyiaran.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif mengatakan, APBD hanya bisa diberikan secara langsung kepada unit kerja Pemerintah Daerah seperti Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Karena

KPI Daerah bukan perangkat daerah, maka dianggap tidak berhak mendapatkan kucuran APBD.

Alternatifnya, dana KPI Daerah dapat diambil dari APBD rekening hibah. Kalau hibah, terserah kebijakan Pemerintah Daerahnya, dalam hal ini Gubernur bersama DPRD dalam menyusun APBD.

Situasi tersebut sangat berpengaruh pula pada posisi KPID Provinsi Jawa Barat. Selama masa periode KPID Jabar 2015-2019, terjadi tiga kali perubahan posisi kelembagaan dan keuangan KPID Jabar. Pertama, ketika awal pelantikan pada 18 Februari 2015, Sekretariat KPID Jabar otonom sebagai Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mandiri dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III. Keuangan pun dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat KPID Jawa Barat yang memiliki tiga bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon IV. Para komisioner mengkoordinir kegiatan dan konsen pada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Dengan digantinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang disertai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kelembagaan KPID Jawa Barat, terutama dalam fasilitasi tenaga sekretariat dan keuangan pun mengalami perubahan. Sekretariat KPID Jawa Barat “dibubarkan”. Fasilitasi Sekretariat KPID Jawa Barat dialihkan dalam Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, termasuk juga dalam fasilitasi anggaran.

Komitmen kuat dari Gubernur, DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap konsisten menjalankan amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membuat KPID Jawa Barat tetap kokoh berdiri menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya. Kendati secara teknis peralihan fasilitasi Sekretariat KPID Jawa Barat ke Dinas Komunikasi dan Informatika bukan tanpa masalah, baik berkurangnya tenaga sekretariat maupun menciutnya jumlah anggaran. Namun, hal itu bukan menjadi halangan besar bagi KPID Jawa Barat untuk komit menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran).

Tahun 2018, KPID Jawa Barat “terusir” dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Tupoksi KPID Jawa Barat dianggap bukan

merupakan bagian dari Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, sehingga KPID Jawa Barat “dipaksa” menjadi lembaga mandiri yang tanpa induk: bukan bagian dari KPI Pusat; bukan juga bagian dari Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penganggarannya pun berubah menjadi berbentuk hibah yang notabene sangat ditentukan oleh rezim Pemerintahan Daerah. Beruntung Pemerintahan Daerah, baik masa Gubernur H. Ahmad Heryawan dengan Ketua DPRD Hj. Inneu Purwadewi Sundari maupun pada masa Gubernur H.M. Ridwan Kamil dengan Ketua DPRD Taufik Hidayat tetap komitmen terhadap pentingnya tupoksi KPID Jawa Barat, sehingga hibah tetap mengalir hingga tahun 2020, kendati jumlahnya sangat fluktuatif.

B. DPRD dan KPI Daerah

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tampaknya sederhana. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyuratkan bahwa fungsi DPRD Provinsi adalah pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Pembuatan peraturan daerah: terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengawasan: melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan/atau program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi; Penganggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Ternyata, kalau dicermati secara saksama, dengan melakukan pendekatan secara makro, fungsi pembuatan peraturan daerah (provinsi), pengawasan, dan penganggaran tidak hanya terkait dengan kegiatan dan/atau program Pemerintah Provinsi atau hanya merujuk pada implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksana lainnya terkait dengan Pemerintahan Daerah. Ternyata, ketiga fungsi DPRD Provinsi tersebut harus diimplementasikan juga kaitannya dengan tugas-tugas tambahan DPRD Provinsi lainnya yang tidak tersirat atau tersurat pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masih banyak Peraturan Perundang-Undangan yang juga mengamanahkan tugas tambahan, tetapi tetap urgen harus dilakukan DPRD Provinsi dalam menjalankan ketiga fungsinya.

Di antaranya, terdapat undang-undang yang memberikan tugas tambahan kepada DPRD Provinsi untuk menjalankan ketiga fungsinya, di luar Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-undang

tersebut, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahkan, aturan lainnya yang merupakan aturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut pun menyuratkan tugas DPRD Provinsi dalam menjalankan ketiga fungsinya.

Secara singkat konten Undang-Undang Penyiaran yang “melibatkan” DPRD Provinsi dalam menjalankan ketiga fungsi utamanya adalah terkait dengan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi. Dari mulai proses seleksi, pengangkatan, penilaian kinerja dan pertanggungjawaban, sampai pada pemberhentian dan pergantian antar-waktu para anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi memerlukan peran penting DPRD Provinsi dalam menjalankan ketiga fungsinya.

Dalam konteks itulah, DPRD Provinsi memiliki tugas tambahan di luar tugas yang diamanahkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, para anggota DPRD Provinsi harus memahami juga isi Undang-Undang Penyiaran beserta peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan hal itu.

Kompetensi para anggota DPRD Provinsi dalam melakukan ketiga fungsinya terkait dengan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi harus ditingkatkan sesuai dengan tugas yang diamanahkannya. Hal itu sangat penting agar DPRD Provinsi dapat mendorong optimalisasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, misalnya, melalui regulasi “lokal” yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, seperti Peraturan Daerah yang terkait dengan konten penyiaran. Di beberapa provinsi di Indonesia sudah ada peraturan daerah yang konsen pada pengaturan bidang penyiaran, seperti di Provinsi Yogyakarta. Tentu, terkait dengan peraturan daerah, dalam hal pembuatannya di antaranya merupakan fungsi DPRD Provinsi, bahkan DPRD Provinsi dapat menjalankan hak inisiatifnya untuk mengajukan peraturan daerah tentang penyiaran.

Dukungan DPRD Provinsi terhadap optimalisasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dapat berupa dukungan alokasi anggaran yang memadai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Hal itu pun sudah diamanahkan melalui Undang-Undang Penyiaran bahwa anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi. Dari mulai usulan, penyusunan, bahkan sampai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi selalu melibatkan DPRD Provinsi. Hal itu pun sejalan dengan fungsi DPRD Provinsi, yakni penganggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun demikian, segala “fasilitas” yang diberikan DPRD Provinsi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, perlu pengawasan, sehingga terpantau tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu relevan dengan fungsi DPRD Provinsi, yakni pengawasan. Pengawasan yang dimaksud terkait dengan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dalam menjalankan amanah peraturan perundang-undangan sekaligus amanah anggaran melalui APBD. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi melalui Undang-Undang Penyiaran, diamanahi kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggarannya kepada DPRD Provinsi.

Selain tugas pokok dan fungsi DPRD yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khusus DPRD Provinsi pun memiliki tugas tambahan berdasarkan regulasi Undang-Undang Penyiaran: No. 32 Tahun 2002, di antaranya memilih anggota KPI Daerah dan mengawasi KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Perihal komisi penyiaran dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7-nya bahwa (1) Komisi penyiaran disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI; (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran; (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi; (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dalam pasal di atas akses DPRD Provinsi tersebut secara langsung terhadap KPI Daerah Provinsi dengan kewajiban mengawasi KPI Daerah Provinsi. Hal itu sejalan dengan Fungsi Utama DPRD Provinsi, selain membuat Peraturan Daerah dan penganggaran, juga pengawasan. Dalam konteks ini, selain DPRD Provinsi berfungsi mengawasi roda pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dibantu oleh Perangkat Daerah juga melaksanakan pengawasan terhadap “kinerja” KPID Provinsi dalam menjalankan tugas

dan wewenangny.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran, KPI (Daerah) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Secara substansial yang memiliki kewajiban untuk mewadahi aspirasi dan mewakili masyarakat adalah wakil rakyat hasil Pemilihan Umum, dalam konteks masyarakat daerah adalah DPRD. Namun terkait dengan penyiaran, kewajiban DPRD tersebut didelegasikan kepada KPI (Daerah), sehingga para anggota KPI (Daerah) dipilih dan diawasi oleh DPRD. Delegasi dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dituliskan Surbakti (2008) menyerahkan sebagian kewenangannya dengan tetap meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan wewenang tersebut. Oleh karena itu, secara substansial DPRD memiliki aksesitas tinggi terhadap penyiaran, melalui pertanggungjawaban KPI (Daerah).

Hal itu mengandung arti bahwa jika ada masyarakat yang mengadu ke DPRD tentang penyiaran, DPRD dapat “memerintah” KPI (Daerah) untuk menanganinya sekaligus memberikan laporan. Termasuk jika muncul gagasan dari DPRD, baik yang berasal dari aspirasi masyarakat maupun hasil pemikiran di antara anggota DPRD terkait dengan pembangunan penyiaran di daerah, DPRD dapat pula “memerintah” KPI Daerah untuk menjalankannya sekaligus memberikan pertanggungjawaban.

“Perintah” DPRD tersebut, terntunya relevan dengan wewenang dan tugas KPI (Daerah) sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI (Daerah) mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI (Daerah) pun mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan

informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Bagi DPRD Provinsi, wewenang pengawasan terhadap kinerja KPID Provinsi dapat dikatakan fungsi tambahan dari pengawasan DPRD Provinsi sebagaimana diamanahkan Pasal 100 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal tersebut, diatur bahwa (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan; (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya amanah pengawasan sebagaimana isi Pasal 7 Undang-Undang Penyiaran, maka fungsi pengawasan DPRD Provinsi mengalami tambahan, kendati visinya sama terkait dengan memperjuangkan nasib rakyat daerah.

Aksesitas DPRD terhadap penyiaran di daerah melalui KPI Daerah, selain mendorong secara substansial kepada KPI Daerah untuk dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal, juga memfasilitasi program KPI Daerah melalui pendanaan. Undang-Undang Penyiaran mengamanahkan bahwa pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah salah satu fungsi utama DPRD adalah penganggaran, maka dalam konteks pendanaan KPI Daerah melalui APBD, DPRD Provinsi memiliki aksesitas tinggi.

Pasal 99 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Fungsi Anggaran (DPRD Provinsi) diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama

terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur; (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

DPRD Provinsi dapat men-suport anggaran yang memadai melalui APBD kepada KPI Daerah agar kinerjanya sebagaimana didelegasikan DPRD lebih optimal. DPRD Provinsi dapat menggunakan politik anggaran guna membangun penyiaran di daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat daerah, sekaligus bermanfaat bagi rakyat daerah. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi pun memiliki blue print atau rancangan pembangunan di bidang penyiaran di daerah dan hal itu untuk menjadi rujukan bagi KPI Daerah dalam menjalankan programnya sekaligus sebagai sarana evaluasi DPRD Provinsi terhadap kinerja KPI Daerah.

Aksesitas DPRD melalui KPI Daerah tergambar juga dalam sejumlah regulasi yang dibuat pemerintah pusat, baik terhadap lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, maupun lembaga penyiaran komunitas. Pasal 13 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik; b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Aksesitas DPRD Provinsi terhadap Lembaga Penyiaran Swasta tergambar dari beberapa pasal Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah disebutkan, untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran, dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri. KPI yang dimaksud dalam pasal ini tidak hanya KPI (Pusat), tetapi untuk evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta di daerah terlibat juga KPI Daerah. Maka ketika KPI Daerah terlibat aksesitas DPRD Provinsi pun ada karena DPRD Provinsi selain mendelegasikan kewenangan terkait penyiaran di daerah kepada KPI Daerah, juga dapat menyampaikan gagasan dan meminta laporan KPI

Daerah terkait tugas tersebut. Juga dalam pasal berikutnya yakni, Pasal 34 ayat (5) bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran, dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.

Aksesitas DPRD Provinsi melalui KPI Daerah semakin luas ketika Peraturan Pemerintah pun memberikan kesempatan dengan siaran radio berjaringan. Hal itu dijelaskan pada Pasal 35 bahwa Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut: a. induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota; b. jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kabupaten dan kota di Indonesia.

Dengan berdirinya lembaga penyiaran radio swasta yang berjaringan di ibu kota provinsi, maka KPI Daerah menjadi dominan dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya termasuk di dalamnya yang terkait dengan menjelmakan ide dan gagasan DPRD Provinsi dalam membangun penyiaran yang sehat di daerah. Bahkan, untuk lembaga penyiaran radio berjaringan yang berada di ibu kota kabupaten/kota, kewenangan dan tugas KPI Daerah pun sama dominannya karena di kabupaten/kota tidak ada KPID Daerah Kabupaten/Kota. Namun, dalam konteks lembaga penyiaran radio swasta di kabupaten/kota, terbuka juga aksesitas DPRD Kabupaten/Kota untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam membangun penyiaran di daerahnya, baik langsung disampaikan kepada KPI Daerah maupun melalui DPRD Provinsi.

Hal yang sama terjadi juga pada eksistensi lembaga penyiaran televisi swasta yang berjaringan. Dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut: a. induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi; b. anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota; c. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi; d. Khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun

relai; e. jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia; f. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini; g. paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri; h. penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Aksesitas DPRD melalui KPI Daerah pun terjadi terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam Pasal 8 disebutkan (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan; (3) Permohonan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran.

KPI yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bagi Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di daerah adalah KPI Daerah yang berada di provinsi. Oleh karena itu, DPRD Provinsi pun dapat “ikut serta” atau memiliki aksesitas terhadap perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas melalui KPI Daerah. Dengan aksesitas melalui pemilihan dan pengawas, serta kewajiban melaporkan dari anggota KPI Daerah, ide-ide dan gagasan DPRD dapat masuk melalui KPI Daerah.

Apalagi dalam Pasal 39-nya, setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran kepada

Menteri, KPI, dan komunitasnya. KPI yang dimaksud dalam pasal ini jika lembaga penyiaran berada di daerah adalah laporan disampaikan kepada KPI Daerah yang notabene DPRD Provinsi memiliki aksesitas yang tinggi, sehingga DPRD Provinsi dapat juga memantau lembaga penyiaran komunitas melalui laporan evaluasinya.

Aksesitas DPRD Provinsi makin jelas, tatkala Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran pun menegaskan bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Substansi pasal tersebut menyuratkan dengan tegas bahwa KPID Provinsi adalah “anak kandung” DPRD Provinsi karena KPID Provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi. Pasal tersebut pun menyuratkan secara langsung kewenangan atau fungsi tambahan DPRD selain ketiga fungsi pembuatan Peraturan Daerah, pengawasan, dan penganggaran, juga memilih anggota KPID Provinsi.

Selain secara yuridis dalam pengangkatan KPID Provinsi pun memberi akses pada Kepala Daerah melalui Pasal 10 Ayat (3)-nya bahwa Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Substansi tersebut pun menegaskan bahwa KPID Provinsi adalah bagian dari Pemerintahan Daerah karena terbentuk dari hasil aksesitas dua lembaga pada Pemerintahan Daerah, yakni DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, kalau dianalogikan dengan produk perundang-undangan, posisi KPID Provinsi sama kuatnya dengan posisi Peraturan Daerah. Dalam konteks inilah, Pemerintah Daerah harus “mengayomi” KPID Provinsi sehingga dapat memiliki eksistensi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bahkan, terkait dengan keanggotaan KPID Provinsi jika akan berhenti dari jabatannya dengan berbagai sebab, di antaranya menurut Undang-Undang Penyiaran karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan, penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif

ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Hal itu memperlengkap aksesitas DPRD Provinsi dan Kepala Daerah terhadap KPID Provinsi.

Terkait dengan aksesitas DPRD Provinsi pada KPID Provinsi sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran ditegaskan kembali dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) No. 11/KPI/P//PKPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Penegasan tersebut terutama dalam hal: 1) Pengawasan KPID Provinsi oleh DPRD Provinsi; Anggota KPID Provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi; 3) Usulan untuk mendapat surat keputusan Gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi.

Selain itu, aksesitas DPRD Provinsi makin kuat ketika Pasal 18 Peraturan KPI tentang Kelembagaan pun memerintahkan bahwa pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi. KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi. Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah. Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi. Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.

Dijelaskan lagi dalam Pasal 22-nya bahwa uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi. Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi. Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (ranking). Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.

Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD Provinsi. Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI

Daerah yang akan ditetapkan.

Kemudian pada Pasal 24 dijelaskan pula bahwa uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi. Sebebum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak dan elektronik. Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi. Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggapan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak dan elektronik. DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Dilanjutkan dalam Pasal 25 dan 26-nya bahwa DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking). Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan. DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur. Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

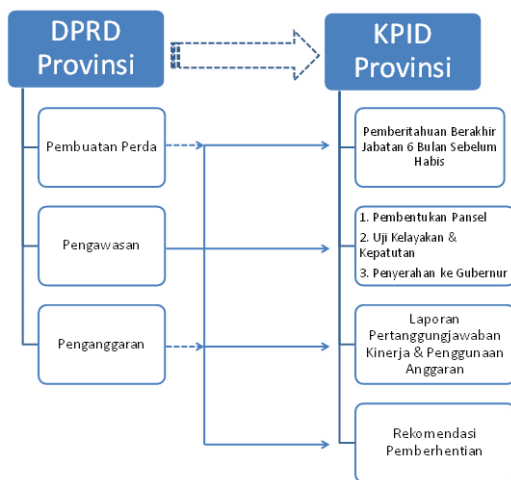
Mencermati tingginya aksesitas DPRD terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dilegalisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD tidak hanya dapat merealisasikan fungsi-fungsinya terhadap KPI Daerah berupa kebijakan, tetapi juga dapat dalam bentuk kegiatan nyata. Kegiatan tersebut dapat dilakukan langsung oleh DPRD kepada KPI Daerah.

Model pengawasan DPRD Provinsi terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi hasil analisa terhadap pasal per pasal pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menambah tugas DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan selain fungsi utama sebagai amanah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan tanpa sedikit pun mengabaikan dan mengurangi fungsi pengawasan sebagaimana amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka model pengawasan DPRD Provinsi terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1
Model Pengawasan DPRD Provinsi pada KPID Provinsi



Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, DPRD Provinsi memiliki tugas tambahan dalam menjalankan ketiga fungsinya: Pembuatan Peraturan Daerah, Pengawasan, dan Penganggaran terhadap KPID Provinsi. Khusus tentang Pengawasan DPRD Provinsi terhadap KPID Provinsi dapat dibagi dalam dua, pengawasan partisipatif: DPRD Provinsi yang menyelenggarakan sekaligus mengawasi dan pengawasan non-partisipatif: DPRD Provinsi hanya mengawasi, pihak lain yang melakukan.

Pengawasan Partisipatif DPRD Provinsi terhadap KPID Provinsi dalam hal: Pembentukan Panitia Seleksi, Uji Kelayakan dan Kepatan, Penyerakan hasil seleksi ke Gubernur, pengalokasian anggaran melalui APBD, dan pemberian rekomendasi dalam proses pemberhentian atau penggantian komisioner.

Pengawasan Non-Partisipatif DPRD Provinsi terhadap KPID Provinsi dalam hal: KPID Provinsi memberitahukan masa jabatan habis pada 6 bulan sebelum akhir masa jabatan dan menerima laporan pertanggungjawaban KPID Provinsi (mengawasi seluruh kinerja KPID Provinsi: boleh mengusulkan, memerintahkan, dan mengkritisi kinerja KPID Provinsi. ***

BAB X

PENUTUP

Sejatinya, dalam buku ini tidak ada penutup karena fakta kehidupan penyiaran di Republik Indonesia, bahkan di dunia tidak akan berakhir jika kehidupan manusia belum berakhir. Namun, Bab Penutup ini ditulis bersifat “sementara” untuk mengahiri tulisan dalam buku ini saja karena buku ini diawali dengan Pendahuluan, maka harus diakhiri dengan Penutup.

Sebenarnya, masih banyak cerita yang ingin diungkapkan terkait dengan penyiaran, baik dari sisi pengalaman dalam melakukan pengawasan konten siaran di lembaga penyiaran di Jawa Barat maupun dalam hal pengembangan dunia penyiaran, baik dalam konteks pengembangan keilmuan maupun fenomena yang terjadi. Apalagi, awal tahun 2020 ketika Bab Penutup ini ditulis, Indonesia seperti halnya negara-negara di dunia sedang mendapat musibah pandemi Covid-19. Dalam peristiwa ini pun dunia penyiaran menggeliat dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Apalagi perubahan pun terus bergulir tidak dapat dan tidak mungkin dibendung, demikian tesis teori perubahan menegaskan. Teori siklus mengajarkan, perubahan sosial bagaikan roda berputar, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan. Siapapun tidak akan mampu mencegah perubahan sosial karena sudah menjadi sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat.

Namun, ada perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan lambat dalam proses evolusi yang merangkak dari kehidupan sederhana ke kehidupan lebih kompleks, sehingga proses adaptasi berjalan damai. Masyarakat merasa tidak ada perubahan karena ketika perubahan terjadi generasi pun beralih. Perubahan pun ada yang cepat, sporadis, dan radikal akibat adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat, sehingga proses adaptasi pun “menyakitkan”, melalui perjuangan, penuh pengorbanan, bahkan tak jarang melalui peperangan yang menelan banyak korban.

Perubahan kehidupan penyiaran di Indonesia pun terjadi kendati penulis tidak berani menyebutkan perubahan yang cepat, sporadis, dan radikal akibat adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat atau bertahap dan lambat dalam proses evolusi yang merangkak dari kehidupan sederhana ke kehidupan lebih kompleks, sehingga proses adaptasi berjalan damai. Pandangan penulis, perubahan kehidupan penyiaran di Indonesia berada dalam perpaduan kedua tahap tersebut.

Perubahan kehidupan penyiaran di Indonesia dapat dikatakan lambat karena berbagai regulasi lambat beradaptasi, Undang-Undang Penyiaran yang masih berlaku No. 32 Tahun 2002, sehingga sempat beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk di-*judicial review* oleh berbagai pihak. Banyak pihak pun mengakui bahwa Undang-Undang Penyiaran tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi penyiaran di Indonesia, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang baru pun sudah masuk prolegnas beberapa tahun ke belakang, tetapi hingga tahun 2020, masih belum juga diketuk palu oleh DPR RI.

Begitu pun regulasi yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang masih menggunakan produk tahun 2012. Beberapa kali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) se-Indonesia diusulkan dan disepakati dilakukan perubahan beberapa pasal yang sudah tidak relevan, tetapi tidak juga berubah.

Perubahan kehidupan penyiaran di Indonesia dapat dikatakan cepat karena pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menggunakan jaringan internet. Digitalisasi penyiaran sudah “mengangkangi” penyiaran analog, sehingga sebagian lembaga penyiaran sudah migrasi ke digital kendati masih tetap mempertahankan penyiaran dengan menggunakan frekuensi. Bagi sebagian lembaga penyiaran yang “melek” teknologi memadukan dua jaringan tersebut. Mereka tetap eksis menggunakan penyiaran analog (frekuensi), tetapi mereka pun migrasi ke digital, sehingga mereka dapat mereguk keuntungan dengan memadukan kelebihan dari kedua jaringan tersebut.

Namun, sebagian lembaga penyiaran lagi masih berkutat pada masalah penyiaran analog. Bagi sebagian mereka keberadaan penyiaran digital merupakan ancaman, bahkan sudah merebut pasar dan kue iklan

mereka. Hal itu yang membuat mereka terancam gulung tikar seolah tidak sanggup dengan persaingan yang tidak *apple to apple*. Dalam konteks inilah, sehingga program KPID Jawa Barat pada tahun 2019-2020 fokus pada salah satunya “menyadarkan” mereka untuk tetap struggle bahwa keberadaan penyiaran digital bukan ancaman, tetapi peluang yang harus direbut dan disandingkan dengan penyiaran digital.

Lambat dan cepatnya perubahan kehidupan penyiaran di Indonesia inilah yang merupakan bagian yang akan menarik untuk terus diamati dan dijadikan catatan historis bagi peri kehidupan penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, mungkin besok lusa, isi buku ini sudah tidak *up to date* lagi untuk disimak, tetapi sebagai catatan sejarah tetap memiliki arti bagi perkembangan pengetahuan dunia penyiaran di Indonesia. Namun, hal itu juga yang memberikan peluang kepada penulis bahwa besok-lusa, buku ini akan direvisi dan diadaptasi dengan perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. ***

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Miranda Risang. 2009. *Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutos dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, PSKN-FH Universitas Padjadjaran.
- Cjuchro, Dian Wardiaa, Pikiran Rakyat, 27 Januari 2010
- Danial, Akhmad. 2009. *Iklan Politik TV*. Yogyakarta: LKIS
- Denico Doly. 2015. *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 6, No. 2, November 2015.
- Hidayat, Dadang Rahmat dan M. Z. Al-Faqih. 2018. *KPI: Regulator Penyiaran Indoensia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Hill, David. 1995. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
- Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master plan) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF)
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hikmat, Mahi M. Hikmat. *KPI/KPID Takan Pernah Mati*. Pikiran Rakyat pada 13 April 2017
- Tahun Kekerasan Lembaga Penyiaran. Harian Pikiran Rakyat, 4 Januari 2016
- Televisi dan Wabah Begal. Harian Pikiran Rakyat, 31 Maret

2015

- Berncanda Tidak dengan Mencala. *Harian Pikiran Rakyat*, 10 Februari 2016
- Kontroversi Dangdut. *Harian Pikiran Rakyat*, 15 Maret 2016
- Melindungi Anak, Menghukum Terduga. *Harian Pikiran Rakyat*, 8 Agustus 2016
- Migrasi Film Bioskop ke Televisi. *Harian Pikiran Rakyat*, 10 November 2016
- Melarang Tayangan Kartun. *Harian Pikiran Rakyat*, 1 September 2015
- Mewaspada Konten Siaran Iklan. *Harian Pikiran Rakyat*, 29 November 2017
- Tahun Mistik, Horor, dan Supranatural. *Harian Pikiran Rakyat*, 7 Januari 2019
- Pembatasan Lagu Berbahasa Inggris. *Harian Pikiran Rakyat*, 4 Maret 2019
- Mengawasi Media Sosial. *Harian Pikiran Rakyat*, 14 Agustus 2019
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas
- Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF).
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran

- Rasyid, Mochamad Riyanto. 2013. *Kekerasan di Layar Kaca: Bisnis Siaran, Peran KPI, dan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- S. Sahala Tua Saragih menulis sebuah artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat, 29 Maret 2017 dengan judul Matinya KPID
- Surbakti, Ramlan dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia*, Jakarta 2008.
- Tinarbuko, Sumbo. 2009. *Iklan Politik: Dalam Realitas Media*. Yogyakarta: Jalasutra
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wasko, J. 1982. *Movies and Money: Financing the American Film Industry*. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corp.



